DLH KALTENG

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

@dlh_kalteng @dlh provinsi kalteng @dlhkalteng @dlh_kalteng @dlhprovkalteng www.dlh.kalteng.go.id

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025-2029

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Dearah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Dearah menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

b. bahwa Rencana Strategis Perangkat yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6301);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6870);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6909;
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182);
25. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 112);
26. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2020 tentang Reforma Agraria;

27. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Standar Operasionalisasi Prosedur Konsolidasi Tanah;
33. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 4);

36. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
37. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 3);
38. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan strategis untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah dan badan daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029, meliputi:
    1) Inspektorat Daerah;
    2) Dinas Pendidikan;
    3) Dinas Kesehatan;
    4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    5) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
    6) Dinas Sosial;
    7) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
    8) Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
    9) Dinas Ketahanan Pangan;
    10) Dinas Lingkungan Hidup;
    11) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
    12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

13) Dinas Perhubungan;
14) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
15) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17) Dinas Pemuda dan Olahraga;
18) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
19) Dinas Perpustakaan dan Arsip;
20) Dinas Kelautan dan Perikanan;
21) Dinas Perkebunan;
22) Dinas Kehutanan;
23) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
24) Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
25) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
26) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
27) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
28) Badan Keuangan dan Aset Daerah;
29) Badan Pendapatan Daerah;
30) Badan Kepegawaian Daerah;
31) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
32) Badan Penanggulangan Bencana;
33) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
34) Badan Penghubung;
35) Sekretariat DPRD; dan
36) Sekretariat Daerah;

Pasal 2

(1) Renstra disusun dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.

(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. Pendahuluan;
b. Gambaran Pelayanan Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
c. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
d. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
e. Penutup.

(3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(4) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029, berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025-2029.

Pasal 3

(1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi untuk menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;

(2) Pemerintah Provinsi dapat melakukan penambahan sub kegiatan baru akibat dari kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, kejadian luar biasa, dan/atau perintah dari peraturan perundang-undangan setelah Renstra Perangkat Daerah ditetapkan;

(3) Penambahan sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pemerintah Provinsi menggunakan hasil Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi dengan DPRD.

Pasal 4

(1) Pemerintah Provinsi melakukan pemetaan program dan kegiatan sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian muatan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 September 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

AGUSTIAR SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 September 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

LEONARD S. AMPUNG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 46

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan William A.S No. 08, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon / Faksimile (0536) 3223756, Laman http://www.dlh.kalteng.go.id, Pos-el dlh@kalteng.go.id

KATA PENGANTAR

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah menindak lanjuti dengan menyusun dokumen Renstra PD tahun 2025-2029.

Dalam penyusunan Renstra ini telah mengacu pada visi, misi, sasaran, program maupun indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah yang akan digunakan sebagai instrumen perencanaan program/kegiatan DLH Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bahan implementasi asas akuntabilitas kinerja.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, pemikiran dan saran dalam penyusunan Renstra ini disampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga dokumen Renstra 2025-2029 dapat meningkatkan kinerja DLH Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Tengah ke depan dapat dilaksanakan secara lebih optimal dan terpadu dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Palangka Raya, 23 September 2025
KEPALA DINAS,

JONI HARTA, SE., S.Hut., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 197606022005011010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Gambar iii
Daftar Tabel iv

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-3
1.3 Maksud dan Tujuan I-5
1.4 Sistematika Penulisan I-5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH II-1
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah II-1
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah II-1
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah II-11
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah II-20
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan II-27
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan II-27
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah II-28
2.2.1 Identifikasi Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah II-29
2.2.2 Penentuan Isu Strategis II-49

BAB III TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN III-1
3.1 Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ..... III-1
3.2 Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ..... III-1
3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ..... III-4
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ..... III-6
3.5 Program Prioritas Daerah III-10

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN IV-1
4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan RENSTRA PD IV-1
4.2 Indikator Kinerja Utama IV-65
4.3 Indikatror Kinerja Kunci IV-66

BAB V PENUTUP V-1
5.1 Kesimpulan Substansial V-1
5.2 Kaidah Pelaksanaan V-2
5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan V-3

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	II-4
Gambar 2.2	Bangunan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	II-13
Gambar 2.3	Perbandingan IKLH Provinsi Kalimantan Tengah dan IKLH Nasional Tahun 2016-2024	II-21
Gambar 2.4	Perbandingan Capaian IKLH Provinsi dan Nasional Tahun 2024	II-21
Gambar 3.1	Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD	III-2
Gambar 3.2	Program Prioritas Daerah Huma Betang	III-9
Gambar 3.3	Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS)	III-16
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program, Kegiatan, Subkegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah	IV-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Barang ke Neraca di Dinas Lingkungan Hidup	II-13
Tabel 2.2	Daftar Aset Tetap Peralatan Mesin Dinas Lingkungan Hidup	II-14
Tabel 2.3	Daftar Aset Gedung Bangunan Dinas Lingkungan Hidup	II-17
Tabel 2.4	Daftar Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi Dinas Lingkungan Hidup.....	II-18
Tabel 2.5	Daftar Aset Tetap Lainnya Dinas Lingkungan Hidup.....	II-18
Tabel 2.6	Daftar Aset Lainnya Dinas Lingkungan Hidup.....	II-18
Tabel 2.7	Capaian Indikator Kinerja Tujuan pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2024.....	II-22
Tabel 2.8	Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026	II-22
Tabel 2.9	Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026	II-25
Tabel 2.10	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	II-30
Tabel 2.11	Penjelasan Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029	II-31
Tabel 2.12	Telaah Visi dan Misi dan Program Gubernur Kalimantan Tengah 2025-2029	II-36
Tabel 2.13	Telaah Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan DLH Ditinjau dari Renstra Kemeterian Lingkungan Hidup 2025-2029	II-44
Tabel 2.14	Telaah Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan DLH Ditinjau dari RPJMD 2025-2029	II-47
Tabel 2.15	Penentuan Isu Strategis Perangkat Daerah	II-52
Tabel 3.1	Telaah antara Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (PD)	III-3
Tabel 3.2	Perumusan Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah	III-4
Tabel 3.3	Penahapan Rencana Strategis Perangkat Daerah	III-5
Tabel 3.4	Teknik merumuskan arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah	III-7
Tabel 3.5	Program Kegiatan DLH Mendukung Program Prioritas Daerah (Huma Betang)	III-14
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program /Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	IV-3
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	IV-26
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas PD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	IV-60
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	IV-65
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	IV-66

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tantangan pembangunan daerah yang terus berkembang menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang terencana, sistematis, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan, sosial, dan ekonomi. Penyusunan dokumen perencanaan yang kuat menjadi kunci dalam menjamin kesinambungan arah pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang. Sebagaimana diatur dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui perencanaan pembangunan yang merupakan bagian terpadu dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan ini disusun oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, dan dilaksanakan secara berjenjang melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Seluruh rencana pembangunan tersebut diimplementasikan oleh Perangkat Daerah (PD) melalui dokumen Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka menengah (lima tahun) dan Rencana Kerja (Renja) tahunan sebagai turunan dari Renstra PD.

Renstra perangkat daerah memiliki kedudukan strategis sebagai dokumen perencanaan formal yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, serta sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sektoral. Penyusunan Renstra menuntut pemahaman yang mendalam terhadap isu-isu aktual, visi dan misi kepala daerah, serta kemampuan merumuskan strategi dan program kerja yang terukur dan realistis. Pada dasarnya, Renstra harus menjawab tiga pertanyaan fundamental yaitu (1) sasaran apa yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang, (2) bagaimana strategi pencapaiannya, dan (3) langkah-langkah prioritas apa yang harus diambil untuk mewujudkan sasaran tersebut secara efektifitas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mendukung visi misi Gubernur Kalimantan Tengah periode Tahun 2025-2029. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah memiliki mandat untuk berkontribusi langsung terhadap pencapaian dua misi strategis daerah, yaitu Misi 1 dan Misi 3. Mandat Misi 1 adalah *“Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber daya alam lokal”*, dengan tujuan spesifik yaitu *“Mewujudkan pemanfaatan sumber daya lokal berbasis hilirisasi berlandaskan prinsip ekonomi hijau dan ekonomi biru.”* Dalam konteks ini, DLH memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya memenuhi aspek ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan ekologis, melalui penerapan prinsip ekonomi hijau dalam pengelolaan limbah, jasa lingkungan, dan konservasi sumber daya hayati. Sementara itu, mandat Misi 3 adalah *“Membangun infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan”*, dengan tujuan *“Meningkatkan ketahanan ekologi untuk meningkatkan kualitas hidup*

masyarakat." DLH memegang peranan penting dalam memastikan bahwa pembangunan infrastruktur berlangsung secara berkelanjutan, melalui upaya pengendalian dampak lingkungan, penguatan tata kelola izin lingkungan, serta perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi.

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu wilayah dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi di Indonesia, khususnya di kawasan hutan tropis, lahan gambut, dan daerah aliran sungai. Berbagai spesies endemik dan dilindungi seperti orangutan, bekantan, dan berbagai jenis flora langka menjadikan wilayah ini penting dalam konteks konservasi global. Namun demikian, tekanan terhadap keanekaragaman hayati semakin meningkat akibat alih fungsi lahan, pembukaan hutan, fragmentasi habitat, dan rendahnya penegakan hukum lingkungan. Upaya konservasi keanekaragaman hayati menjadi bagian tak terpisahkan dari tugas DLH, baik melalui penetapan kawasan esensial, pemantauan populasi satwa liar, maupun pengembangan skema insentif konservasi berbasis masyarakat.

Permasalahan lingkungan lain yang dihadapi Kalimantan Tengah mencakup tingginya laju deforestasi, degradasi lahan gambut, pencemaran air dan udara, serta pengelolaan sampah dan limbah yang belum optimal. Laju kehilangan hutan tercatat mencapai lebih dari 100.000 hektare per tahun, sedangkan karhutla masih menjadi ancaman serius terutama saat musim kemarau panjang. Kualitas udara menurun secara signifikan di daerah rawan kebakaran, dan pencemaran air dari pertambangan serta limbah domestik menurunkan ketersediaan air bersih. Ketidakmerataan infrastruktur pengelolaan limbah juga menjadi tantangan besar di kawasan urban dan rural. Dari sisi kelembagaan, DLH menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sistem informasi lingkungan berbasis data spasial dan digital, serta lemahnya koordinasi lintas sektor dalam perencanaan dan pengendalian lingkungan. Risiko jangka menengah dan panjang seperti perubahan iklim, bencana ekologis, serta penurunan biodiversitas memerlukan pendekatan adaptif, antisipatif, dan berbasis bukti ilmiah. Di tengah berbagai tantangan tersebut, peluang strategis juga tersedia melalui penguatan teknologi pemantauan kualitas lingkungan berbasis digital, adopsi prinsip ekonomi sirkular, serta pengembangan kerja sama multipihak menjadi langkah kunci dalam meningkatkan kinerja sektor lingkungan hidup. Pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat menjadi penting untuk menciptakan tata kelola lingkungan yang lebih inklusif, transparan, dan akuntabel.

Penyusunan Renstra DLH Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029 dilaksanakan secara paralel dengan penyusunan RPJMD, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah dan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja tahunan serta alat evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan lima tahunan. Selain berfungsi sebagai kerangka operasional, Renstra ini juga diharapkan berkontribusi pada pencapaian target nasional dan internasional seperti *Sustainable Development*

Goals (SDGs), pengendalian perubahan iklim melalui *Nationally Determined Contributions* (NDC), serta konservasi keanekaragaman hayati dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar Hukum penyusunan Renstra PD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953).
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7113);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 115);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10);
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 37).
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029 adalah sebagai pedoman operasional bagi seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan program dan kegiatan selama periode tahun 2025 hingga 2029. Renstra ini juga menjadi dasar penyusunan rencana kerja (Renja) tahunan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel, dan berkualitas serta mengacu pada Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Tengah.

Tujuan penyusunan Renstra ini adalah:

1. Menjadi acuan sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029;
2. Menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Menyediakan indikator pengukuran kinerja lima tahunan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Menjadi dasar partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pembangunan lingkungan hidup serta pengawasan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
2.2.2 Isu Startegis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
3.2 Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.3 Strategis Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan RENSTRA PD
4.2 Indikator Kinerja Utama
4.3 Indikator Kinerja Kunci

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan Substansial
5.2 Kaidah Pelaksanaan
5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Lampiran

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran *(rightsizing)* berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di Daerah Kalimantan Tengah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Pengelompokkan organisasi perangkat daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah *(strategic apex)*, Sekretaris Daerah *(middle line)*, Dinas Daerah *(operating core)*, Badan/fungsi penunjang *(technostructure)*, dan staf inti *(operating core)* serta Sekterariat Daerah/fungsi fasilitatif *(supporting staff)* yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melakanakan fungsi pengaturan dan pengurusan sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah adalah adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, untuk membantu kepala daerah dalam urusan penyelenggaraan dibidang lingkungan hidup dibentuk Dinas Lingkungan Hidup (tipe A).

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan mandat dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan ketugasannya diatur dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja perangkat Daerah.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi yaitu:

a. Pelaksanaan tugas kesekretariatan.
b. Perumusan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
c. Perencanaan program di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
d. Pengkoordinasian di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
e. Pelaksanaan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
f. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang lingkungan hidup, maka dibentuk struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
   a. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
   b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Tata Lingkungan;
4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
6. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
7. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
8. Unit Pelaksana Teknis.

Guna mendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup juga dibentuk kelompok jabatan fungsional. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pokok dalam organisasi Pemerintah. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Secara rinci kelompok jabatan fungsional di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari:

1. **Pengawas Lingkungan Hidup** bertugas melaksanakan pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. **Pengendalian Dampak Lingkungan** bertugas melaksanakan pengendalian dampak lingkungan yang meliputi pemantauan kualitas lingkungan, pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan perangkat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan;
3. **Penyuluh Lingkungan** bertugas melaksanakan kegiatan penyuluhan lingkungan hidup meliputi persiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan lingkungan hidup;
4. **Pengendali Ekosistem Hutan** bertugas melaksanakan melaksanakan Pengendalian Ekosistem Hutan meliputi penyiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi;
5. **Surveyor Pemetaan** bertugas melaksanakan kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial, pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial;
6. **Perencana** bertugas melaksanakan teknis kebijakan perencanaan pembangunan berdasarkan ruang lingkup kegiatan meliputi identifikasi masalah/isu strategis rencana pembangunan, penyusunan kebijakan rencana pembangunan, penyusunan adopsi dan legitimasi rencana pembangunan, pelaksanaan rencana pembangunan, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
7. **Arsiparis** bertugas melaksanakan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan, pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi;
8. **Pranata Komputer** bertugas melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia.

Selain kelompok jabatan fungsional tersebut, Dinas Lingkungan Hidup juga ditunjang Unit Pelaksana Teknis (UPT). Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang lingkungan hidup. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

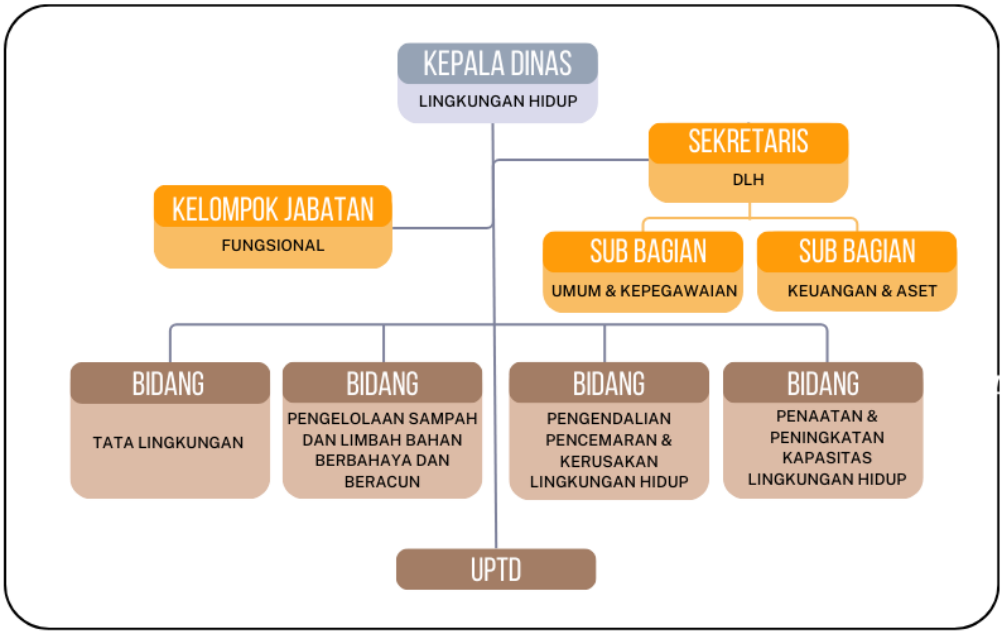

Gambar 2 - 1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah

Uraian tugas dan fungsi yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah diantaranya:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan menyelenggarakan tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas Lingkungan Hidup. Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi yang meliputi:

a. Penghimpunan bahan/data perencanaan dan penyusunan program lingkungan hidup serta perencanaan anggaran;
b. Penghimpunan bahan/data penyusunan pelaporan Dinas Lingkungan Hidup;
c. Pelaksanaan perumusan administrasi kepegawaian;
d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan dan aset;
e. Pelaksanaan urusan perpustakaan, humas, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;
f. Pelaksanaan urusan pengelolaan/administrasi keuangan, dan kepegawaian; dan
g. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, terdiri atas:

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas menyusun rencana kerja, mengumpul, mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian. Adapun fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian meliputi:

- Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- Penyelenggaraan fasilitasi urusan protokol dan hubungan masyarakat pada Dinas;
- Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Penyediaan perlengkapan rumah tangga kantor, pengelolaan surat menyurat, arsip, komunikasi, dokumentasi dan pelayanan umum kantor;
- Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan formasi ASN meliputi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, usulan formasi, distribusi dan penataan pegawai serta standar kompetensi jabatan;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Pengelolaan administrasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan budaya kerja pada Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
- Penilaian prestasi kerja para bawahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

b. Subbagian Keuangan dan Aset

Subbagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul, mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Subbagian Keuangan dan Aset. Adapun fungsi Subbagian Keuangan dan Aset meliputi:

- Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan dan Aset;
- Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan pada Subbagian Keuangan dan Aset;
- Pelaksanaan pengelolaaan keuangan dan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pengelolaan urusan perbendaharaan;
- Pelaksanaan penyusunan rekonsiliasi keuangan dan aset;
- Pelaksanaan penatausahaan keuangan dan aset;
- Penyelenggaraan penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang perangkat daerah;
- Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup dinas;
- Pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada Subbagian Keuangan dan Aset secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
- Penilaian prestasi kerja para bawahan pada Subbagian Keuangan dan Aset;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan dan Aset; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

2. Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, penyusunan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi, RPPLH, KLHS, kajian dampak lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup serta kerja sama teknis. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Tata Lingkungan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi yang meliputi:

a. Penginventarisasian data dan informasi sumber daya alam;
b. Pengoordinasian dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
c. Penyusunan dokumen RPPLH, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
d. Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air (RPPMA), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara (PPMU), Rencana Perlindung dan Pengelolaan Mutu Air Laut (RPPML);
e. Penyusunan daya dukung lingkungan dan jasa ekosistem;
f. Pengoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
g. Penyusunan sinkronisasi RPPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
h. Penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup serta instrumen ekonomi

lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif dan pendanaan lingkungan hidup);
i. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
j. Pelaksanaan validasi kajian lingkungan hidup strategis kabupaten/kota;
k. Pengoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH dan Analisis risiko LH);
l. Pelaksanaan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
m. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
n. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
o. Penginventarisasian Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi GRK;
p. Penyusunan perencanaan konservasi, kebijakan, pemanfaatan berkelanjutan, pengendalian kerusakan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati; dan
q. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas.

3. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melaksanakan perumusan, penyusunan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sampah, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan pengembangan fasilitas teknis serta kerja sama teknis. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun melaksanakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah di provinsi;
b. Penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
c. Pengoordinasian pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Regional;
d. Pengoordinasian pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/kota);
e. Penyusunan kebijakan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3;
f. Pemrosesan persetujuan teknis bagi pengumpul limbah B3 skala Provinsi;
g. Pemrosesan persetujuan pengangkutan Limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
h. Pemrosesan penimbunan Limbah B3 dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;

i. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
j. Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan sampah dan limbah B3;
k. Penyusunan perencanaan dan pembangunan TPA/TPST Regional;
l. Penetapan stasiun peralihan antara (intermediate transfer facility) dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi atau atas usulan dari kabupaten/kota;
m. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan teknologi pengelolaan sampah dan limbah B3; dan
n. Pelaksanaan investasi dalam usaha pengelolaan sampah dan limbah B3.
o. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas.

4. Bidang Pengendalian Pencemaran

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, penyusunan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan lintas daerah kabupaten/kota serta kerja sama teknis. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup melaksanakan fungsi :

a. Perumusan dan merencanakan pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup;
b. Penyusunan dan menetapkan baku mutu lingkungan, baku baku mutu sumber pencemaran dan baku kerusakan lingkungan;
c. Penyusunan daya tampung beban pencemaran;
d. Pengembangan standar teknis bidang pengendalian pencemaran lingkungan;
e. Pengoordinasian dan melaksanakan pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan noninstitusi;
f. Pengoordinasian pelaksanaan penanggulangan pencemaran sumber pencemar institusi dan noninstitusi;
g. Perumusan dan mengoordinasikan pelaksanaan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan sumber pencemar institusi dan noninstitusi;
h. Pemrosesan persetujuan teknis dan surat layak operasional bidang pengendalian pencemaran lingkungan;
i. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
j. Perumusan kebijakan dan melakukan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan noninstitusi;
k. Pengoordinasian pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan noninstitusi;

l. Perencanaan dan mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
m. Pengoordinasian pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
n. Pengoordinasian pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan; dan
o. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas.

5. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas dan fungsi perumusan, penyusunan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penaatan dan penegakan hukum lingkungan, peningkatan kapasitas lingkungan hidup, dan pengembangan informasi lingkungan serta kerja sama teknis. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup melaksanakan fungsi:

a. Perumusan dan sosialisasi kebijakan pelayanan pengaduan, penyelesaian pengaduan masyarakat dan sengketa lingkungan;
b. Perumusan dan melaksanakan penelaahan dan verifikasi serta penyusunan rekomendasi hasil tindak lanjut pengaduan;
c. Pengoordinasian dan melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
d. Pengoordinasian dan melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
e. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan penegakan hukum oleh Penyidik ASN Lingkungan Hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis serta Surat Layak Operasional (SLO);
f. Penyusunan kebijakan dan melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis serta Surat Layak Operasional (SLO);
g. Pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
h. Perumusan dan melaksanakan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
i. Pengkoordinasian pelaksanan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA), terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
j. Perumusan kebijakan dan menetapkan tanah ulayat yang merupakan wilayah Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan

tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA), terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

k. Perumusan kebijakan dan melaksanakan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
l. Perumusan dan menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
m. Perumusan dan mengoordinasikan pelaksanaan kemitraan dan penyediaan informasi lingkungan hidup.
n. Perumusan kebijakan pengelolaan, publikasi dan dokumentasi data dan informasi lingkungan;
o. Perumusan kebijakan dan melaksanakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup;
p. Penyusunan kebijakan, mengembangkan dan melaksanakan pemberian penghargaan di bidang lingkungan hidup; dan
q. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu :

1. Unit Pelaksana Teknis Pengolahan (UPT) Limbah Medis

UPT Limbah Medis pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2023. UPT Limbah Medis mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan teknis operasional pengolahan limbah medis meliputi penyusunan program kerja UPT, perencanaan teknis pelayanan penerimaan, penimbangan, pencatatan, pemusnahan, penyerahan residu limbah medis hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugasnya UPT Limbah Medis menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kerja UPT Pengolahan Limbah Medis;
b. pelaksanaan teknis pelayanan penerimaan, penimbangan, pencatatan, pemusnahan, penyerahan residu limbah medis hasil pengolahan limbah medis;
c. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program UPT Pengolahan Limbah Medis; dan
d. pelaksanaan administrasi UPT Limbah Medis.

Susunan organisasi UPT Limbah Medis terdiri dari :

a. Kepala UPT;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Pengangkutan dan Penerimaan Limbah Medis;
d. Seksi Pengolahan dan Penatausahaan Limbah Medis;
e. Kelompok Jabatan Fungsional;

2. Unit Pelaksana Teknis Pengolahan (UPT) Laboratorium Lingkungan

UPT Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 62 Tahun 2023. UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Laboratorium meliputi penyusunan program kerja, mengatur dan melaksanakan pengujian parameter kualitas lingkungan, pengambilan contoh uji dan pengendalian mutu, serta evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugasnya UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja UPT laboratorium lingkungan;
b. pelaksanaan, pengaturan, dan pengendalian preparasi sarana pengujian parameter kualitas lingkungan dan pengambilan contoh uji;
c. pengaturan dan pengendalian pelayanan pengujian contoh uji/bahan sampel secara laboratoris;
d. pengaturan dan pengendalian standar kompetensi sumber daya dan manajemen mutu laboratorium lingkungan;
e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program UPT Laboratorium Lingkungan; dan
f. pelaksanaan administrasi UPT Laboratorium Lingkungan

Susunan organisasi UPT Laboratorium Lingkungan terdiri atas:

a. Kepala UPT;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Pengujian;
d. Seksi Pengendalian Mutu; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedepan 2 (dua) UPT yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah yaitu UPT Laboratorium Lingkungan dan UPT Limbah Medis akan dikembangkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dengan perubahan status tersebut, dapat merubah sistem yang diterapkan menjadi lebih baik serta dapat merubah pengelolaan tata keuangan, sehingga dapat mengembangkan potensi bisnis dan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi maka diperlukan dukungan sumberdaya yang meliputi sumberdaya manusia, aset/modal serta sumberdaya lainnya. Sumberdaya yang saat ini dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

a. Sumber Daya Manusia

Sebagai unsur yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimilkinya, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah saat ini didukung oleh sumberdaya aparatur Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar belakang dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan formal. Jumlah ASN dan Pegawai Kontrak di Dinas

Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah seluruhnya berjumlah 112 orang yang terdiri dari 76 orang PNS, 21 orang PPPK dan 15 orang Pegawai Kontrak (Calon PPPK). Kondisi SDM Dinas Lingkungan Hidup menurut kualifikasi pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Doktoral (S3)	:	2	orang
2. Pasca Sarjana (S2)	:	26	orang
3. Sarjana (S1) / D4	:	61	orang
4. Sarjana Muda/Diploma III (D3)	:	6	orang
5. Diploma II (D2)	:	0	orang
6. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	:	15	orang
7. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	:	1	orang
8. Sekolah Dasar (SD)	:	1	orang

Kondisi pegawai menurut pangkat dan golongan adalah sebagai berikut:

1. Pembina Utama Madya (IV/d)	:	0	orang
2. Pembina Utama Muda (IV/c)	:	1	orang
3. Pembina Tingkat I (IV/b)	:	5	orang
4. Pembina (IV/a)	:	13	orang
5. Penata Tingkat I (III/d)	:	18	orang
6. Penata (III/c)	:	12	orang
7. Penata Muda Tingkat I (III/b)	:	10	orang
8. Penata Muda (III/a)	:	11	orang
9. Pengatur Tingkat I (II/d)	:	0	orang
10. Pengatur (II/c)	:	5	orang
11. Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	:	0	orang
12. Pengatur Muda (II/a)	:	0	orang
13. Juru Tingkat I (I/d)	:	0	orang
14. Juru (I/c)	:	1	orang
15. Juru Muda Tingkat I (I/b)	:	0	orang
16. Juru Muda (I/a)	:	0	orang
17. Golongan IX (PPPK)	:	17	orang
18. Golongan VII (PPPK)	:	1	orang
19. Golongan V (PPPK)	:	3	orang

b. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka penyusunan perencanaan pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana penunjang kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah ke depan, sangat penting untuk dilakukan penilaian kebutuhan prasarana dan sarana dalam rangka penyelenggaraan pelayanan secara optimal, efisien dan efektif. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, selain didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten, didukung pula oleh ketersediaan berbagai sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik.

Gambar 2 - 2. Bangunan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel 2. 1. Rekapitulasi Barang ke Neraca di Dinas Lingkungan Hidup

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	**Aset Tetap**	**37.798.201.599,50**
1	**Tanah**	0,0
1.01	Tanah	0,00
2	**Peralatan Dan Mesin**	25.086.155.878,28
2.01	Alat Besar	860.862.000,00
2.02	Alat Angkutan	8.348.791.679,00
2.03	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	755.113.145,56
2.04	Alat Pertanian	52.919.000,00
2.05	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	1.941.522.003,21
2.06	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	1.996.063.173,00
2.07	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	0,00
2.08	Alat Laboratorium	7.493.604.925,00
2.09	Alat Persenjataan	858.290.000,00
2.10	Komputer	2.733.989.952,51
2.11	Alat Eksplorasi	0,00
2.12	Alat Pengeboran	0,00
2.13	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	0,00
2.14	Alat Bantu Eksplorasi	0,00
2.15	Alat Keselamatan Kerja	0,00
2.16	Alat Peraga	0,00
2.17	Peralatan Proses/Produksi	0,00
2.18	Rambu Rambu	45.000.000,00
2.19	Peralatan Olah Raga	0,00
3	**Gedung Dan Bangunan**	12.443.695.626,22
3.01	Bangunan Gedung	10.022.500.626,22
3.02	Monumen	0,00
3.03	Bangunan Menara	0,00
3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.421.195.000,00
4	**Jalan, Jaringan Dan Irigasi**	52.673.095,00

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
4.01	Jalan Dan Jembatan	0,00
4.02	Bangunan Air	0,00
4.03	Instalasi	52.673.095,00
4.04	Jaringan	0,00
5	**Aset Tetap Lainnya**	215.677.000,00
5.01	Bahan perpustaan	15.870.000,00
5.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	0,00
5.03	Hewan	0,00
5.04	Biota Perairan	0,00
5.05	Tanaman	0,00
5.06	Barang Koleksi Non Budaya	0,00
5.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	199.807.000,00
6	**Konstruksi Dalam Pengerjaan**	0,00
6.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
1.5	**Aset Lainnya**	**5.663.305.856,39**
2	**Kemitraan Dengan Pihak Ketiga**	0,00
2.01	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00
3	**Aset Tidak Berwujud**	1.277.541.000,00
3.01	Aset Tidak Berwujud	1.277.541.000,00
4	**Aset Lain-lain**	4.385.764.856,39
4.01	Aset Lain-lain	4.385.764.856,39

Tabel 2. 2. Daftar Aset Tetap Peralatan Mesin Dinas Lingkungan Hidup

No.	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1.	**Dinas Lingkungan Hidup**	916	25.086.155.878,28
	ALAT BESAR	12	860.862.000,00
	- Stationary Generating Set	1	359.086.000,00
	- Pompa Air	9	498.476.000,00
	- alat bantu lainnya lainnya (dst)	2	3.300.000,00
	KOMPUTER	168	2.733.989.952,51
	- P.C Unit	45	753.923.484,00
	- Lap Top	37	805.499.935,00
	- Note Book	13	116.132.750,00
	- Tablet PC	1	11.282.527,00
	- Personal Komputer lainnya	3	326.650.500,00
	- Plotter (Peralatan Mainframe)	1	90.133.643,42
	- Scanner (Peralatan Mini Komputer)	5	40.000.000,00
	- Monitor	1	3.902.500,00
	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	54	381.647.960,00
	- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	14.514.000,00
	- Peralatan Personal Komputer lainnya	2	12.685.000,00
	- Server	2	164.202.653,09
	- Router	1	7.015.000,00
	- Peralatan Jaringan lainnya	1	6.400.000,00
	RAMBU RAMBU	1	45.000.000,00
	- rambu bersuar lainnya (dst)	1	45.000.000,00
	ALAT ANGKUTAN	34	8.348.791.679,00

No.	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
	- Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	6	3.615.537.209,00
	- Pick Up	6	2.367.150.000,00
	- Sepeda Motor	15	224.205.470,00
	- Truck Sampah	2	1.071.099.000,00
	- Ran Laboratorium / Uji Coba	1	950.000.000,00
	- alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	3	120.100.000,00
	- Gerobak Dorong	1	700.000,00
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	31	755.113.145,56
	- Gergaji Chain Saw	1	14.905.000,00
	- Global Positioning System	8	44.407.948,88
	- alat ukur/test klinis lain lainnya (dst)	2	354.864.400,00
	- Termometer Standar	5	3.960.333,35
	- alat ukur lainlain lainnya (dst)	13	256.646.983,33
	- Resistivity Meter	1	78.033.000,00
	- alat ukur lainnya lainnya (dst)	1	2.295.480,00
	ALAT PERTANIAN	5	52.919.000,00
	- alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak lainnya (dst)	1	2.156.000,00
	- Alat Pengukur P.H. Tanah (Soil Tester)	1	21.090.000,00
	- Alat Laboratorium lainnya	3	29.673.000,00
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	473	1.941.522.003,21
	- Mesin Ketik Listrik	1	6.500.000,00
	- Lemari Besi/Metal	3	12.017.100,00
	- Lemari Kayu	20	136.514.933,00
	- Rak Besi	4	7.700.000,00
	- Filing Cabinet Besi	12	29.300.000,00
	- Brandkas	4	50.500.000,00
	- Locker	2	10.400.000,00
	- CCTV Camera Control Television System	3	82.900.100,00
	- LCD Projector/Infocus	3	42.810.000,00
	- Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	3.800.000,00
	- Alat Kantor Lainnya	25	19.782.380,00
	- Meja Kerja Besi/Metal	2	4.000.000,00
	- Meja Kerja Kayu	3	16.105.000,00
	- Kursi Kayu	2	14.250.000,00
	- Meja Rapat	8	48.395.000,00
	- Meja Resepsionis	2	19.533.500,00
	- Meja Makan Besi	1	4.291.845,00
	- Kursi Tamu	6	25.500.000,00
	- Kursi Putar	6	2.400.000,00
	- Kursi Lipat	40	30.000.000,00
	- Sofa	6	38.400.000,00
	- Meubeleur lainnya	3	19.311.016,00
	- Mesin Pemotong Rumput	11	36.500.000,00
	- Lemari Es	5	17.759.039,00
	- A.C. Sentral	1	10.750.000,00
	- A.C. Split	35	424.360.000,00
	- Exhause Fan	10	6.000.000,00
	- Cold Storage (Alat Pendingin)	1	35.686.500,00
	- Alat Pendingin lainnya	3	2.530.800,00
	- Kompor Gas (Alat Dapur)	1	2.803.922,00
	- Treng Air/Tandon Air	3	15.719.613,00
	- Blender	1	999.000,00
	- Televisi	4	63.141.845,00

No.	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
	- Sound System	1	21.600.000,00
	- Microphone	1	3.500.000,00
	- Dispenser	2	7.253.000,00
	- Gordyin/Kray	1	16.094.420,00
	- Alat Rumah Tangga Lainlain	1	17.000.000,00
	- Alat Pemadam/Portable	1	1.650.000,00
	- Alat Pembantu Kebakaran	1	2.350.000,00
	- Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	9.600.000,00
	- Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	19.975.000,00
	- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	11	32.725.000,00
	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	58	116.059.150,00
	- Meja Kerja Pejabat lainlain	7	24.324.537,21
	- Meja Tamu Biasa	1	4.291.845,00
	- Meja Operator	9	13.502.100,00
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	2.500.000,00
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	7.500.000,00
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	10	12.000.000,00
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon V	5	7.500.000,00
	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	90	162.887.308,00
	- Kursi Kerja Pejabat lainnya	9	36.550.000,00
	- Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	10	10.510.000,00
	- Kursi Hadap Depan Meja Kerja lainnya	6	23.000.000,00
	- Kursi Tamu di Ruangan Pejabat lainnya	4	42.511.650,00
	- Buffet Kaca	1	5.976.400,00
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	81	1.996.063.173,00
	- Microphone/Wireless MIC	2	23.300.000,00
	- Professional Sound System	5	157.437.000,00
	- Voice Recorder	3	7.225.200,00
	- peralatan studio audio lainnya (dst)	1	15.000.000,00
	- Camera Electronic	7	96.569.500,00
	- Tripod Camera	1	7.550.000,00
	- Film Projector	2	25.366.250,00
	- Slide Projector	1	2.899.000,00
	- Lensa Kamera	2	26.900.000,00
	- Photo Tustel	3	4.356.320,00
	- Layar Film/Projector	4	46.492.000,00
	- Camera Digital	2	29.994.420,00
	- Video Conference	1	20.400.000,00
	- Alat Studio Video Lainnya	1	479.700.000,00
	- peralatan studio gambar lainnya (dst)	1	9.847.588,00
	- GPS Receiver	11	62.822.500,00
	- Kamera Udara	15	858.091.400,00
	- Alat Studio Lainnya	3	70.080.995,00
	- Handy Talky (HT)	10	19.895.000,00
	- alat komunikasi radio hf/fm lainnya (dst)	4	19.647.000,00
	- Wireless Amplifier	1	5.000.000,00
	- switcher antena lainnya (dst)	1	7.489.000,00
	ALAT LABORATORIUM	95	7.493.604.925,00
	- Water Bath (Alat Laboratorium Umum)	1	35.050.000,00
	- PH Meter (Alat Laboratorium Umum)	1	32.250.000,00
	- alat laboratorium umum lainnya (dst)	3	1.064.110,00
	- Microscope Binocular	1	23.809.500,00
	- Analytical Balance Electric	3	128.933.010,00
	- Desicator	1	16.357.945,00
	- Salinity Conductivity/Temperaturemeter/STC	1	31.484.652,00

No.	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
	- Multi Purpose	1	25.900.000,00
	- Atomic Absorption Spectofotometer	1	1.490.850.000,00
	- alat laboratorium kimia lainnya (dst)	1	174.534.000,00
	- Magnetic Stirer (Alat Laboratorium Patologi)	1	3.881.825,00
	- Lemari Asam	1	208.250.000,00
	- Cod Monitor	1	74.099.230,00
	- Flow Meter (Alat Laboratorium Pertanian)	1	25.147.050,00
	- Turbidity Meter	2	49.499.500,00
	- Hot Plate Stirrer	2	55.300.000,00
	- Laboratory Emergency Shower/Eyewash	1	13.764.000,00
	- unit alat laboratorium lainnya lainnya (dst)	3	1.219.800.000,00
	- Dissolvel Oxygen Meter (DO)	1	31.384.383,00
	- Generator Set (Lab Scale)	1	6.493.500,00
	- Uninterupted Power Supply (UPS)	1	4.145.000,00
	- Horizontal/Vertical Water Level Recorder	1	5.100.000,00
	- DO Meter (Alat Laboratorium Kwalitas Air Dan Tanah)	1	50.000.000,00
	- TOC Analyzer	1	782.890.000,00
	- alat laboratorium kwalitas air dan tanah lainnya (dst)	15	219.339.133,90
	- Air Sampler	1	45.200.000,00
	- alat laboratorium kwalitas udara lainnya (dst)	4	555.603.405,00
	- alat laboratorium kebisingan dan getaran lainnya (dst)	1	6.211.000,00
	- Hot Air Drying Oven	1	39.606.489,00
	- Gas Chromatography High Resolution Time of Flight Mass Spectometer	10	461.282.236,00
	- UV/VIS Spectrophotometer	1	217.916.285,00
	- Bod Incubator	1	69.126.126,10
	- alat laboratorium penunjang lainnya (dst)	26	846.417.545,00
	- alat laboratorium lingkungan hidup lainnya lainnya (dst)	2	272.915.000,00
	- alat laboratorium uji perangkat lainnya (dst)	1	270.000.000,00
	ALAT PERSENJATAAN	16	858.290.000,00
	- Pistol	10	848.090.000,00
	- Alat Khusus Bahari	3	1.200.000,00
	- alat keamanan lainnya (dst)	3	9.000.000,00
	Total	**916**	**25.086.155.878,28**

Tabel 2. 3. Daftar Aset Gedung Bangunan Dinas Lingkungan Hidup

NO	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	LUAS (M2)	NILAI (Rp.)
1.	**Dinas Lingkungan Hidup**			12.443.695.626,22
	BANGUNAN GEDUNG			12.443.695.626,22
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl.Williem As. No.08 Palangka Raya		2.169.958.000,00
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl.Williem As. No.08 Palangka Raya	1,023.00	4.730.294.502,02
	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	Jl.Williem As. No.08 Palangka Raya		1.376.400.000,00
	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	Jl.Williem As. No.08 Palangka Raya		817.778.124,20
	Gedung Garasi/Pool Permanen	Jl.Williem As. No.08 Palangka Raya	48.00	87.800.000,00
	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	Jl.Williem As. No.08 Palangka Raya	72.00	99.900.000,00

NO	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	LUAS (M2)	NILAI (Rp.)
	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	Jl.Williem As. No.08 Palangka Raya		740.370.000,00
	Pagar Permanen	JL.Cilik Riwut KM.15 Palangkaraya		2.421.195.000,00
TOTAL				**12.443.695.626,22**

Tabel 2. 4. Daftar Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi Dinas Lingkungan Hidup

NO.	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	LUAS (M2)	NILAI (Rp.)
1.	**Dinas Lingkungan Hidup** INSTALASI Sumur Resapan	Jl.Ahmad Yani Palangka Raya	25.00	52.673.095,00 52.673.095,00 20.156.200,00
	Instalasi Penangkal Petir Manual	Jl.Williem As No 08 Palangka Raya		32.516.895,00
TOTAL				**52.673.095,00**

Tabel 2. 5. Daftar Aset Tetap Lainnya Dinas Lingkungan Hidup

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	**Dinas Lingkungan Hidup**	7	215.677.000,00
	BAHAN PERPUSTAKAAN	6	15.870.000,00
	Kimia	4	6.500.000,00
	Buku ilmu pengetahuan praktis lainnya (dst)	1	8.500.000,00
	Serial Lainlain (dst)	1	870.000,00
	ASET TETAP DALAM RENOVASI	1	199.807.000,00
	Aset Renovasi	1	199.807.000,00
TOTAL		**7**	**215.677.000,00**

Tabel 2. 6. Daftar Aset Lainnya Dinas Lingkungan Hidup

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	**Dinas Lingkungan Hidup**	309	5.663.305.856,39
	SOFTWARE	6	1.277.541.000,00
	- Software	6	1.277.541.000,00
	ASET RUSAK BERAT/USANG	303	4.385.764.856,39
	A.C. Sentral	3	21.320.200,00
	A.C. Split	21	141.875.000,00
	A.C. Window	1	4.291.849,00
	Alat Kantor Lainnya	25	84.560.647,24
	alat keamanan lainnya (dst)	1	21.290.000,00
	alat komunikasi radio hf/fm lainnya (dst)	5	39.175.600,00
	alat komunikasi radio ssb lainnya (dst)	1	199.000.000,00
	alat komunikasi radio uhf lainnya (dst)	21	89.421.794,35
	alat komunikasi sosial lainnya (dst)	2	15.000.000,00
	alat komunikasi telephone lainnya (dst)	1	15.000.000,00
	alat laboratorium kimia lainnya (dst)	1	262.650.000,00
	alat laboratorium kwalitas air dan tanah lainnya (dst)	2	47.700.000,00
	alat laboratorium lain lainnya (dst)	2	7.000.000,00
	Alat Pembantu Kebakaran	18	13.450.000,00
	alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak lainnya (dst)	1	2.567.045,81

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
	Alat Rumah Tangga Lainlain	2	85.240.000,00
	Alat Sampling Emisi Sumber Tidak Bergerak	1	215.300.000,00
	Alat Studio Pemetaan lainnya	1	6.599.320,00
	alat ukur lainlain lainnya (dst)	6	41.031.422,19
	alat ukur universal lainnya (dst)	4	16.956.000,00
	Camera Electronic	3	15.810.440,00
	Camera Video	1	19.900.000,00
	Facsimile	2	6.353.636,65
	Filing Cabinet Besi	1	1.000.000,00
	Gas Chromatography High Resolution Time of Flight Mass Spectometer	1	5.000.000,00
	Global Positioning System	1	7.241.444,44
	Handy Talky (HT)	2	5.000.000,00
	Hard Disk	2	3.160.000,00
	Jeep	3	947.794.000,00
	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	19	18.715.000,00
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	500.000,00
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	1.200.000,00
	Kursi Kerja Pejabat lainnya	4	10.597.646,89
	Kursi Lipat	1	10.000.000,00
	Kursi Putar	2	3.692.000,00
	Kursi Rapat	7	2.737.602,00
	Kursi Tamu	1	500.000,00
	Lap Top	1	19.457.000,00
	Layar Film/Projector	1	8.000.000,00
	Lemari Besi/Metal	8	4.000.000,00
	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	1	2.338.000,00
	Lemari Kaca	2	600.000,00
	Lemari Kayu	2	50.200.000,00
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	1.965.000,00
	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	500.000,00
	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	3.500.000,00
	Mesin Cuci	1	5.098.039,00
	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	2	800.000,00
	Mesin Ketik Manual Portable (1113 Inci)	2	600.000,00
	Meubeleur lainnya	1	500.000,00
	Microphone/Wireless MIC	2	4.800.000,00
	Mobil Unit Monitoring Frekwensi	2	1.070.000.000,00
	Note Book	25	286.797.770,41
	P.C Unit	15	255.328.100,10
	Papan Visual/Papan Nama	1	39.785.000,00
	Peralatan Jaringan lainnya	1	370.000,00
	Peralatan Komputer lainnya	2	4.960.000,00
	Peralatan Personal Komputer lainnya	10	33.411.746,91
	peralatan studio audio lainnya (dst)	4	58.826.610,71
	Pesawat Telephone	1	2.000.000,00
	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	1	4.750.000,00
	Point Tranter Device	3	4.515.750,00
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	28	72.385.004,69
	Rak Kayu	1	300.000,00
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	615.000,00
	Sepeda Motor	1	5.000.000,00
	Sound System	1	19.900.000,00
	Stabilisator	1	2.070.000,00

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
	Telephone Mobile	2	22.565.036,00
	Televisi	3	11.196.150,00
	Total	**309**	**5.663.305.856,39**

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dilihat dari capaian kinerja pada kualitas lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Tengah yang dihitung melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. IKLH juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional, yang merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh provinsi di Indonesia. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 4 indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Air (IKA) (2) Indeks Kualitas Udara (IKU); (3) Indeks Kualitas Lahan (IKL); dan (4) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, parameter yang digunakan untuk menghitung IKLH yaitu:

1. Indeks kualitas air : derajat keasaman (pH), COD, BOD, TSS, DO, Nitrat (NO_3-N), (T-Phosphat), Total Nitrogen, Fecal Coliform, Klorofil-a, dan/atau transparansi;
2. Indeks kualitas udara : Sulfur Dioksida (SO_2) dan Nitrogen dioksida (NO_2)
3. Indeks kualitas air laut : TSS, DO, Minyak dan Lemak, Amonia Total (NH_3-N), Ortofosfat (PO4-P) dan oksigen terlarut (DO)
4. Indeks Kualitas Lahan terdiri dari tutupan lahan dan ekosistem gambut.
   a. Tutupan lahan: luasan tutupan hutan dan luasan tutupan vegetasi non hutan
   b. Ekosistem gambut: areal terdampak kanal, areal bekas kebakaran, tutupan lahan, tinggi muka air tanah dan/atau areal yang terekspos sedimen berpirit dan/atau kuarsa di bawah lapisan gambut.

Tahun 2024 nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kalimantan Tengah adalah 74,80 masuk dalam kategori Baik, sedangkan capaian IKLH Nasional Tahun 2024 sebesar 73,53 masuk dalam kategori Baik.

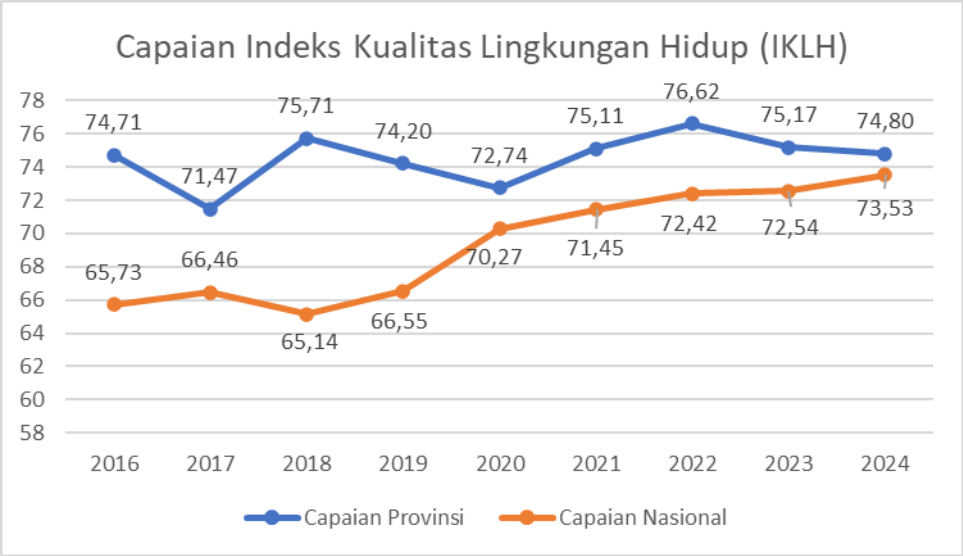

Gambar 2 - 3 Perbandingan IKLH Provinsi Kalimantan Tengah dan IKLH Nasional Tahun 2016-2024

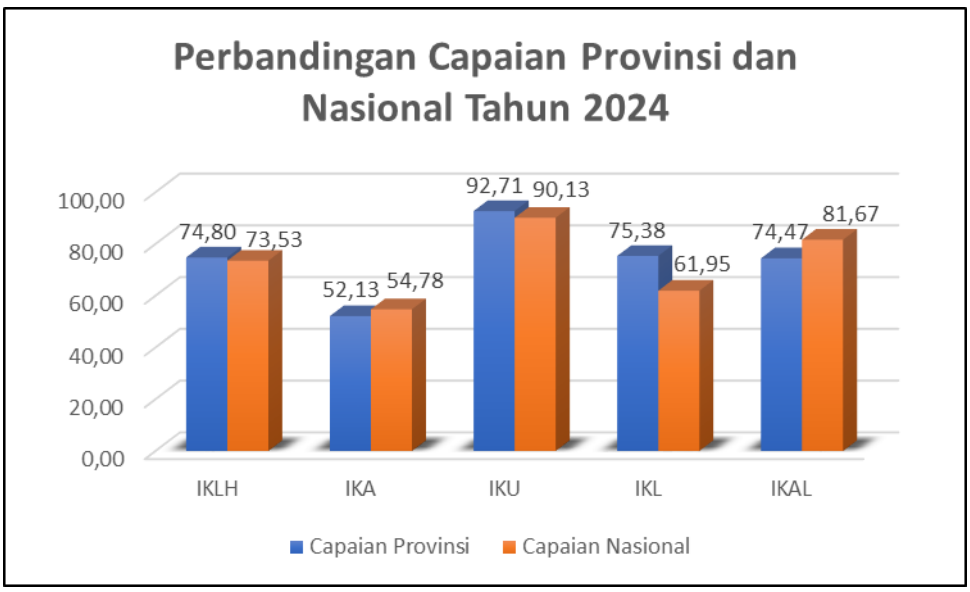

Gambar 2-4 Perbandingan Capaian IKLH Provinsi dan Nasional Tahun 2024

Dari gambar tersebut di atas, terlihat bahwa capaian IKLH Provinsi Kalimantan Tengah berada di atas capaian Nasional. Berdasarkan raport/profil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah berada pada peringkat 22 dari 38 Provinsi di Indonesia. Capaian Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 per indeks adalah Indeks Kualitas Air (IKA) 52.13, Indeks Kualitas Udara (IKU) 92.71, Indeks Kualitas Lahan (IKL) 75.38, Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) 74.47. Capaian IKLH Nasional Tahun 2024 per indes adalah Indeks Kualitas Air (IKA) 54.78, Indeks Kualitas Udara (IKU) 90.13, Indeks Kualitas Lahan (IKL) 61.95, Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) 81.67.

Tabel 2. 7. Capaian Indikator Kinerja Tujuan pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2024.

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	2022			2023			2024		
			Target	Capaian	Rasio	Target	Capaian	Rasio	Target	Capaian	Rasio
1.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai IKLH (poin)	74,3	76,62	103,12	74,53	75,17	100,86	74,75	74,8	100,07
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP (nilai)	66	69,15	104,77	66,43	69,7	104,92	66,96	69,95	104,47

Tabel 2. 8. Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

No	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan	2022			2023			2024		
			Target	Capaian	Rasio	Target	Capaian	Rasio	Target	Capaian	Rasio
1	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan Lingkungan Hidup	2	2	100	1	1	100	1	1	100
2	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74,3	76,62	103,12	74,53	75,17	100,86	74,75	74,8	100,07
3	Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) (ton)	1.407.074,73	1.540.985,16	109,52	1407274,777	1.232.759,88	87,60	1407474,827	947842,50	67,34

No	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan	2022			2023			2024		
			Target	Capaian	Rasio	Target	Capaian	Rasio	Target	Capaian	Rasio
4	Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH (%)	76	11,83	15,57	77	39,20	50,91	78	12,68	16,26
		Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup (%)	85	100	117,65	86	100	116,28	87	100	114,94
5	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH	2	1	50	2	1	50	2	1	50
		Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan	2	2	100	2	2	100	2	2	100
		Jumlah penghargaan lingkungan yang didapat	2	2	100	2	2	100	2	2	100
6	Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (ton)	17.911,12	22.783,94	127,21	18090,12	23.191,61	128,20	18271,13	29180,81	159,71

No	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan	2022			2023			2024		
			Target	Capaian	Rasio	Target	Capaian	Rasio	Target	Capaian	Rasio
7	Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Kepuasan Masyarakat	81	81,80	100,99	82	82,35	100,43	83	80,81	97,36

TABEL 2-9 EVALUASI TERHADAP HASIL RENSTRA LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang mengacu pada Sasaran RPJMD Provinsi: .

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)		Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-										Unit Penanggung Jawab
							1 (2022)		2 (2023)		3 (2024)		4 (2025)		5 (2026)		1 (2022)		2 (2023)		3 (2024)		4 (2025)		5 (2026)		1 (2022)		2 (2023)		3 (2024)		4 (2025)		5 (2026)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)		(22)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup (dokumen)	1	2		2		1		1		1		2		2		1		1						100,00%		100,00%		100,00%						DLH
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen rencana dan perlindungan di Bidang Lingkungan Hidup dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan (dokumen)	1	2	589.275.000	2	485.000.000	1	494.700.000	1	504.642.500	1	565.025.000	2	589.275.000	2	460.095.567	1	482.539.241	1	685.840.936					100,00%	94,87%	100,00%	97,54%	100,00%	135,91%					DLH
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Jumlah dokumen RPPLH (dokumen)	1	1	189.275.000	1	180.000.000	2	409.700.000	2	414.642.500	1	165.025.000	1	189.275.000	2	165.620.000	1	55.100.000	1	207.447.513					200,00%	92,01%	50,00%	13,45%	50,00%	50,03%					DLH
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah dokumen KLHS (dokumen)	4	4	400.000.000	4	305.000.000	3	85.000.000	3	90.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	2	294.475.567	1	427.439.241	1	478.393.423					50,00%	96,55%	33,33%	502,87%	33,33%	531,55%					DLH
2	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,74	75,16		74,3		74,53		74,75		74,97		75,16		76,62		75,17		74,80					103,12%		100,86%		100,07%						DLH
		Program Pengendalian Pencemaran Dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	IKLH	72,74	75,16	522.450.000	74,3	430.000.000	74,53	438.600.000	74,75	447.415.000	74,97	500.950.000	75,16	522.450.000	76,62	343.623.283	75,17	4.893.513.155	74,80	6.498.751.844					103,12%	79,91%	100,86%	1115,71%	100,07%	1452,51%					DLH
		Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Kegiatan pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup (kegiatan)	5	5	437.450.000	5	405.000.000	5	413.600.000	5	419.415.000	5	419.415.000	5	437.450.000	5	320.923.283	5	4.893.513.155	5	6.348.205.244					100,00%	79,24%	100,00%	1183,15%	100,00%	1513,59%					DLH
		Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan upaya penanggulangan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup (kegiatan)	1	1	30.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	28.000.000	1	28.000.000	1	30.000.000	2	22.700.000	1	24.935.000	1	150.546.600					200,00%	90,80%	100,00%	99,74%	100,00%	537,67%					DLH
		Pemulihan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan pemulihan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup (kegiatan)	0	1	55.000.000	0	0	0	0	0	0	1	53.535.000	1	55.000.000	-	-	-	-	-	-															DLH
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Jumlah dokumen profil Kehati (dokumen)	0	1	72.900.000	1	60.000.000	1	61.200.000	1	62.430.000	1	69.900.000	1	72.900.000	1	53.851.500	1	4.270.173.800	1	7.423.536.652					100,00%	89,75%	100,00%	6977,41%	100,00%	11890,98%					DLH
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati provinsi	0	1	72.900.000	1	60.000.000	1	61.200.000	1	62.430.000	1	69.900.000	1	72.900.000	1	53.851.500	1	4.270.173.800	1	7.423.536.652					100,00%	89,75%	100,00%	6977,41%	100,00%	11890,98%					DLH
3	Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan		Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) (ton)..	1.406.674,627	1.407.874,927		1.407.074,727		1.407.274,777		1.407.474,827		1.407.674,877		1.407.874,927		1135072,72		1232759,88		947842,50					80,67%		87,60%		67,34%						DLH
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) (ton).	1.406.674,627	1.407.874,927	243.000.000	1.407.074,727	200.000.000	1.407.274,777	204.000.000	1.407.474,827	208.100.000	1.407.674,877	233.000.000	1.407.874,927	243.000.000	1135072,72	197.442.200	1232759,88	413.394.493	947842,50	1.667.429.074					80,67%	98,72%	87,60%	202,64%	67,34%	801,26%					DLH
		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah usaha jasa pengumpulan limbah B3 lintas daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	2	2	243.000.000	2	200.000.000	2	204.000.000	2	208.100.000	2	233.000.000	2	243.000.000	1	197.442.200	1	413.394.493	1	1.667.429.074					50,00%	98,72%	50,00%	202,64%	50,00%	801,26%					DLH
4	Meningkatnya prosesntase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup		Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH (%)	68,75	80		76		77		78		79		80		12		39		13					15,57%		50,91%		16,26%						DLH
			Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup (%)	83,33	89		85		86		87		88		89		100		100		100					117,65%		116,28%		114,94%						DLH
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH (%)	68,75	80	791.449.276	76	651.398.581	77	664.426.553	78	677.780.224	79	758.879.347	80	791.449.276	12	1.116.531.859	39	848.154.100	13	1.217.753.245					15,57%	171,41%	50,91%	127,65%	16,26%	179,67%					DLH
		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi	25	300	791.449.276	300	651.398.581	300	664.426.553	300	677.780.224	300	758.879.347	300	791.449.276	93	1.116.531.859	176	848.154.100	71	1.217.753.245					31,00%	171,41%	58,67%	127,65%	23,67%	179,67%					DLH
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	83,33	89	48.600.000	85	40.000.000	86	40.800.000	87	41.620.000	88	46.600.000	89	48.600.000	100	37.050.000	100	39.904.480	100	2.125.010.027					117,65%	92,63%	116,28%	97,81%	114,94%	5105,74%					DLH
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah pengaduan yang ditangani (%)	100	100	48.600.000	100	40.000.000	100	40.800.000	100	41.620.000	100	46.600.000	100	48.600.000	100	37.050.000	100	39.904.480	100	2.125.010.027					100,00%	92,63%	100,00%	97,81%	100,00%	5105,74%					DLH

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)		Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-										Unit Penanggung Jawab
							1 (2022)		2 (2023)		3 (2024)		4 (2025)		5 (2026)		1 (2022)		2 (2023)		3 (2024)		4 (2025)		5 (2026)		1 (2022)		2 (2023)		3 (2024)		4 (2025)		5 (2026)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)		(22)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH	1	2		2		2		2		2		2		1		1		1						50,00%		50,00%		50,00%						DLH
			Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan	1	2		2		2		2		2		2		2		2		2						100,00%		100,00%		100,00%						DLH
			Jumlah penghargaan lingkungan yang didapat	1	2		2		2		2		2		2		2		2		2						100,00%		100,00%		100,00%						DLH
		Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Terkait Dengan PPLH	Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH (kelompok masyarakat)	1	2	72.900.000	2	60.000.000	2	61.200.000	2	62.430.000	2	69.900.000	2	72.900.000	1	53.312.000	1	374.400.363	1	229.019.830					50,00%	88,85%	50,00%	611,77%	50,00%	366,84%					DLH
		Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang terbentuk, diaku dan menjalankan kearifan lokal serta pengetahuan tradisional yang terkait dengan PPLH	1	2	72.900.000	2	60.000.000	2	61.200.000	2	62.430.000	2	69.900.000	2	72.900.000	1	53.312.000	1	374.400.363	1	170.064.800					50,00%	88,85%	50,00%	611,77%	50,00%	272,41%					DLH
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan (kegiatan)	1	2	243.000.000	2	200.000.000	2	204.000.000	2	208.100.000	2	233.000.000	2	243.000.000	2	195.110.625	2	828.473.293	2	653.544.690					100,00%	97,56%	100,00%	406,11%	100,00%	314,05%					DLH
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah provinsi	2	2	243.000.000	2	200.000.000	2	204.000.000	2	208.100.000	2	233.000.000	2	243.000.000	2	195.110.625	2	828.473.293	2	653.544.690					100,00%	97,56%	100,00%	406,11%	100,00%	314,05%					DLH
		Program Penghargaan Lingkungan	Jumlah penghargaan lingkungan yang	1	2	370.575.000	2	305.000.000	2	311.100.000	2	317.352.500	2	355.325.000	2	370.575.000	2	269.924.479	2	632.979.749	2	628.896.143					100,00%	88,50%	100,00%	203,47%	100,00%	198,17%					DLH
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Masyarakat	Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang didapat oleh masyarakat/ lembaga masyarakatat/dunia usaha	0	2	370.575.000	2	305.000.000	2	311.100.000	2	317.352.500	2	355.325.000	2	370.575.000	2	269.924.479	2	632.979.749	2	628.896.143					100,00%	88,50%	100,00%	203,47%	100,00%	198,17%					DLH
6	Meningkatkan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)		Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (ton)	17.215,61	18.822,92		17.911,12		18.090,23		18.271,13		18.636,55		18.822,92		5059,71		23191,61		29180,81					28,25%		128,20%		159,71%						DLH
		Program Pengelolaan Persampahan	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (ton)	17.215,61	18.822,92	5.315.625.000	17.911,12	4.375.000.000	18.090,23	4.462.500.000	18.271,13	4.552.187.500	18.636,55	5.096.875.000	18.822,92	5.315.625.000	5059,71	4.134.844.991	23191,61	4.870.101.332	29180,81	5.409.750.202					28,25%	94,51%	128,20%	109,13%	159,71%	118,84%					DLH
		Penanganan Sampah di TPA / TPST Regional	Jumlah Kegiatan Penangan Sampah (kegiatan)	1	1	5.315.625.000	1	4.375.000.000	1	4.462.500.000	1	4.552.187.500	1	5.096.875.000	1	5.315.625.000	2	4.134.844.991	1	4.870.101.332	1	5.409.750.202					200,00%	94,51%	100,00%	109,13%	100,00%	118,84%					DLH
7	Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah		Nilai Kepuasan masyarakat	81,3	87,05		82,45		83,6		84,75		85,9		87,05		81,80		82,35		80,81					99,21%		98,50%		95,35%						DLH
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase keterlaksanaan (%)	100	100	10.657.505.444	100	8.771.609.419	100	8.947.041.607	100	9.126.859.600	100	10.218.924.973	100	10.657.505.444	100	8.115.318.736	100	14.769.605.725	100	21.413.187.523					100,00%	92,52%	100,00%	165,08%	100,00%	234,62%					DLH
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD (dokumen)	10	9	322.000.000	10	287.000.000	9	287.000.000	9	287.000.000	9	301.000.000	9	322.000.000	10	286.249.800	9	14.769.605.725	9	325.563.730					100,00%	99,74%	100,00%	5146,20%	100,00%	113,44%					DLH
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan PD (%)	100	100	6.625.505.444	100	6.398.953.135	100	6.408.953.135	100	6.408.953.135	100	6.585.953.135	100	6.625.505.444	100	6.076.357.882	100	6.171.534.907	100	8.719.434.079					100,00%	94,96%	100,00%	96,30%	100,00%	136,05%					DLH
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (%)	100	100	45.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	44.602.000	100	38.861.200	100	53.581.000					100,00%	99,12%	100,00%	86,36%	100,00%	119,07%					DLH
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian PD (%)	100	100	230.000.000	100	50.000.000	100	113.000.000	100	125.000.000	100	145.000.000	100	230.000.000	100	57.010.000	100	167.652.813	100	406.606.638					100,00%	114,02%	100,00%	148,37%	100,00%	325,29%					DLH
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum PD (%)	100	100	1.015.000.000	100	610.000.000	100	710.000.000	100	770.000.000	100	985.000.000	100	1.015.000.000	100	678.182.726	100	1.497.103.720	100	1.827.693.373					100,00%	111,18%	100,00%	210,86%	100,00%	237,36%					DLH
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keterlaksanaan pengadaan barang milik daerah (%)	0	100	650.000.000	0	0	0	0	0	0	100	300.000.000	100	650.000.000	-	-	100	4.066.290.000	100	6.719.933.124					-	-	100,00%	100%	100,00%	100,00%					DLH
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan PD (%)	100	100	1.410.000.000	100	1.260.656.284	100	1.260.588.472	100	1.340.906.465	100	1.371.971.838	100	1.410.000.000	100	826.963.028	100	1.304.824.375	100	1.432.979.964					100,00%	65,60%	100,00%	103,51%	100,00%	106,87%					DLH
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peresentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan PD (%)	100	100	360.000.000	100	120.000.000	100	122.500.000	100	150.000.000	100	485.000.000	100	360.000.000	100	145.953.300	100	916.223.812	100	1.927.395.615					100,00%	121,63%	100,00%	747,94%	100,00%	1284,93%					DLH
			Jumlah/Total			**18.927.279.720**		**15.578.008.000**		**15.889.568.160**		**16.208.917.324**		**18.148.379.320**		**18.927.279.720**		**14.977.105.240**		**32.423.239.731**		**47.952.720.166**															
																										Rata-rata capaian kinerja Program(%)	**81,39**	**99,02**	**93,99**	**919,48**	**91,67**	**1.890,78**					
																										Predikat kinerja Program	**Tinggi**	**Sangat tinggi**	**Sangat tinggi**	**Sangat tinggi**	**Sangat tinggi**	**Sangat tinggi**					
																										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)	**104,26**	**99,30**	**87,10**	**858,74**	**85,35**	**1.196,85**					
																										Predikat kinerja Kegiatan	**Sangat tinggi**	**Sangat tinggi**	**Tinggi**	**Sangat tinggi**	**Tinggi**	**Sangat tinggi**					

Faktor pendorong pencapaian kinerja:	
Faktor penghambat:	
Usulan tindak lanjut pada Renja Perangkat Daerah provinsi berikutnya:	
Usulan tindak lanjut pada Renstra Perangkat Daerah provinsi berikutnya:	

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Lingkungan Hidup umumnya meliputi masyarakat luas, sektor usaha dan pemerintahan. Sasaran ini bertujuan untuk mencapai keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup serta membangun kesadaran dan aksi nyata dalam melindungi dan memelihara lingkungan

- Masyarakat luas: pemangku kepentingan ini meliputi seluruh penduduk yang tinggal di daerah, termasuk warga perorangan, kelompok masyarakat, organisasi non-pemerintah (LSM), dan komunitas lokal. Sasaran layanan untuk masyarakat luas mencakup penyediaan informasi, edukasi, sosialisasi, fasilitas dan partisipasi aktif dalam pengelolaan lingkungan.
- Sektor Usaha: pemangku kepentingan ini meliputi dunia industri dan bisnis lainnya yang beroperasi dalam kelompok sasaran layana untuk sektor usaha meliputi regulasi , pengawasan, insentif dan asilitasi terkait dengan pengawasan lingkungan.
- Pemerintahan: pemangku kepentingan ini meliputi pemerintah daerah, pemerintah pusat dan perangkat daerah terkait. Sasaran layanan untuk pemerintahan meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, koordinasi dan sinkronisasi program lingkungan hidup.

2.1.5 Mitra Perangkat Daearah Dalam Pemberian Pelayanan

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tidak dapat bekerja secara mandiri, melainkan perlu menjalin kolaborasi dengan berbagai perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait. Kemitraan ini penting untuk mendukung efektivitas pelayanan, memperkuat koordinasi, serta memastikan bahwa kebijakan lingkungan hidup sejalan dengan program pembangunan daerah.

Mitra perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung tugas dan fungsi DLH antara lain:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)
   - Sebagai mitra utama dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, termasuk integrasi isu lingkungan hidup ke dalam RPJMD, RKPD, serta pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan.
2. Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah.
   - Berperan dalam pengelolaan kawasan hutan, tata kelola lahan, serta pengendalian alih fungsi lahan yang berdampak pada kualitas lingkungan, tutupan hutan, dan ekosistem gambut.
   - Berperan dalam pengelolaan bidang tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan;

3. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
   - Menjadi mitra dalam pengawasan kegiatan pertambangan, reklamasi pasca tambang, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas eksploitasi sumber daya alam.
4. Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
   - Mendukung dalam pengelolaan perumusan, perizinan dan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
   - Mendukung pengelolaan tata ruang, infrastruktur pengendalian banjir, serta penyusunan rencana tata ruang yang berwawasan lingkungan dan berorientasi pada daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup.
6. Dinas Kesehatan
   - Menjadi mitra dalam pengelolaan limbah medis dan B3, termasuk peningkatan kapasitas fasilitas pemusnahan limbah yang terbatas di Kalimantan Tengah.
7. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
   - Bermitra dalam penanganan bencana lingkungan akibat perubahan hidrometeorologi, seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor.
8. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan
   - Berperan dalam penegakan hukum daerah terkait ketertiban lingkungan, serta mendukung pengendalian emisi kendaraan bermotor yang memengaruhi kualitas udara.
9. Dinas Pendidikan
   - Mendukung program pendidikan lingkungan hidup, pengembangan sekolah adiwiyata, serta peningkatan kesadaran pelajar dan masyarakat dalam pelestarian lingkungan.

Selain perangkat daerah tersebut, DLH juga bermitra dengan lembaga non-pemerintah (LSM) baik lokal maupun internasional seperti WWF, BOSF, Lestari, dan *Borneo Nature Foundation*. Kemitraan ini penting untuk memperkuat aspek penegakan hukum, rehabilitasi ekosistem gambut, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, pola kemitraan antara DLH Provinsi Kalimantan Tengah dengan perangkat daerah dan lembaga terkait menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan lingkungan hidup, mendukung capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Tengah pada periode 2025–2029.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029, identifikasi permasalahan dan isu strategis menjadi tahapan yang sangat krusial untuk menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan lingkungan hidup di daerah. Analisis isu strategis dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu analisis

internal yang meninjau efektivitas pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi kelembagaan, serta analisis eksternal yang melihat dinamika lingkungan strategis, termasuk peluang dan ancaman yang mungkin muncul dalam lima tahun mendatang. Melalui pemetaan yang komprehensif, isu-isu strategis yang dirumuskan diharapkan mampu menjawab permasalahan aktual, mengantisipasi tantangan masa depan, serta mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Tengah. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini meliputi:

a. Hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah;
b. Hasil telaahan visi, misi dan program Gubernur Kalimantan Tengah 2025-2029;
c. Hasil telaahan Kementerian/Lembaga.
d. Hasil telaahan RPJMD tahun 2025-2029.

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan peran strategis yang sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah perlu melakukan identifikasi permasalahan lingkungan hidup secara komprehensif sebagai dasar perumusan arah kebijakan pembangunan daerah. Pertumbuhan industri, jasa, dan pemukiman yang berlangsung dengan cepat telah menimbulkan tekanan signifikan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan, khususnya melalui peningkatan pembuangan limbah ke media air, tanah, dan udara. Selain itu, alih fungsi lahan yang tidak memperhatikan keseimbangan ekologis berimplikasi pada degradasi ekosistem hutan dan lahan. Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis dalam pengawasan, pengendalian pencemaran, serta penegakan hukum lingkungan, yang membutuhkan penguatan melalui pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kapasitas berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan tersebut, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DLH Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penaatan hukum, serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup ditujukan untuk menjawab isu-isu krusial sekaligus mendukung terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan di wilayah Kalimantan Tengah. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diatas ditujukan untuk menjawab berbagai permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain:

1. Penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
2. Belum tersusunnya dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan rencana perlindungan dan pengelolaan dibidang pengendalian pencemaran lingkungan;
3. Masih rendahnya peran serta masyarakat dan masyarakat adat dala perlindungan pengelolaan lingkungan hidup;
4. Peningkatan sampah dan limbah B3; dan
5. Rendahnya ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Tabel 2.10 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1. Sungai akibat pencemaran dari usaha/dan atau kegiatan serta erosi 2. Penurunan kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan 3. Penurunan tutupan hutan	1. Belum terkelolanya limbah domestik dari pemukiman 2. Tingginya tingkat erosi pada akibat meningkatnya lahan terbuka 3. Kerusakan lahan gambut sehingga sangat rentan terjadinya kebakaran
2.	Belum Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Terbitnya PP 22/2021 adanya kewajiban penyusunan RPPMA, RPPMU dan RPPML dan diintegrasikan dalam RPPLH 2. Data untuk penyusunan penyusunan RPPMA, RPPMU masih minim 4. Tidak adanya anggaran yang memadai untuk penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	1. Minimnya anggaran untuk penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup
3.	Rendahnya peran serta masyarakat dan masyarakat adat dalam perlindungan pengelolaann lingkungan hidup	1. Belum maksimalnya pelibatan masyarakat dan masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan hidup 2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	1. Rendahnya pelibatan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
4.	Peningkatan Sampah dan Limbah B3	1. Pertumbuhan penduduk sehingga mengakibatkan peningkatan volume sampah 2. Rendahnya kesadaran masyarakat melakukan 3R 3. Minimnya sarana pemusnahan limbah B3 di Provinsi Kalimantan Tengah	1. Kurangnya program 3R untuk sampah domestik dan tidak tersedinya sarana pemusnahan limbah B3 di Provinsi Kalimantan Tengah
5.	Rendahnya ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup	1. Kurangnya pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki persetujuan lingkungan/izin lingkungan 2. Minimnya dana pengawasan dibandingkan dengan jumlah usaha dan/atau kegiatan yang wajib diawasi 3. Masih kurangnya usaha dan/atau kegiatan ikut dalam program PROPER 4. Minimnya SDM khususnya jabatan fungsional PPL	1. Kurang maksimalnya pelaksanaan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan dan belum banyak yang ikut dalam program PROPER

2.2.1.1 Telaah Visi Misi Gubernur Kalimantan Tengah 2025-2026

Analisis terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah perlu dikaitkan dengan arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Telaahan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan DLH memiliki relevansi langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan sasaran pembangunan berkelanjutan. Visi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029 sebagaimana tercantum dalam RPJMD adalah:

"Mengangkat Harkat Martabat Dayak Khususnya, Umumnya Masyarakat Kalimantan Tengah (Manggatang Utus), dengan Spirit Kearifan Lokal dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, Kalteng Bermartabat Untuk Menyambut Indonesia Emas 2045".

Visi tersebut dijabarkan sebagai harkat dan martabat masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk masyarakat Dayak menjadi sebuah keharusan yang perlu diangkat oleh pemerintah daerah. Kondisi ini diartikan secara luas dengan tidak hanya mengangkat harkat martabat, adat istiadat, dan seni budaya warisan leluhur saja, tetapi termasuk mengangkat kualitas hidup masyarakat secara multidimensional, seperti dalam aspek sosial dan ekonomi lainnya. Upaya untuk mencapai hal tersebut perlu dilingkupi dengan spirit kearifan lokal masyarakat dan bingkai sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan penting dari mengangkat harkat martabat ini adalah menuju Kalimantan Tengah yang berkah, maju, dan bermartabat dalam rangka menyambut Indonesia Emas 2045. Visi ini dijiwai dengan spirit Isen Mulang dan Huma Betang, Penyangku. Berikut pokok-pokok visi pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 11. Penjelasan Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029

No.	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
1.	Kalteng Berkah	Kata Berkah sendiri merupakan akronim dari Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis yang menjadi visi pembangunan pada periode sebelumnya. Akronim ini menjadi tetap relevan untuk dibawa pada periode pembangunan selanjutnya untuk menunjukkan adanya kesinambungan pembangunan antar periode di Provinsi Kalimantan Tengah.
2.	Kalteng Maju	Kata Maju mengindikasikan upaya menuju Provinsi Kalimantan Tengah yang meningkat kualitas sumber daya manusianya, berkembang

No.	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
		perekonomiannya, dan mampu bersaing dengan daerah lainnya.
3.	Kalteng Bermartabat	Kata Bermartabat menunjukkan adanya peningkatan pada aspek sosial dan budaya masyarakat. Hal ini kemudian mampu meningkatkan martabat masyarakat yang dicirikan dari kearifan lokal, kehidupan yang harmonis dan berdampingan tanpa adanya konflik, dan teguh dalam mempertahankan adat istiadat serta kebudayaan yang berasal dari leluhur.

Sejalan dengan visi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029, misi pembangunan daerah dirumuskan sebagai pedoman operasional bagi perangkat daerah. Bagi Dinas Lingkungan Hidup, misi yang memiliki korelasi kuat adalah misi yang menekankan pentingnya pembangunan berwawasan lingkungan, perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, serta penguatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menekankan prinsip keberlanjutan, keterpaduan, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi pembangunan yang ditetapkan dalam periode 2025–2029, ditempuh melalui lima Misi pembangunan daerah sebagai berikut :

MISI I	**Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber daya alam lokal**

Adapun Misi I tersebut memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan:

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan stabilitas ekonomi dalam mendukung pembangunan;
2. Mewujudkan pemanfaatan sumber daya lokal berbasis hilirisasi berlandaskan prinsip ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat.

Sasaran:

1. Meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah menuju kemandirian fiskal daerah;
2. Menguatnya stabilitas ekonomi daerah dan integrasi ekonomi.
3. Terwujudnya pengembangan produk dan industri unggulan daerah melalui hilirisasi berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru;
4. Meningkatnya kapasitas desa melalui pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa;

5. Tercapainya perluasan jangkauan perlindungan ekonomi untuk kemandirian masyarakat.

MISI II	**Meningkatkan pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah Belom Bahadat**

Adapun Misi II tersebut memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing melalui pendidikan berkualitas yang inklusif, berkarakter Belom Bahadat, mudah diakses, dan terjangkau.

Sasaran:

1. Terwujudnya akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat;
2. Meningkatnya kualitas pendidikan melalui inovasi pembelajaran berbasis digitalisasi dan penguatan kurikulum berbasis budaya Dayak;
3. Terwujudnya perluasan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang layak, memadai dan terjangkau;
4. Meningkatnya kesejahteraan dan kompetensi tenaga pendidik dan adaptif terhadap perkembangan IPTEK;
5. Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung Transformasi Ekonomi.

MISI III	**Membangun infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan**

Adapun Misi III tersebut memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan:

1. Mewujudkan pemerataan pembangunan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur dasar serta infrastruktur pendukung transformasi ekonomi;
2. Meningkatkan ketahanan ekologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sasaran:

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah yang layak huni/berkelanjutan/dan inklusif;
2. Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur sumber daya air;
3. Berkembangnya konektivitas wilayah melalui peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur transportasi serta infrastruktur digital;
4. Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur sanitasi dan air minum;
5. Berkembangnya kualitas dan kapasitas infrastruktur energi yang berkelanjutan;

6. Tercapainya pengurangan kejadian degradasi lingkungan dan peningkatan nilai ekonomi karbon;
7. Meningkatnya ketahanan dan kemandirian pangan;
8. Berkurangnya risiko bencana melalui peningkatan ketangguhan dan mitigasi bencana.

MISI IV	**Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan sosial**

Adapun Misi IV tersebut memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan:

1. Mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkualitas, inklusif, mudah diakses, dan terjangkau bagi masyarakat di seluruh wilayah.

Sasaran:

1. Meningkatnya jumlah dan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan;
2. Terwujudnya perluasan layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat melalui penguatan sistem rujukan dan optimalisasi teknologi kesehatan;

MISI V	**Memberdayakan kearifan lokal dalam kebijakan dan program untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045**

Adapun Misi V tersebut memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan:

1. Meningkatkan kemajuan dan kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap kebudayaan lokal pada berbagai aspek kehidupan guna mendukung kesejahteraan sosial;
2. Mewujudkan penguatan kelembagaan dan pelibatan masyarakat lokal dalam kehidupan sosial dan tata kelola pemerintahan;
3. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel berbasis inovasi dan digitalisasi.

Sasaran:

1. Terwujudnya penguatan nilai-nilai budaya Dayak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemerintahan;
2. Memperluas jangkauan perlindungan sosial adaptif;
3. Meningkatnya kualitas perencanaan berbasis data dan peningkatan kapasitas serta kualitas SDM aparatur pemerintahan;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi digital yang berbasis elektronik.

Berdasarkan relevansi dan korelasi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, kontribusi strategis DLH tercermin pada **Misi I**, yaitu *"Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber daya alam lokal"*, dan **Misi III**, yaitu *"Membangun infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan"*. Kedua misi ini memberikan ruang bagi DLH untuk menjalankan perannya dalam memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui pendekatan ekonomi hijau dan biru, sekaligus menjaga ketahanan ekologi melalui pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan.

Secara lebih spesifik, implementasi kedua misi tersebut diwujudkan dalam tujuan dan sasaran strategis DLH, yaitu:

1. Mewujudkan pemanfaatan sumber daya lokal berbasis hilirisasi berlandaskan prinsip ekonomi hijau dan ekonomi biru dengan sasaran terwujudnya pengembangan produk dan industri unggulan daerah melalui hilirisasi berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru;
2. Meningkatkan ketahanan ekologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan sasaran tercapainya pengurangan kejadian degradasi lingkungan dan peningkatan nilai ekonomi karbon.

Tabel 2. 12. Telaah Visi dan Misi dan Program Gubernur Kalimantan Tengah 2025-2029

No.	Visi/Misi/Program Kerja Gubernur Kalimantan Tengah	Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1.	MISI I: Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber daya alam lokal	▪ Tugas Pokok: - Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan; - Pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); - Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; - Penaatan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. ▪ Fungsi: - Perumusan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; - Perencanaan program di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta	Belum meratanya pengelolaan sampah yang baik.	▪ Faktor Penghambat: - Capaian timbulan sampah terkelola masih rendah di kabupaten/kota; - Sampah Rumah Tangga belum terkelola dengan baik; - Keterbatasan Infrastruktur dan Sarana, seperti TPS3R dan TPA yang belum merata serta armada pengangkut sampah yang terbatas sehingga cakupan layanan masih rendah; - Kapasitas SDM Terbatas, ditandai dengan kurangnya tenaga teknis berkompetensi serta aparatur desa/kelurahan yang belum terlatih dalam pengelolaan bank sampah maupun TPS3R; - Keterbatasan Anggaran, dimana alokasi dana pengelolaan sampah masih rendah sehingga pembangunan fasilitas pengolahan modern terhambat; - Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Rendah, ditunjukkan dengan masih maraknya perilaku membuang sampah sembarangan dan minimnya pemahaman pemilahan maupun pengurangan sampah; - Kelemahan Regulasi dan Penegakan Hukum, berupa implementasi kebijakan seperti larangan plastik sekali pakai yang belum optimal serta lemahnya pengawasan dan pemberian sanksi. ▪ Faktor Pendorong: - UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; - Dukungan Kebijakan Nasional dan Daerah, melalui target nasional pengurangan sampah 30% dan
2.	MISI III: Membangun infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan			

No.	Visi/Misi/Program Kerja Gubernur Kalimantan Tengah	Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
		Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; - Pengoordinasian di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; - Pelaksanaan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan - Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup		sampah plastik 70% pada 2025 serta visi Kalteng Berkah yang menekankan pembangunan berwawasan lingkungan; - Potensi Ekonomi dari Sampah, dengan peluang pengolahan menjadi produk bernilai seperti kompos, daur ulang, dan RDF yang sekaligus membuka lapangan kerja baru; - Peran Masyarakat dan Komunitas, melalui inisiatif bank sampah dan gerakan peduli lingkungan berbasis masyarakat yang mulai berkembang di berbagai daerah; - Perkembangan Teknologi, berupa inovasi pengolahan sampah modern seperti RDF, komposting, dan sistem digitalisasi manajemen sampah yang dapat diterapkan secara bertahap; - Kerja Sama dan Dukungan Pihak Ketiga, baik dari swasta, LSM, dunia usaha, maupun pemerintah pusat dan lembaga donor yang memberikan pendanaan, inovasi, serta penguatan kapasitas daerah.
			Fluktuasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).	▪ Faktor Penghambat: - Degradasi Lingkungan Akibat Aktivitas Ekonomi, seperti pertambangan, perkebunan, dan pertanian skala besar yang meningkatkan pencemaran udara, air, dan tanah; - Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang berulang, terutama di lahan gambut, sehingga menurunkan kualitas udara dan memperburuk indeks lingkungan; - Pengelolaan Sampah dan Limbah yang Belum Optimal, baik limbah domestik, industri, maupun pertambangan yang masih banyak mencemari sungai dan tanah;

No.	Visi/Misi/Program Kerja Gubernur Kalimantan Tengah	Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
				- Keterbatasan Data dan Sistem Monitoring, sehingga pemantauan kualitas air, udara, dan tutupan lahan belum terintegrasi secara real-time dan menyulitkan evaluasi yang akurat; - Keterbatasan Kapasitas SDM dan Anggaran, yang menghambat program pengendalian pencemaran, pemulihan lingkungan, serta pengembangan teknologi ramah lingkungan. ▪ Faktor Pendorong: - Komitmen Kebijakan Nasional dan Daerah, melalui amanat RPJMN dan Peraturan Menteri LHK terkait IKLH sebagai instrumen evaluasi kinerja lingkungan hidup; - Dukungan Program Rehabilitasi dan Restorasi Ekosistem, termasuk program rehabilitasi hutan, restorasi lahan gambut, dan pengendalian karhutla yang dapat meningkatkan daya dukung ekologi; - Inovasi Teknologi Lingkungan, seperti sistem pemantauan kualitas udara (Air Quality Monitoring System) dan digitalisasi data lingkungan yang dapat memperkuat akurasi IKLH.; - Kolaborasi Multi-Pihak, baik pemerintah, masyarakat, akademisi, swasta, maupun lembaga internasional dalam upaya pengendalian pencemaran dan pemulihan lingkungan; - Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Publik, melalui gerakan peduli lingkungan, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, dan edukasi yang mendorong perbaikan kualitas ekosistem secara berkelanjutan.

No.	Visi/Misi/Program Kerja Gubernur Kalimantan Tengah	Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
			Rendahnya pemanfaatan Nilai Ekonomi dari Hutan	▪ Faktor Penghambat: - Keterbatasan Akses dan Biaya Eksplorasi, di mana masyarakat, khususnya Masyarakat Hukum Adat (MHA), kesulitan mengakses potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK) akibat mahalnya biaya eksplorasi serta minimnya dukungan teknis; - Kapasitas Teknis Terbatas, baik pemerintah daerah maupun masyarakat belum optimal dalam melakukan perhitungan nilai ekonomi hutan, pemetaan potensi HHBK, maupun pengembangan jasa lingkungan; - Belum Optimalnya Regulasi dan Skema Insentif, karena masih minim regulasi yang mendorong pemanfaatan hutan secara lestari dan memberikan perlindungan atas hak MHA; - Minimnya Inovasi dan Teknologi Pengolahan, sehingga pemanfaatan hasil hutan lebih banyak masih dalam bentuk bahan mentah tanpa nilai tambah melalui hilirisasi; - Kurangnya Akses Pasar dan Investasi, ditunjukkan dengan rendahnya keterhubungan antara produk berbasis hutan dengan pasar yang lebih luas serta minim investasi sektor kehutanan berkelanjutan. ▪ Faktor Pendorong: - Dukungan Regulasi Nasional, seperti program perhutanan sosial, kebijakan REDD+, serta insentif ekonomi hijau yang memberikan peluang pengembangan nilai ekonomi hutan; - Potensi Hutan yang Besar, Kalimantan Tengah memiliki keragaman hayati dan hasil hutan bukan kayu yang dapat dikembangkan, termasuk ekowisata, jasa lingkungan, dan perdagangan karbon;

No.	Visi/Misi/Program Kerja Gubernur Kalimantan Tengah	Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
				- Peran dan Kearifan Lokal MHA, dengan kearifan tradisional dalam menjaga hutan, masyarakat adat berpotensi besar menjadi aktor utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan berkelanjutan; - Perkembangan Teknologi dan Pasar Global, meningkatnya permintaan pasar terhadap produk ramah lingkungan dan berkelanjutan, termasuk karbon kredit dan produk berbasis ekonomi hijau; - Peluang Kerja Sama Multistakeholder, baik dengan pemerintah pusat, dunia usaha, LSM, maupun lembaga internasional yang dapat mendukung investasi, transfer teknologi, serta peningkatan kapasitas masyarakat.
			Optimalisasi konservasi lahan Gambut	▪ Faktor Penghambat: - Tingkat Kerusakan Gambut yang Tinggi, akibat praktik pembakaran lahan, drainase berlebihan, serta konversi lahan gambut menjadi perkebunan dan pertanian yang tidak ramah lingkungan; - Pengawasan dan Penegakan Hukum Lemah, terlihat dari masih maraknya aktivitas pembukaan lahan secara ilegal, termasuk praktik pembakaran yang berulang setiap tahun; - Keterbatasan Teknologi Ramah Gambut, baik dalam pengelolaan pertanian maupun perkebunan berkelanjutan di kawasan gambut, sehingga praktik yang dijalankan seringkali merusak ekosistem; - Kurangnya Kapasitas SDM dan Kelembagaan, baik di tingkat pemerintah daerah maupun masyarakat, dalam memahami pentingnya konservasi gambut serta teknik restorasi yang efektif; - Minimnya Dukungan Investasi Berkelanjutan, termasuk rendahnya alokasi anggaran dan insentif

No.	Visi/Misi/Program Kerja Gubernur Kalimantan Tengah	Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
				untuk mendorong pemanfaatan lahan gambut secara lestari. ▪ Faktor Pendorong: - Dukungan Kebijakan Nasional dan Global, seperti Strategi Nasional Restorasi Gambut, komitmen pengurangan emisi karbon, serta perjanjian internasional terkait perubahan iklim; - Potensi Ekonomi Berbasis Ekosistem Gambut, antara lain melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, ekowisata, dan perdagangan karbon; - Perkembangan Teknologi Restorasi dan Pertanian Ramah Lingkungan, seperti teknik pembasahan kembali (rewetting), agroforestry berbasis gambut, dan pemanfaatan paludikultur; - Keterlibatan Multistakeholder, mulai dari pemerintah pusat, lembaga internasional, dunia usaha, LSM, hingga komunitas lokal, dalam program konservasi dan restorasi gambut; - Peran dan Kearifan Lokal Masyarakat, khususnya masyarakat adat dan lokal yang memiliki praktik tradisional dalam menjaga keseimbangan ekosistem gambut.

2.2.1.2 Telaah Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

Rancangan Awal Renstra Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH 2025–2029 menetapkan Asta Cita sebagai arah pembangunan nasional yang perlu dijabarkan hingga ke level daerah. Terdapat tiga Asta Cita yang memiliki keterkaitan erat dengan sektor lingkungan hidup dan menjadi dasar strategis penyusunan Renstra DLH Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu Asta Cita 2, Asta Cita 5, dan Asta Cita 8. Asta Cita 2 menekankan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan air serta penguatan ekonomi hijau dan ekonomi biru. Hal ini berimplikasi pada kebutuhan peningkatan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, pemulihan ekosistem gambut dan perairan darat, serta penguatan upaya pengendalian perubahan iklim. Asta Cita 5 menekankan pada hilirisasi dan pembangunan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Hal ini menuntut adanya kepastian pengendalian pencemaran, pengawasan terhadap industri, serta penerapan standar lingkungan yang ketat agar hilirisasi tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Sementara itu, Asta Cita 8 menegaskan pentingnya kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, termasuk peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati, serta pengendalian degradasi ekosistem.

Untuk mendukung perwujudan ketiga Asta Cita tersebut, ditetapkan tiga program prioritas nasional, yaitu: Program Prioritas 1 (mencapai swasembada pangan, energi, dan air), Program Prioritas 11 (menjamin pelestarian lingkungan hidup), dan Program Prioritas 15 (melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam). Program-program prioritas ini menjadi pijakan penting bagi daerah dalam merumuskan arah kebijakan pengelolaan lingkungan, termasuk pengendalian pencemaran, pemulihan ekosistem gambut, pengelolaan limbah, serta peningkatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.

Lebih lanjut, Renstra KLH/BPLH juga menetapkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang relevan untuk diturunkan dalam Renstra DLH Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya PHTC 1, 2, 3, 4, dan 7. PHTC 1 dan 2 berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui pangan sehat dan layanan kesehatan, yang tidak terlepas dari lingkungan yang bersih dan sehat. PHTC 3 menekankan pada peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui lumbung pangan desa dan daerah, yang membutuhkan dukungan pengelolaan lahan berkelanjutan dan perlindungan sumber daya air. PHTC 4 mendorong pembangunan sekolah unggul terintegrasi yang juga harus didukung dengan pendidikan lingkungan hidup. Sementara itu, PHTC 7 menekankan pada pembangunan infrastruktur desa dan penyediaan rumah layak dengan sanitasi yang baik, yang memerlukan pengendalian limbah serta ketersediaan lingkungan permukiman yang sehat.

Dengan mengacu pada ketiga Asta Cita, tiga Program Prioritas, serta lima PHTC tersebut, maka penyusunan Renstra DLH Provinsi Kalimantan Tengah 2025–2029 diarahkan untuk mendukung tercapainya sasaran nasional melalui kebijakan daerah yang fokus pada pengelolaan lingkungan berkelanjutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan, pemulihan ekosistem gambut dan perairan darat, penguatan peran lingkungan dalam swasembada pangan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui lingkungan yang sehat dan lestari.

Tabel 2. 93. Telaah Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan DLH Ditinjau dari Renstra Kemeterian Lingkungan Hidup 2025-2029

Arah Nasional	Isi Pokok	Implikasi ke DLH Prov. Kalteng	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Asta Cita 2	Swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau dan biru	- Pengelolaan SDA berkelanjutan; - Pemulihan gambut & perairan darat; - Mitigasi & adaptasi iklim	- Dukungan kebijakan nasional net-zero emission; - Ketersediaan dana iklim (carbon fund); - Tingginya kepedulian global pada gambut	- Lemahnya kapasitas teknis daerah; - Terbatasnya data neraca SDA; - Masih rendahnya koordinasi antar sektor
Asta Cita 5	Hilirisasi & industri berbasis SDA	- Pengawasan pencemaran dan limbah industri; - Standar lingkungan dalam industri; - Penegakan hukum	- Dorongan nasional hilirisasi SDA; - Potensi investasi industri hijau; - Dukungan regulasi perizinan berbasis lingkungan	- Celah penyimpangan pascatambang; - Lemahnya pengawasan daerah; - Rendahnya kepatuhan industri
Asta Cita 8	Harmoni lingkungan, alam, budaya	- Konservasi keanekaragaman hayati; - Pengendalian degradasi ekosistem; - Peningkatan kualitas lingkungan hidup	- Kearifan lokal Masyarakat Adat; - Tingginya biodiversitas Kalteng; - Dukungan NGO dan lembaga riset.	- Lemahnya perlindungan hak MHA; - Keterbatasan skema pendanaan kehati; - Degradasi hutan & lahan berlanjut
Program Prioritas 1	Swasembada pangan, energi, air	- Pengelolaan lahan berkelanjutan; - Menjaga kualitas air dan perairan darat	- Dukungan nasional ketahanan pangan; - Program restorasi gambut; - Kolaborasi dengan sektor pertanian	- Konversi lahan pangan sawit/tambang; - Degradasi tanah gambut; - Kelembagaan pengelola lahan lemah

Arah Nasional	Isi Pokok	Implikasi ke DLH Prov. Kalteng	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Program Prioritas 11	Pelestarian lingkungan hidup	- Sarpras persampahan; - Pengendalian pencemaran; - Penegakan hukum lingkungan	- Dukungan target IKLH nasional; - Ketersediaan teknologi persampahan; - Dukungan SDGs	- Rendahnya pengelolaan sampah daerah; - Partisipasi masyarakat rendah; - Terbatasnya APBD lingkungan
Program Prioritas 15	Hilirisasi SDA	- Pengawasan pertambangan; - Integrasi lingkungan dalam industri	- Regulasi hilirisasi SDA nasional; - Potensi PNBP dari lingkungan	- Celah regulasi pascatambang; - Lemahnya penegakan hukum
PHTC 1	Pangan bergizi sehat	- Lingkungan sehat untuk pangan aman	- Program nasional gizi & kesehatan	- Lingkungan tercemar (air, tanah)
PHTC 2	Layanan kesehatan	- Pengendalian pencemaran untuk kesehatan lingkungan	- Dukungan sektor kesehatan	- Masih lemahnya sanitasi lingkungan
PHTC 3	Produktivitas lahan pertanian	- Pengelolaan lahan & air berkelanjutan; - Perlindungan gambut	- Lumbung pangan desa/nasional; - Program lahan subur berkelanjutan	- Alih fungsi lahan perkebunan/tambang; - Biaya tinggi restorasi gambut
PHTC 4	Sekolah unggul terintegrasi	- Pendidikan lingkungan di sekolah	- Dukungan pendidikan nasional; - Potensi sekolah model hijau	- Belum terintegrasi kurikulum lingkungan
PHTC 7	Infrastruktur desa, rumah layak sanitasi	- Pengelolaan limbah domestik; - Permukiman sehat berkelanjutan	- Dukungan pembangunan desa; - Program sanitasi nasional	- Rendahnya kapasitas pengelolaan limbah; - Infrastruktur dasar belum merata

2.2.1.3 Telaah RPJMD Kalimantan Tengah 2025-2026

Berdasarkan telaah terhadap RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah serta dokumen perencanaan nasional di bidang lingkungan hidup, terdapat sejumlah persoalan strategis yang menjadi tantangan utama bagi Dinas Lingkungan Hidup. Permasalahan tersebut meliputi belum meratanya pengelolaan sampah di kabupaten/kota akibat keterbatasan infrastruktur TPA/TPST, rendahnya partisipasi masyarakat, dan minimnya integrasi pengelolaan limbah, yang berdampak pada meningkatnya pencemaran di kawasan perkotaan. Selain itu, kerusakan dan kebakaran lahan gambut masih sering terjadi akibat praktik pembukaan lahan dengan cara membakar dan lemahnya pengawasan, sementara upaya restorasi gambut berjalan belum optimal. Pencemaran sungai juga masih tinggi karena pengelolaan limbah rumah tangga, industri, dan pertambangan belum terintegrasi dengan baik, diperparah dengan lemahnya penegakan hukum lingkungan.

Di sisi lain, pengelolaan pascatambang belum berjalan efektif meskipun regulasi telah tersedia, karena fungsi pengawasan masih lemah dan terdapat celah penyimpangan kewajiban perusahaan. Perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam pengelolaan hutan juga belum optimal akibat belum kuatnya regulasi, tingginya biaya pemanfaatan hutan, serta terbatasnya dukungan teknis. Permasalahan semakin kompleks dengan keterbatasan kapasitas teknis pemerintah daerah dalam pemetaan serta penyusunan neraca sumber daya alam, sehingga perencanaan dan kebijakan lingkungan belum sepenuhnya berbasis data yang akurat. Dengan demikian, penyusunan Renstra DLH Provinsi Kalimantan Tengah 2025–2029 perlu menjadikan isu-isu strategis tersebut sebagai dasar utama perumusan arah kebijakan dan program prioritas guna mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan mendukung tujuan pembangunan daerah.

Tabel 2. 104. Telaah Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan DLH Ditinjau dari RPJMD 2025-2029

Masalah Pokok	Sasaran DLH 2025–2029	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Belum meratanya pengelolaan sampah dan limbah	Meningkatnya cakupan layanan pengelolaan sampah & limbah secara terpadu di seluruh kabupaten/kota	- Dukungan program nasional ekonomi sirkular; - Adanya teknologi pengolahan sampah (TPA modern, RDF, bank sampah); - Tingginya perhatian publik pada isu sampah	- Keterbatasan TPA/TPST; - Rendahnya partisipasi masyarakat; - Terbatasnya anggaran daerah
Tingginya risiko kerusakan & kebakaran lahan gambut	Menurunnya luas kebakaran hutan & lahan gambut serta meningkatnya capaian restorasi gambut	- Dukungan program restorasi gambut nasional; - Tersedianya teknologi monitoring kebakaran (satellite, early warning)- Dukungan NGO/CSO dalam restorasi	- Praktik pembakaran untuk membuka lahan; - Lemahnya pengawasan lapangan; - Biaya restorasi gambut tinggi
Tingginya pencemaran sungai	Meningkatnya kualitas air sungai dan menurunnya beban pencemaran	- Regulasi pengendalian limbah B3 & non B3; - Dukungan program nasional pemulihan DAS; - Potensi kerja sama dengan perusahaan/CSR	- Lemahnya penegakan hukum; - Belum terintegrasinya pengelolaan limbah rumah tangga, industri, dan tambang; - Kurangnya sarana IPAL komunal
Belum optimalnya pengelolaan pascatambang	Meningkatnya kepatuhan perusahaan tambang dalam reklamasi & pascatambang	- Adanya perda pascatambang (No. 15/2012); - Potensi pendapatan dari jaminan reklamasi	- Celah regulasi dimanfaatkan perusahaan; - Lemahnya Tim Pengawas Pascatambang; - Kurangnya koordinasi lintas sektor
Lemahnya perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA)	Meningkatnya peran MHA dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan	- Dukungan masyarakat adat dan kearifan lokal; - Agenda nasional penguatan peran MHA; - Dukungan LSM lingkungan	- Belum kuatnya regulasi perlindungan hak MHA; - Tingginya biaya pemanfaatan hutan oleh MHA;

Masalah Pokok	Sasaran DLH 2025–2029	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
			- Minimnya dukungan teknis & akses pendanaan
Keterbatasan teknis pemetaan SDA	Tersedianya sistem neraca SDA dan pemetaan potensi SDA daerah	- Kebijakan nasional neraca SDA; - Dukungan pusat data dan teknologi lingkungan; - Dukungan lembaga riset dan perguruan tinggi	- Terbatasnya SDM teknis daerah; - Belum adanya sistem data terpadu; - Keterbatasan anggaran untuk survei lapangan

2.2.2 Penentuan Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis merupakan tahapan penting dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup (Renstra DLH) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025–2029. Isu-isu strategis akan sangat menentukan arah dan kinerja pembangunan lingkungan hidup dalam lima tahun mendatang, sehingga analisis yang tepat menjadi kunci keberhasilan perencanaan. Identifikasi isu yang relevan, bersifat mendesak, dan memiliki dampak luas akan memperkuat ketepatan penentuan prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian, arah kebijakan yang ditetapkan tidak hanya dapat dioperasionalkan secara efektif, tetapi juga memiliki legitimasi moral serta etika birokrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan kajian terhadap kondisi pengelolaan lingkungan hidup, potensi sumber daya alam, serta berbagai tantangan yang dihadapi, dapat dirumuskan lima isu pokok yang wajib menjadi perhatian bersama dalam periode perencanaan mendatang.

Berdasarkan uraian diatas isu-isu strategis di Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup adalah:

1. Pengelolaan sampah yang belum optimal.

   Produksi sampah di Kalimantan Tengah terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan aktivitas ekonomi. Volume timbulan sampah diperkirakan mencapai 3.000–3.500 ton/hari (proyeksi KLHK berdasarkan timbulan nasional 0,7 kg/kapita/hari). Namun, tingkat pengelolaan baru sekitar 55–60%, dengan dominasi metode open dumping di TPA. Berdasarkan SIPSN-KLHK 2023, capaian pengurangan sampah nasional baru 16,9% dan penanganan 37,5%, masih jauh dari target nasional 30% pengurangan dan 70% penanganan pada 2025. Rendahnya fasilitas reduce-reuse-recycle (3R), keterbatasan bank sampah, serta rendahnya partisipasi masyarakat menghambat tercapainya target persampahan di daerah.

2. Kebakaran lahan gambut dan kekeringan.

   Provinsi Kalimantan Tengah memiliki gambut terluas di Indonesia, sekitar 3,01 juta hektar (KLHK, 2022). Kawasan ini sangat rentan terhadap kebakaran, terutama saat musim kemarau panjang. Pada 2019, luas lahan terbakar di Kalimantan Tengah mencapai 317 ribu hektar (BNPB), menimbulkan kerugian ekologis, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Palangka Raya saat puncak kebakaran sering berada pada kategori berbahaya, dengan konsentrasi PM2.5 melebihi 500 µg/m³. Kekeringan turut memperburuk risiko kebakaran dan mengurangi ketersediaan air bersih, sehingga berdampak pada ketahanan lingkungan dan pangan.

3. Penurunan kualitas air serta banjir akibat eksploitasi daerah tangkapan air.

   Konversi hutan untuk pertambangan, perkebunan, serta infrastruktur telah mengurangi fungsi daerah tangkapan air di Kalimantan Tengah. Terdapat 11 DAS prioritas nasional, termasuk DAS Kahayan, Kapuas, dan Barito, yang mengalami degradasi serius. Data Global Forest Watch menunjukkan tutupan hutan Kalimantan Tengah berkurang sekitar 15%

dalam periode 2000–2020. Banjir besar tahun 2021 melanda 11 kabupaten/kota dengan lebih dari 50 ribu warga terdampak (BPBD Kalteng). Sedimentasi, pencemaran logam berat dari tambang, serta fluktuasi debit sungai mengancam kualitas air bersih, pertanian, dan kesehatan masyarakat.

4. Ancaman krisis sumber daya alam, pencemaran, deforestasi, fragmentasi dan degradasi lingkungan akibat eksploitasi berlebih dan pengelolaan tidak keberkelanjutan.

   Tekanan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berkelanjutan menjadi ancaman nyata. Laju deforestasi Kalimantan Tengah pada 2015–2020 tercatat sekitar 70 ribu hektar per tahun (KLHK, 2021), terutama untuk perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Fragmentasi habitat menyebabkan hilangnya konektivitas ekosistem, sementara pencemaran dari aktivitas industri dan pertambangan memperburuk degradasi lingkungan. Pola pemanfaatan yang tidak terintegrasi berpotensi menimbulkan krisis lingkungan jangka panjang.

5. Pengelolaan limbah industri yang tidak terintegrasi.

   Pertumbuhan industri di Kalimantan Tengah, termasuk pengolahan hasil tambang dan perkebunan, belum diiringi dengan sistem pengelolaan limbah yang memadai. Banyak limbah cair, padat, dan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) belum ditangani sesuai standar. Minimnya fasilitas pengolahan limbah bersama di kawasan industri menimbulkan pencemaran perairan dan tanah. Data KLHK (2022) menunjukkan bahwa lebih dari 40% industri kecil dan menengah di Kalimantan belum memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah).

6. Pengelolaan dan pengawasan keanekaragaman hayati yang belum optimal.

   Kalimantan Tengah merupakan bagian dari Heart of Borneo, kawasan dengan keanekaragaman hayati tingkat tinggi. Namun, upaya pengelolaan biodiversitas masih belum optimal. Perburuan liar, perdagangan satwa dilindungi, dan lemahnya pengawasan di kawasan konservasi mengancam keberlangsungan spesies endemik. Data BKSDA (2023) menunjukkan penurunan populasi orangutan di Kalimantan Tengah hingga 30% dalam dua dekade terakhir akibat hilangnya habitat. Selain pengelolaan yang lemah, kehilangan biodiversitas semakin nyata akibat deforestasi, fragmentasi habitat, dan perubahan iklim. Spesies penting seperti bekantan, enggang gading, dan harimau dahan menghadapi tekanan populasi. Kehilangan biodiversitas berdampak pada stabilitas ekosistem, potensi penelitian farmasi, serta pengembangan bioekonomi di masa depan.

7. Belum optimalnya pengawasan terhadap aktifitas pemanfaatan sumber daya alam untuk lingkungan.

   Kegiatan eksploitasi sumber daya alam baik pertambangan, perkebunan, kehutanan, maupun perikanan seringkali dilakukan dengan praktik kurang ramah lingkungan. Lemahnya pengawasan serta keterbatasan kapasitas aparatur menyebabkan aktivitas pemanfaatan SDA

sering menimbulkan kerusakan lingkungan. Menurut ICW (2022), kasus pelanggaran izin lingkungan di sektor tambang Kalimantan Tengah termasuk 5 besar nasional. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan menjadi keharusan.

8. Minimnya Hilirisasi dan deversifikasi produk turunan Sumber Daya Alam.

   Kalimantan Tengah ditetapkan pemerintah sebagai salah satu wilayah *Food Estate* Nasional serta memiliki peran penting dalam konservasi internasional melalui program *Heart of Borneo*. Selain itu, potensi hilirisasi SDA (seperti CPO, nikel, batubara, dan hasil hutan) menjadi pilar ekonomi baru. Namun, jika tidak dikelola dengan prinsip keberlanjutan, peran strategis ini justru dapat menimbulkan degradasi lingkungan besar-besaran. Oleh karena itu, keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi, konservasi, dan keberlanjutan lingkungan harus dijaga.

Tabel 2. 115. Penentuan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Naisonal	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi ketersediaan air baku yang melimpah	Belum Meratanya Pengelolaan Sampah			Krisis Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan dan Deforestasi	- Pengelolaan Sampah yang belum optimal; - Pengelolaan limbah industri yang tidak terintegrasi.
Nilai IKLH Kalimantan Tengah ada di atas rata-rata nasional	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Masih Belum Optimal	Deforestasi dan Degradasi Hutan di dalam dan di luar Kawasan Hutan	Cuaca Ekstrem			- Penurunan kualitas air serta banjir akibat eksploitasi daerah tangkapan air; - Pengelolaan limbah industri yang tidak terintegrasi.
	Kepatuhan Pelaksanaan Rehabilitasi Pasca Tambang	Kerusakan Habitat (Tempat Hidup Tumbuhan dan Satwa Liar) akibat fragmentasi habitat dan penurunan tutupan lahan	Perubahan kritikal terhadap ekosistem			- Penurunan kualitas air serta banjir akibat eksploitasi daerah tangkapan air; - Kebakaran lahan gambut dan kekeringan. - Ancaman krisis sumber daya alam, pencemaran, deforestasi, fragmentasi dan degradasi lingkungan akibat eksploitasi berlebih dan

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Naisonal	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						pengelolaan tidak keberkelanjutan
	Aktivitas Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit yang Tidak Sesuai dengan Tata Kelola Lahan	Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut	Biodiversity loss dan gangguan ekosistem			- Kebakaran lahan gambut dan kekeringan; - Pengelolaan dan pengawasan keanekaragaman hayati yang belum optimal;
	Optimalisasi Konservasi Lahan Gambut	Banjir, kekeringan, dan longsor akibat degradasi lahan				- Penurunan kualitas air serta banjir akibat eksploitasi daerah tangkapan air; - Pengelolaan dan pengawasan keanekaragaman hayati yang belum optimal.
		Penurunan kualitas air akibat rusaknya fungsi daerah tangkapan air.	Polusi			- Penurunan kualitas air serta banjir akibat eksploitasi daerah tangkapan air;
		Hilangnya Cadangan sumber daya alam akibat hilangnya hutan	Krisis Sumber Daya Alam			- Pengelolaan dan pengawasan keanekaragaman hayati yang belum optimal;

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Naisonal	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah penduduk usia produktif cukup masif	Rendahnya Pemanfaatan Nilai Ekonomi dari Hutan					- Belum optimalnya pengawasan terhadap aktifitas pemanfaatan sumber daya alam untuk lingkungan.
Penetapan Kalimantan Tengah sebagai Proyek Strategis Nasional dalam sentra produksi pangan	Rendahnya Produktivitas dan Peran Sentra Pangan Terpadu dalam Mendukung Kemandirian Pangan			Rendahnya Produktivitas	Kalimantan Tengah sebagai Pusat Pangan Nasional, Pusat Konservasi Internasional, dan Hilirisasi SDA	- Minimnya hilirisasi dan diversifikasi produk turunan SDA; - Belum optimalnya pengawasan terhadap aktifitas pemanfaatan sumber daya alam untuk lingkungan

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Tujuan renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah periode Tahun 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan"

3.2 SASARAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029

Upaya untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah merumuskan sejumlah sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sasaran tersebut disusun sebagai penjabaran operasional dari tujuan strategis, sehingga lebih spesifik, terukur, realistis, serta dapat dicapai dalam jangka menengah. Sasaran yang ingin diapai selama kurun waktu lima (5) tahun mendatang meliputi:

1. Meningkatnya upaya pengendalian dan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
2. Meningkatnya pengelolaan sampah dan Limbah B3;
3. Meningkatnya ketaatan penanggung jawab usaha terhadap perijinan lingkungan dan penyelesaian sengketa/dugaan pidana;
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Keterkaitan antara sasaran RPJMD dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Renstra yang menggambarkan kesinambungan logis antara arah yang ingin dicapai, dapat dilihat pada gambar dan tabel 3.1 di bawah ini.

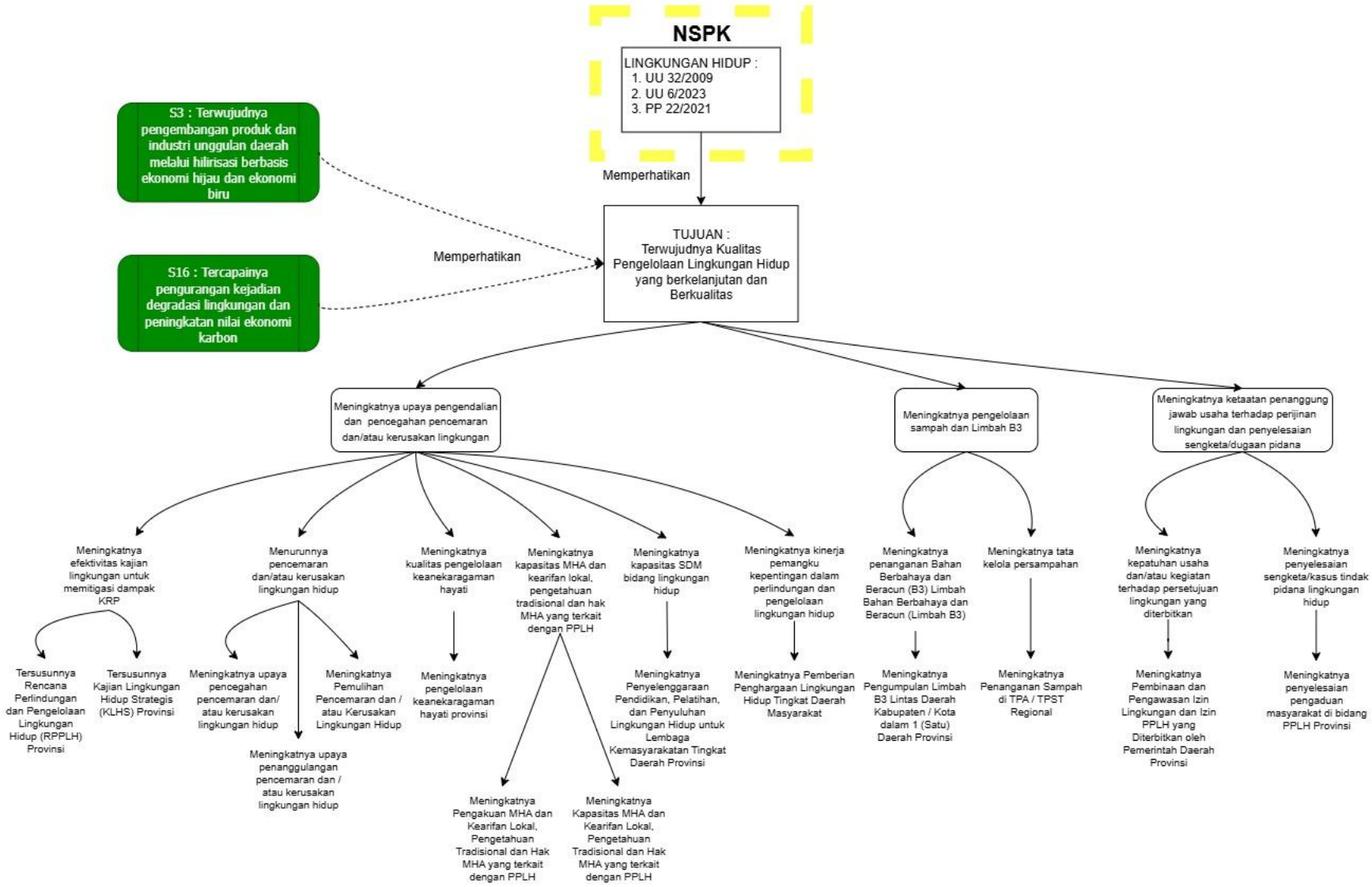

Gambar 3.1 Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

Tabel 3. 1. Telaah antara Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah pelayanan Perangkat Daerah (PD)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup											
- Tercapainya pengurangan kejadian degradasi lingkungan dan peningkatan nilai ekonomi karbon; - Terwujudnya pengembangan produk dan industri unggulan daerah melalui hilirisasi berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru.	Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		Indeks kualitas lingkungan hidup (Angka)	74.80	76.34	76.51	76.68	76.84	77.01	77.18	
		Meningkatnya upaya pengendalian dan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Indeks Kualitas Air (Indeks)	52.13	70.45	70.65	70.85	71.05	71.25	71.45	
			Indeks Kualitas Udara (Indeks)	92.71	78.44	78.64	78.84	79.04	79.24	79.44	
			Indeks Kualitas Lahan (Indeks)	75.38	83.96	84.03	84.1	84.17	84.24	84.31	
		Meningkatnya pengelolaan sampah dan limbah B3	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	99.944	99.946	99.948	99.950	99.952	99.954	99.956	
			Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. (Ton)	29184.81	29300	29420	29540	29660	29780	29900	
		Meningkatnya ketaatan penanggung jawab usaha terhadap perijinan lingkungan dan penyelesaian sengketa/dugaan pidana	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi (%)	12.68	15	17	19	21	23	25	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) (Angka)	69.95	70.20	70.45	70.70	70.95	71.20	71.45	

3.3 STRATEGI PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Strategi merupakan cara atau langkah sistematis yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah, sekaligus menjawab tantangan pembangunan di bidang lingkungan hidup. Strategi ini diwujudkan melalui serangkaian program indikatif yang terarah, terukur, dan berkesinambungan, sehingga dapat mendukung pencapaian visi pembangunan daerah secara menyeluruh. Mengacu pada Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029, serta menyesuaikan dengan tugas dan fungsi yang diemban, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, khususnya pada Misi 1 dan Misi 3.

Dalam kerangka tersebut, strategi Dinas Lingkungan Hidup diarahkan untuk memperkuat upaya pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan, pemulihan ekosistem gambut dan hutan, peningkatan kapasitas pengelolaan sampah dan limbah, serta penegakan hukum lingkungan. Strategi ini juga mencakup penguatan peran masyarakat, termasuk Masyarakat Hukum Adat (MHA), dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemanfaatan data serta teknologi lingkungan hidup. Dengan strategi tersebut, diharapkan tujuan dan sasaran pembangunan lingkungan hidup daerah dapat tercapai secara optimal dalam periode Renstra 2025–2029.

Tabel 3. 2. Perumusan tujuan dan sasaran strategi perangkat daerah.

Sasaran 1	**Meningkatnya upaya pengendalian dan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan**
Strategi	- Program perencanaan lingkungan hidup; - Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup; - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati); - Program pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH; - Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat; - Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat.
Sasaran 2	**Meningkatnya pengelolaan sampah dan Limbah B3**
Strategi	- Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3); - Program pengelolaan persampahan.
Sasaran 3	**Meningkatnya ketaatan penanggung jawab usaha terhadap perijinan lingkungan dan penyelesaian sengketa/dugaan pidana.**
Strategi	- Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH); - Program penanganan pengaduan lingkungan hidup.
Sasaran 4	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah**
Strategi	- Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

Penahapan strategi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026-2030 disusun dengan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD serta menyesuaikan dengan tugas, fungsi, dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup. Penahapan ini dirancang secara bertahap dan berkesinambungan, dimulai dari penguatan fondasi pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, dan peningkatan kapasitas kelembagaan, kemudian dilanjutkan dengan akselerasi inovasi pengelolaan lingkungan, peningkatan kepatuhan penanggung jawab usaha, pemberdayaan masyarakat dan Masyarakat Hukum Adat (MHA), hingga konsolidasi capaian program dan akselerasi ekonomi hijau yang terintegrasi dengan agenda pembangunan rendah karbon. Dengan tahapan tersebut, Renstra DLH 2025–2030 diharapkan mampu menjawab tantangan utama lingkungan hidup di Kalimantan Tengah sekaligus memastikan kontribusi nyata dalam mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Tabel 3. 3. Penahapan Rencana Strategi Perangkat Daerah

Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
Inovasi Pengendalian Pencemaran dan Optimalisasi Pengelolaan Sampah	Peningkatan Kepatuhan Lingkungan dan Tata Kelola Limbah B3	Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan Penguatan Peran Sosial dalam Pengelolaan Lingkungan	Konsolidasi Program Lingkungan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja DLH	Akselerasi Ekonomi Hijau dan Integrasi Menuju Pembangunan Rendah Karbon

1. Inovasi Pengendalian Pencemaran dan Optimalisasi Pengelolaan Sampah

   Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah menekankan strategi pada inovasi pengendalian pencemaran dan peningkatan pengelolaan sampah. Fokus diarahkan pada implementasi program pengendalian pencemaran air, udara, dan tanah, serta penguatan pengelolaan sampah perkotaan melalui model ekonomi sirkular dan pengurangan timbulan sampah dari sumbernya. Pengembangan inovasi teknologi persampahan seperti *waste to energy* dan pemanfaatan limbah organik menjadi kompos diperkuat. Selain itu, penyuluhan lingkungan dan penghargaan lingkungan diperluas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

2. Peningkatan Kepatuhan Lingkungan dan Tata Kelola Limbah B3

   Program strategis difokuskan pada pembinaan dan pengawasan izin lingkungan, serta peningkatan efektivitas penanganan pengaduan masyarakat. Pengelolaan limbah B3 dari sektor industri dan kesehatan diperkuat melalui penyediaan sarana pengolahan serta kerja sama lintas sektor. Penegakan hukum lingkungan ditingkatkan untuk memastikan kepatuhan usaha terhadap izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH). Dengan langkah ini, diharapkan tercipta tata kelola lingkungan yang lebih tertib, transparan, dan berintegritas.

3. Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan Penguatan Peran Sosial dalam Pengelolaan Lingkungan

   Salah satu arah pembangunan Dinas Lingkungan Hidup adalah pemberdayaan MHA dan penguatan peran sosial masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Fokus diarahkan pada pengakuan hak MHA dan kearifan lokal dalam pengelolaan hutan, peningkatan peran masyarakat dalam menjaga keanekaragaman hayati, serta penciptaan aktivitas ekonomi baru berbasis ekologi seperti ekowisata, agroforestri, dan pemanfaatan hasil hutan non-kayu. Pendidikan dan penyuluhan lingkungan diperluas untuk memperkuat modal sosial masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan pemulihan ekosistem.

4. Konsolidasi Program Lingkungan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja DLH

   Fokus pada tahapan ini diarahkan pada evaluasi menyeluruh atas capaian 2025–2028, percepatan program prioritas yang belum optimal, serta peningkatan sistem pemantauan kualitas lingkungan berbasis teknologi digital. Pada tahap ini, DLH juga mengembangkan sistem neraca sumber daya alam sebagai basis data perencanaan, dan memperkuat transparansi serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui program penunjang urusan pemerintahan. Dengan demikian, capaian lingkungan tidak hanya diukur dari output, tetapi juga outcome yang berkelanjutan.

5. Akselerasi Ekonomi Hijau dan Integrasi Menuju Pembangunan Rendah Karbon

   Sebagai tahap akhir siklus, tahun 2030 difokuskan pada akselerasi ekonomi hijau dan integrasi program DLH dengan pembangunan rendah karbon. Fokus diarahkan pada penguatan perdagangan karbon, optimalisasi program penurunan emisi, serta transisi energi bersih berbasis potensi lokal. DLH menyiapkan roadmap jangka panjang menuju Kalimantan Tengah sebagai pusat ekonomi hijau berbasis SDA berkelanjutan. Selain itu, kolaborasi lintas sektor diperkuat dalam pengendalian perubahan iklim, rehabilitasi gambut dan DAS, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung net zero emission. Dengan demikian, DLH berkontribusi signifikan pada target pembangunan berkelanjutan daerah maupun nasional.

3.4 ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029 merupakan rangkaian kerja yang disusun sebagai operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang lingkungan hidup. Arah kebijakan ini dirumuskan dengan memperhatikan tugas dan fungsi perangkat daerah serta sejalan dengan arah kebijakan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga selaras dengan strategi pembangunan daerah dan mampu mendukung pencapaian tujuan serta sasaran Renstra DLH. Secara umum, arah kebijakan DLH difokuskan pada empat pilar utama. Pertama, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, melalui kebijakan penguatan perencanaan lingkungan, pengendalian pencemaran air, udara, tanah, serta pengelolaan keanekaragaman hayati. Kedua, peningkatan pengelolaan sampah dan limbah B3, melalui kebijakan yang mendorong pengurangan, pemanfaatan,

dan penanganan sampah secara terpadu serta pengelolaan limbah B3 yang aman dan berkelanjutan. Ketiga, peningkatan kepatuhan penanggung jawab usaha terhadap perizinan lingkungan dan penyelesaian sengketa lingkungan, dengan mengedepankan kebijakan pembinaan, pengawasan, serta penegakan hukum lingkungan. Keempat, penguatan tata kelola kelembagaan dan akuntabilitas DLH, melalui kebijakan peningkatan kinerja perangkat daerah, pemanfaatan teknologi informasi, serta transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik di bidang lingkungan hidup.

Dengan arah kebijakan tersebut, Renstra DLH 2025–2029 diharapkan mampu menjawab tantangan utama pembangunan lingkungan hidup di Kalimantan Tengah, memperkuat peran masyarakat dan dunia usaha dalam perlindungan serta pengelolaan lingkungan, serta memastikan tercapainya target pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah.

Tabel 3. 4. Teknik merumuskan arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Ket.
1.	Tata Lingkungan (Inventarisasi, RPPLH, KLHS, Kajian Dampak Lingkungan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup)	- Rehabilitasi hutan dan reklamasi tambang serta penghambatan laju deforestasi; - Pelestarian bentang alam; - Perlindungan keanekaragaman hayati; - Penguatan ekosistem dan ekonomi karbon	- Penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup meliputi RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG dan RPPLH - Penetapan Peraturan Daerah tentang RPPLH - Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPPLH - Penyusunan profil dan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati; - Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RIP Kehati - Penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan pada pengelolaan SDA	
2.	Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH (baku mutu lingkungan, pemantauan kualitas, penanggulangan, pemulihan, persetujuan teknis,	- Peningkatan ketahanan ekologi; - Pengendalian degradasi lingkungan; - Rehabilitasi fungsi lindung kawasan; - Pencegahan pemanfaatan ruang	- Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut - Penanggulangan pencemaran dan.atau kerusakan lingkungan	

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Ket.
	UPT Laboratorium Lingkungan)	yang merusak daya dukung	hidup dari sumber titik maupun sumber area - Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakaan lingkungan lahan akses terbuka - Pelaksanaan upaya mitigasi adaptasi perubahan iklim - Penginventarisasian Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi GRK - Peningkatan jumlah peserta PROPER dan peraih predikat BIRU - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	
3.	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (SIPSN, IKPS, 3R, Bank Sampah, perizinan TPS, UPT Limbah Medis)	- Pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya; - Pengembangan kota cerdas, hijau, dan berkelanjutan (PKN Palangka Raya) - Peningkatan pengelolaan limbah B3 dan limbah medis berkelanjutan	- Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah - Peningkatan sarana dan prasarana penanganan sampah di TPA/TPST - Pengembangan pengelolaan sampah melalui 3R - Peningkatan Jasa pengumpulan limbah B3 Skala Provinsi - Pengelolaan UPT Limbah Medis - Peningkatan pemanfaatan teknologi pengolahan sampah dan limbah B3	
4.	Peningkatan pengawasan, penyelesaian sengketa LH dan penegakan hukum lingkungan hidup, peningkatan kapasitas lingkungan hidup serta pengembangan informasi lingkungan	- Penegakan hukum lingkungan hidup; - Pemberdayaan masyarakat lokal dalam transisi ekonomi berkelanjutan	- Peningkatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan di sektor Pertambangan dan Migas, Perkebunan dan Pengolahan, serta Kehutanan - Mengembangkan sistem pengaduan dan penyelesaian kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan secara cepat dan efektif	

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Ket.
	(pengawasan izin lingkungan, penanganan sengketa/aduan, koordinasi PPNS, MHA, kemitraan, informasi lingkungan, pendidikan pelatihan, penyuluhan dan pemberian penghargaan)		- Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Hukum Adat - Mengoptimalkan pembinaan dan melaksanakan penilaian serta pemberian penghargaan lingkungan hidup - Pelaksanaan penyuluhan dan kampanye lingkungan terkait dengan pelestarian lingkungan hidup - Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran dari seluruh pemangku kepentingan terhadap upaya pencegahan, pemeliharaan lingkungan hidup dan pelestarian lingkungan hidup	

3.5 PROGRAM PRIORITAS DAERAH

Program unggulan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam jangka waktu lima tahun kedepan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

Gambar 3.2 Program Prioritas Daerah Huma Betang

3.5.1 Kalteng Bermartabat

Program yang berkenaan dengan Kalteng Bermartabat berkaitan dengan perencanaan pembangunan dan strategi kebijakan yang berorientasi pemberdayaan keunggulan lokal berbasis kearifan budaya dalam rangka meneguhkan Provinsi Kalimantan Tengah yang Belom Bahadat melalui program:

1. **Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan**, termasuk menembus keterisolasian daerah pedalaman dan pesisir.
2. **Memperluas sosialisasi di berbagai instansi dan kalangan masyarakat agar menjiwai spirit Belom Bahadat** dalam berkompetisi di berbagai bidang guna menumbuhkan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah yang berdaya saing.

3.5.2 Betang Maju

Percepatan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah melalui pembangunan infrastruktur jalan, revitalisasi lintas kota, dan inisiatif pembangunan wilayah khusus Delta Kalteng Ekonomi Eksklusif. Program ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas, memperkuat ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program ini akan fokus pada hilirisasi mineral, pembangunan jalur kereta api, serta pembentukan zona distribusi yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Selain itu, peningkatan infrastruktur air bersih, akses listrik, serta sinyal dan internet di daerah pedalaman menjadi prioritas untuk memastikan setiap desa memiliki akses yang layak dan modern. Hal ini diejawantahkan dalam program:

1. **Pembangunan 1.000 km jalan desa**, yaitu membangun jalan sepanjang 1.000 km bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antardesa serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
2. **Revitalisasi infrastruktur lintas kabupaten dan kota**, yaitu memperbaiki dan memperbarui infratsruktur jalan di seluruh kabupaten dan kota untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat
3. **Pembangunan Delta Kalteng Ekonomi Eksklusif**, yaitu mengembangkan wilayah khusus ekonomi dengan fokus pada hilirisasi mineral, transportasi, dan distribusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hilirisasi mineral dan sumber daya alam bertujuan untuk mengolah mineral dan sumber daya alam secara lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Pembangunan Kereta Api Palangkaraya – Gunung Mas – Katingan untuk memperlancar transportasi dan distribusi serta menghubungkan pusat-pusat ekonomi yang penting. Zona Distribusi Lintas Timur Sungai Kapuas bertujuan untuk membentuk zona distribusi di sepanjang Sungai Kapuas untuk memperlancar aliran barang.
4. **Peningkatan Infrastruktur Air Bersih Desa**, yaitu meningkatkan akses masyarakat desa terhadap air bersih yang layak melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur.
5. **Peningkatan Akses Listrik Desa**, 100% Bersinar, yaitu menyediakan akses listrik bagi seluruh desa di Provinsi Kalimantan Tengah untuk memastikan 100% wilayah mendapatkan penerangan.
6. **Akses Sinyal dan Internet Daerah Pedalaman**, yaitu memperluas jangkauan sinyal telekomunikasi dan akses internet di daerah pedalaman untuk menghubungkan masyarakat dan mendukung kegiatan ekonomi.

3.5.3 Betang Makmur

Peningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah melalui berbagai inisiatif, seperti bantuan pangan, operasi pasar murah, dan program asuransi ditujukan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga, petani, dan nelayan. Sementara itu, program penciptaan miliarder muda, Milenial Job Center, dan inkubasi UMKM berfokus pada peningkatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pelatihan kewirausahaan dan kompetensi SDM. Dengan bantuan perahu dan alat tangkap, Betang Makmur juga memastikan nelayan dapat beroperasi lebih efisien, mendukung ekonomi lokal, dan mendorong ketahanan pangan yang lebih baik dengan program:

1. **Rp2 juta per Kartu Keluarga Bantuan Pangan**, yaitu menyediakan bantuan pangan sebesar Rp2 juta per keluarga untuk memastikan kebutuhan dasra masyarakat terpenuhi dan mengurangi angka kemiskinan. Program ini merupakan pemberian bantuan tunai kepada masyarakat yang mengalami risiko sosial, difokuskan kepada lanjut usia, janda dan penyandang disabilitas berat yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial.
2. **Operasi Pasar Murah**, yaitu dengan menyelenggarakan pasar murah secara berkala untuk menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat.
3. **250 Miliarder Muda Baru**, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan 250 pengusaha muda sukses melalui dukungan modal dan bimbingan bisnis yang tepat.
4. **Milenial Job Center**, yaitu fasilitas pelatihan kewirausahaan dan peningkatan kompetensi SDM berbasis wirausaha untuk meningkatkan keterampilan dan kesempatan kerja bagi generasi milenial.
5. **Inkubasi UMKM**, yaitu menyediakan program pendampingan dan dukungan bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas usaha, akses pasar, legalitas hukum, dan daya saing.
6. **Asuransi Petani dan Nelayan**, yaitu memberikan perlindungan asuransi bagi petani dan nelayan untuk menjamin kelangsungan usaha mereka dari risiko alam dan ekonomi.
7. **Bantuan Perahu dan Alat Tangkap**, yaitu untuk mendukung nelayan dengan menyediakan perahu dan alat tangkap yang lebih modern untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan warga pesisir.

3.5.4 Betang Cerdas

Betang Cerdas bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran di Provinsi Kalimantan Tengah dengan menyediakan pendidikan gratis dan insentif bagi tenaga pengajar. Program ini memastikan akses pendidikan yang merata. Komitmen “Satu Keluarga Harus Ada Sarjana” mendorong pendidikan tinggi bagi seluruh masyarakat agar dapat diakses. Pembangunan rumah guru dan insentif bagi guru agama juga direncanakan akan dilakukan untuk mendukung dedikasi mereka terhadap pencerdasan masyarakat. Inisiatif “Kalteng Mengaji” menekankan pentingnya penghayatan dan pengamalan ajaran agama sesuai keyakinan masing-masing, memperkuat spiritualitas, dan nilai-nilai moral masyarakat yang diturunkan menjadi program:

1. **Sekolah/Kuliah Gratis**, yaitu menyediakan akses pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi untuk memastikan setiap anak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas tanpa terkendala biaya.
2. **Satu Keluarga Harus Ada Sarjana**, yaitu mendorong setiap keluarga untuk memiliki minimal satu anggota keluarga lulusan perguruan tinggi guna meningkatkan taraf pendidikan dan kesejahteraan sosial-ekonomi di masyarakat.

3. **1.000 Rumah Guru**, yaitu dengan membangun 1.000 rumah untuk guru sebagai bentuk apresiasi dan dukungan agar mereka dapat tinggal dekat dengan tempat mengajar serta meningkatkan kenyamanan dan kinerja pengajaran.
4. **Insentif Guru Agama**, yaitu memberikan insentif khusus bagi guru mengaji, guru sekolah minggu, Balai Basarah, dan guru agama lainnya untuk menghargai peran mereka dalam membentuk karakter dan moral anak-anak.
5. **Kalteng Mengaji**, yaitu program untuk memperdalam penghayatan dan pengamalan ajaran agama sesuai dengan keyakinan masing-masing, seperti menghafal kitab suci, memahami ajaran agama, dan memperkuat spiritualitas dan toleransi.

3.5.5 Betang Sehat

Program Betang Sehat memastikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah melalui akses layanan kesehatan yang lebih baik. Dengan berobat gratis berbasis KTP, program ini menjamin setiap warga mendapatkan perawatan medis yang diperlukan. Insentif bagi tenaga kesehatan desa dan revitalisasi puskesmas juga direncanakan akan dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di seluruh daerah. Program pendampingan ibu hamil dan pasca hamil memastikan kesehatan ibu dan anak sejak masa kehamilan hingga setelah melahirkan sehingga mampu mendukung generasi yang lebih sehat dan kuat. Ini dijabarkan dalam program:

1. **Berobat Gratis Berbasis KTP**, yaitu memberikan akses layanan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah hanya dengan menunjukkan KTP sehingga semua warga dapat menerima perawatan medis tanpa khawatir biaya.
2. **Insentif Tenaga Kesehatan Desa**, yaitu menyediakan insentif bagi tenaga kesehatan yang bekerja di desa untuk meningkatkan motivasi dan kinerja sehingga memastika layanan kesehatan yang lebih baik dan merata di seluruh wilayah.
3. **Revitalisasi Puskesmas Desa**, yaitu memperbaiki dan memperbarui fasilitas puskesmas di desa-desa untuk menyediakan layanan kesehatan yang lebih lengkap dan berkualitas serta mendekatkan akses kesehatan ke seluruh masyarakat.
4. **Pendampingan Ibu Hamil dan Pascahamil**, yaitu menyediakan program pendampingan komprehensif bagi ibu hamil dan setelah melahirkan untuk memastikan kesehatan ibu dan bayi, mencegah komplikasi, dan memberikan edukasi terkait perawatan kesehatan, serta memastikan kesehatan ibu dan bayi terjaga. Ini diharapkan mampu meningkatkan kesehatan generasi masa depan. 5. 1 Desa 1 Ambulans, yaitu menyediakan satu ambulans untuk setiap desa guna memastikan respon cepat dalam situasi darurat, meningkatkan kemampuan penanganan medis di daerah pedesaan, dan memastikan akses layanan kesehatan darurat.

3.5.6 Betang Harmoni

Program Betang harmoni merupakan program untuk meningkatkan kesejahteraan dan harmoni sosial di Provinsi Kalimantan Tengah melalui pemberdayaan desa wisata dan alokasi anggaran yang emrata. Bantuan provinsi dan stimulus desa diharapkan mampu memperkuat pembangunan lokal, sementara insentif bagi kepala desa dan pemimpin masyarakat lainnya mampu meningkatkan motivasi mereka dalam melayani warga. Layanan cepat tanggap kebakaran lahan dan bantuan warga juga menjadi prioritas untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diturunkan menjadi program:

1. **Berdayakan 100 Dewi (Desa Wisata),** yaitu mengembangkan 100 desa wisata dengan memberikan pelatihan dan dukungan untuk meningkatkan potensi pariwisata lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui sektor pariwisata.
2. **Rp150 Miliar Bantuan Provinsi untuk Kabupaten Kota**, yaitu mengalokasikan dana Rp150 miliar untuk mendukung pembangunan dan program prioritas di seluruh kabupaten dan kota dalam memastikan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. **Rp250 Juta Stimulus Desa**, yaitu memberikan stimulus Rp250 juta kepada setiap desa untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup warga desa dalam rangka mempercepat pertumbuhan desa mandiri.
4. **Insentif Kepala Desa, BPD, Damang, Mantir, dan RT/RW se Provinsi Kalimantan Tengah**, yaitu menyediakan insentif bagi pemimpin desa dan tokoh masyarakat lainnya sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam memimpin dan menjaga keharmonisa serta ketertiban di masyarakat.
5. **Layanan Cepat Tanggap Kebakaran Lahan dan Bantuan Warga**, yaitu membentuk tim respon cepat untuk menangani kebakaran lahan dan memberikan bantuan langsung kepada warga terdampak serta melindungi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dari bencana kebakaran.

Dalam pelaksanaan program prioritas daerah yaitu huma betang, Dinas Lingkungan Hidup mendukung pelaksanaan Betang Harmoni sebagaimana tabel terlampir :

Tabel 3.5 Program Kegiatan DLH Mendukung Program Prioritas Daerah (Huma Betang)

No.	Program Prioritas Daerah (Huma Betang)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit
A	**BETANG HARMONI**		
1	Bantuan Provinsi untuk Kab/Kota Rp 150 Milyar	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.11.1.01 - Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	
		2.11.11.1.01.0012 - Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	

No.	Program Prioritas Daerah (Huma Betang)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit
2	Rp 250 Juta Stimulus Desa	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.03.1.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	
		2.11.03.1.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
		2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.07.1.02 - Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	
		2.11.07.1.02.0001 - Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	
3	Layanan Cepat Tanggap Kebakaran Lahan dan Bantuan Warga	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.03.1.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
		2.11.03.1.02.0001 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	

Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS)

Program Huma Betang Sejahtera (HBS) dirancang sebagai bagian dari visi dan misi pembangunan daerah. Program ini akan dituangkan dalam delapan bentuk bantuan dan pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi dalam satu kartu yaitu Kartu Huma Betang Sejahtera. Kartu ini dirancang untuk menyederhanakan akses masyarakat terhadap berbagai bentuk bantuan sosial dan program pemberdayaan.

Delapan program akan terintegrasi dalam satu kartu yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 2 juta per kepala keluarga, Operasi Pasar Sembako Murah, Program Sekolah dan Kuliah Gratis, Layanan Kesehatan Gratis berbasis KTP/BPJS, Akses Lapangan Kerja, Bantuan Modal untuk Petani, Bantuan untuk Nelayan serta Bantuan Perumahan bagi Guru.

Gambar 3.3 Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS)

Dalam pelaksanaan Kartu Huma Betang Sejahtera, Dinas Lingkungan Hidup berpartisipasi mendukung keterbukaan akses lapangan kerja dalam bentuk pelaksanaan Penyuluhan/Sosialisasi dan Pelatihan Pengolahan Sampah Bagi Masyarakat yang berbasis ekonomi sirkular.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan RENSTRA PD.

Dalam rangka pelaksanaan program pembangunan khususnya pada bidang urusan lingkungan hidup, diperlukan rencana pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta kerangka pendanaan pada periode Tahun 2025-2029. Program merupakan sebuah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dalam hal ini juga telah di turunkan menjadi Sub kegiatan yang mengacu pada Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Mengacu Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah mengampu satu Program Penunjang urusan Pemerintahan Kabupaten (Kesekretariatan) dan sepuluh Program untuk urusan bidang lingkungan hidup yang terdiri dari:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Terkait dengan PPLH
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
10. Program Pengelolaan Persampahan
11. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

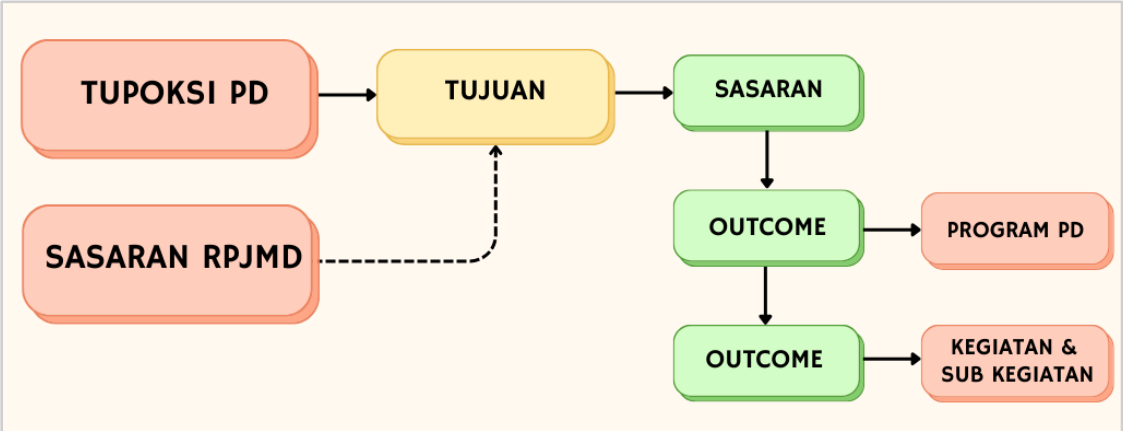

Gambar 4.1. Kerangka Perumusan Program, Kegiatan, Subkegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Indikator dan target Program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja PD pada Renstra DLH 2025-2029 sebagaimana pedoman penyusunan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, dimulai dari tahun 2026 hingga tahun 2030. Indikator dan target Program, kegiatan, dan subkegiatan tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030

Penentuan rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan bidang urusan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah selama periode Tahun 2025-2029 beserta kerangka pendanaannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. 1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup							
- Tercapainya pengurangan kejadian degradasi lingkungan dan peningkatan nilai ekonomi karbon **- Terwujudnya pengembangan produk dan industri unggulan daerah melalui hilirisasi berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru**	Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan				Indeks kualitas lingkungan hidup (Angka)		
		Meningkatnya upaya pengendalian dan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan			Indeks Kualitas Air (Indeks)		
					Indeks Kualitas Udara (Indeks)		
					Indeks Kualitas Lahan (Indeks)		
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP		Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	2.11.02 - PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	
				Terlaksananya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Strategis yang direncanakan	Dokumen RPPLH Provinsi yang ditetapkan (Dokumen)	2.11.02.1.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	
					Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan (Dokumen)	2.11.02.1.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	
					Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi (Dokumen)	2.11.02.1.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	
					Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi (Dokumen)	2.11.02.1.01.0002 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	
					Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan (Dokumen)	2.11.02.1.01.0003 - Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH	
					Dokumen RPPLH Provinsi yang ditetapkan (Dokumen)	2.11.02.1.01.0005 - Penetapan RPPLH Provinsi	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Strategis	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun (Dokumen)	2.11.02.1.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota (Dokumen)	2.11.02.1.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	
					Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun (Dokumen)	2.11.02.1.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	
					Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota (Dokumen)	2.11.02.1.02.0009 - Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kabupaten/Kota	
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		Indeks Kualitas Air (Indeks)	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
					Indeks Kualitas Udara (Indeks)	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Meningkatnya upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	2.11.03.1.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	
					Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	2.11.03.1.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	2.11.03.1.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	
					Jumlah dokumen kebijakan terkait Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya (Dokumen)	2.11.03.1.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	2.11.03.1.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	
					Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan (Kegiatan)	2.11.03.1.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	
					Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan (Laporan)	2.11.03.1.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	
					Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun (laporan)	2.11.03.1.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	
					Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim (Laporan)	2.11.03.1.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	
					Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	2.11.03.1.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	
					Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	2.11.03.1.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	
					Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan (Unit)	2.11.03.1.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	
					Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan (Unit)	2.11.03.1.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	2.11.03.1.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
					Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	2.11.03.1.01.0004 - Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	
					Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim (Laporan)	2.11.03.1.01.0005 - Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	
					Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun (laporan)	2.11.03.1.01.0008 - Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	
					Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	2.11.03.1.01.0009 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
					Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan (Kegiatan)	2.11.03.1.01.0010 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
					Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	2.11.03.1.01.0011 - Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	
					Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	2.11.03.1.01.0012 - Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	
					Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan (Unit)	2.11.03.1.01.0013 - Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan (Unit)	2.11.03.1.01.0014 - Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	
					Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	2.11.03.1.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	
					Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan (Laporan)	2.11.03.1.01.0016 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	
					Jumlah dokumen kebijakan terkait Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya (Dokumen)	2.11.03.1.01.0018 - Penyusunan Kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	
				Meingkatnya upaya penanggulangan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	2.11.03.1.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	2.11.03.1.02.0001 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	
				Meningkatnya upaya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Luas area yang dilakukan rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi (Ha)	2.11.03.1.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Luas area yang dilakukan rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi (Ha)	2.11.03.1.03.0007 Pelaksanaan rehabilitasi	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati		Persentase RTH (Persentase)	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
				Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	2.11.04.1.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	
					Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	2.11.04.1.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	2.11.04.1.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	
					Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi (Ha)	2.11.04.1.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	
					Unit Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi (Unit)	2.11.04.1.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	
					Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi (Unit)	2.11.04.1.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	2.11.04.1.01.0001 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
					Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi (Ha)	2.11.04.1.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
					Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	2.11.04.1.01.0006 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	2.11.04.1.01.0007 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati	
					Unit Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi (Unit)	2.11.04.1.01.0008 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	
					Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi (Unit)	2.11.04.1.01.0009 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	
			Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH		Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	
				Meningkatnya Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	2.11.07.1.01 - Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	2.11.07.1.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan (Dokumen)	2.11.07.1.02 - Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	
					Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan (Dokumen)	2.11.07.1.02.0001 - Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup		Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
				Meningkatnya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	2.11.08.1.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat (Orang)	2.11.08.1.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah pembinaan dan pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan (Dokumen)	2.11.08.1.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat (Orang)	2.11.08.1.01.0003 - Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	2.11.08.1.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat	
					Jumlah pembinaan dan pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan (Dokumen)	2.11.08.1.01.0007 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
				Meningkatnya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Masyarakat	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	2.11.09.1.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	2.11.09.1.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
		Meningkatnya pengelolaan sampah dan limbah B3			Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)		
					Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. (Ton)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
				Meningkatnya Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya (Dokumen)	2.11.05.1.01 - Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis Pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha (Dokumen)	2.11.05.1.01 - Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi yang dilakukan (Usaha)	2.11.05.1.01 - Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya (Dokumen)	2.11.05.1.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	
					Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis Pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha (Dokumen)	2.11.05.1.01.0003 - Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi yang terintegrasi denganPersetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha	
					Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi yang dilakukan (Usaha)	2.11.05.1.01.0004 - Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala provinsi	
			Meningkatnya tata kelola persampahan		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
				Meningkatnya Penanganan Sampah di TPA / TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan (Dokumen)	2.11.11.1.01 - Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	
					Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota (Dokumen)	2.11.11.1.01 - Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan	2.11.11.1.01 - Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	
					Jumlah sampah regional yang dikelola (Ton)	2.11.11.1.01 - Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	
					Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional (Unit)	2.11.11.1.01 - Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	
					Jumlah tonase Sampah Spesifik atau pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani (Ton)	2.11.11.1.01 - Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan (Dokumen)	2.11.11.1.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	
					Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan	2.11.11.1.01.0009 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	
					Jumlah sampah regional yang dikelola (Ton)	2.11.11.1.01.0011 - Pengelolaan sampah Regional	
					Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional (Unit)	2.11.11.1.01.0012 - Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	
					Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota (Dokumen)	2.11.11.1.01.0014 - Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	
					Jumlah tonase Sampah Spesifik atau pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani (Ton)	2.11.11.1.01.0015 - Pelaksanaan Penanganan Sampah Spesifik atau pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) (Angka)		
			Pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik		Persentase Keterlaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%)	2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	2.11.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.11.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.11.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.11.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.11.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.11.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.11.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.11.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.11.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.11.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.11.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.11.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.11.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.11.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.11.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.11.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.11.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	2.11.01.1.01.0012 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	
				Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan PD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.11.01.1.02 - AdministrasiKeuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.11.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	2.11.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	2.11.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.11.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.11.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Meningkatnya ketertiban administrasi barang milik daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.11.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.11.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.11.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.11.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya ketertiban administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.11.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.11.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.11.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.11.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.11.01.1.05.0002 – Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.11.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.11.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.11.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Meningkatnya ketertiban administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.11.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.11.01.1.06 – Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.11.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.11.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.11.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.11.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.11.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.11.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.11.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.11.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.11.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.11.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.11.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.11.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	2.11.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.11.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.11.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.11.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.11.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	2.11.01.1.07.0005 – Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.11.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.11.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya ketertiban administrasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.11.01.1.08 - PenyediaanJasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.11.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.11.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.11.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.11.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.11.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya upaya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.11.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.11.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.11.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.11.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.11.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.11.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	2.11.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	2.11.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
		Meningkatnya ketaatan penanggung jawab usaha terhadap perijinan lingkungan dan penyelesaian sengketa/dugaan pidana			Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi (%)		
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi (%)	2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
				Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Usaha/Kegiatan)	2.11.06.1.01 - Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD (Orang)	2.11.06.1.01 - Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	
					Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	2.11.06.1.01 - Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	
					Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan (Dokumen)	2.11.06.1.01 - Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	
					Jumlah Sarana Prasarana yang disediakan untuk Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Dampak Lingkungan dan PPNS untuk menunjang Kinerja Penegakan Hukum (Unit)	2.11.06.1.01 - Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	
					Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan (Dokumen)	2.11.06.1.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	
					Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	2.11.06.1.01.0005 - Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	
					Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD (Orang)	2.11.06.1.01.0007 - Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Usaha/Kegiatan)	2.11.06.1.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
					Jumlah Sarana Prasarana yang disediakan untuk Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Dampak Lingkungan dan PPNS untuk menunjang Kinerja Penegakan Hukum (Unit)	2.11.06.1.01.0010 - Layanan Sarana Prasarana Penegakan Hukum bidang Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup		Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH Provinsi	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi (Perkara)	2.11.10.1.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	
					Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi (Sanksi)	2.11.10.1.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	
					Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ ditangani	2.11.10.1.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	
					Jumlah PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	2.11.10.1.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Orang)	2.11.10.1.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	
					Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi (Perkara)	2.11.10.1.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	
					Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi (Perkara)	2.11.10.1.01.0005 - Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	
					Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi (Perkara)	2.11.10.1.01.0006 - Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	
					Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ ditangani	2.11.10.1.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	
					Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi (Sanksi)	2.11.10.1.01.0010 - Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	
					Jumlah PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	2.11.10.1.01.0011 - Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah Bidang Lingkungan Hidup	
					Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Orang)	2.11.10.1.01.0012 - Pengembangan Kapasitas SDM bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	

Tabel 4. 2. Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				110.945.357.046		112.436.900.664		117.019.247.211		122.167.367.370		128.142.067.303		
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				42.878.923.184		44.057.900.664		45.790.323.211		47.591.869.370		49.700.467.303		
Pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	Persentase Keterlaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%)	100	100	42.878.923.184	100	44.057.900.664	100	45.790.323.211	100	47.591.869.370	100	49.700.467.303	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				350.000.000		353.500.000		367.650.000		382.344.000		399.700.000		
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	350.000.000	1	353.500.000	1	367.650.000	1	382.344.000	1	399.700.000		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	50		50		50		50		50			
	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	0	15		15		15		15		15			
2.11.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				250.000.000		252.500.000		262.600.000		273.104.000		285.500.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	250.000.000	1	252.500.000	1	262.600.000	1	273.104.000	1	285.500.000		
2.11.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				10.000.000		10.100.000		10.500.000		10.924.000		11.400.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	10.100.000	1	10.500.000	1	10.924.000	1	11.400.000		
2.11.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				10.000.000		10.100.000		10.500.000		10.924.000		11.400.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	10.100.000	1	10.500.000	1	10.924.000	1	11.400.000		
2.11.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				10.000.000		10.100.000		10.500.000		10.924.000		11.400.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	10.100.000	1	10.500.000	1	10.924.000	1	11.400.000		
2.11.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				10.000.000		10.100.000		10.500.000		10.924.000		11.400.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	10.100.000	1	10.500.000	1	10.924.000	1	11.400.000		
2.11.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				20.000.000		20.200.000		21.000.000		21.848.000		22.800.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	3	20.000.000	3	20.200.000	3	21.000.000	3	21.848.000	3	22.800.000		
2.11.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15.000.000		15.150.000		15.800.000		16.386.000		17.200.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	15.000.000	1	15.150.000	1	15.800.000	1	16.386.000	1	17.200.000		
2.11.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				10.000.000		10.100.000		10.500.000		10.924.000		11.400.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	50	10.000.000	50	10.100.000	50	10.500.000	50	10.924.000	50	11.400.000		
2.11.01.1.01.0012 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan				15.000.000		15.150.000		15.750.000		16.386.000		17.200.000		
Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	0	15	15.000.000	15	15.150.000	15	15.750.000	15	16.386.000	15	17.200.000		
2.11.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				18.235.710.184		18.418.650.664		18.155.723.211		18.921.229.370		19.837.929.383		
Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan PD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	57	111	18.235.710.184	111	18.418.650.664	111	18.155.723.211	111	18.921.229.370	111	19.837.929.383		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.11.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				18.215.710.184		18.398.450.664		18.134.723.211		18.899.381.370		19.815.129.383		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	57	111	18.215.710.184	111	18.398.450.664	111	18.134.723.211	111	18.899.381.370	111	19.815.129.383		
2.11.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10.000.000		10.100.000		10.500.000		10.924.000		11.400.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	10.000.000	1	10.100.000	1	10.500.000	1	10.924.000	1	11.400.000		
2.11.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				10.000.000		10.100.000		10.500.000		10.924.000		11.400.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	2	2	10.000.000	2	10.100.000	2	10.500.000	2	10.924.000	2	11.400.000		
2.11.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				35.000.000		35.350.000		36.750.000		38.234.000		40.000.000		
Meningkatnya ketertiban administrasi barang milik daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	35.000.000	1	35.350.000	1	36.750.000	1	38.234.000	1	40.000.000		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.11.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				15.000.000		15.150.000		15.750.000		16.386.000		17.200.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	15.000.000	1	15.150.000	1	15.750.000	1	16.386.000	1	17.200.000		
2.11.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				20.000.000		20.200.000		21.000.000		21.848.000		22.800.000		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	20.000.000	1	20.200.000	1	21.000.000	1	21.848.000	1	22.800.000		
2.11.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.410.000.000		1.424.100.000		1.481.000.000		1.540.307.000		1.606.700.000		
Meningkatnya ketertiban administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	1.410.000.000	1	1.424.100.000	1	1.481.000.000	1	1.540.307.000	1	1.606.700.000		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	50		50		50		50		50			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	5		5		5		5		5			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	150		150		150		150		150			
2.11.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				300.000.000		303.000.000		315.100.000		327.725.000		342.400.000		
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	5	300.000.000	5	303.000.000	5	315.100.000	5	327.725.000	5	342.400.000		
2.11.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				10.000.000		10.100.000		10.500.000		10.924.000		11.400.000		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	10.100.000	1	10.500.000	1	10.924.000	1	11.400.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.11.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				1.000.000.000		1.010.000.000		1.050.400.000		1.092.416.000		1.141.500.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	150	1.000.000.000	150	1.010.000.000	150	1.050.400.000	150	1.092.416.000	150	1.141.500.000		
2.11.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100.000.000		101.000.000		105.000.000		109.242.000		111.400.000		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	50	100.000.000	50	101.000.000	50	105.000.000	50	109.242.000	50	111.400.000		
2.11.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				12.688.213.000		12.814.700.000		13.327.200.000		13.860.807.000		14.483.800.000		
Meningkatnya ketertiban administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	12.688.213.000	1	12.814.700.000	1	13.327.200.000	1	13.860.807.000	1	14.483.800.000		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	10		10		10		10		10			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	300		300		300		300		300			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.11.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				150.000.000		151.500.000		157.500.000		163.862.000		171.200.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	150.000.000	1	151.500.000	1	157.500.000	1	163.862.000	1	171.200.000		
2.11.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.467.382.000		1.482.000.000		1.541.300.000		1.602.992.000		1.675.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	10	1.467.382.000	10	1.482.000.000	10	1.541.300.000	10	1.602.992.000	10	1.675.000.000		
2.11.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				40.000.000		40.400.000		42.000.000		43.697.000		45.600.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	40.000.000	1	40.400.000	1	42.000.000	1	43.697.000	1	45.600.000		
2.11.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				200.000.000		202.000.000		210.000.000		218.483.000		228.200.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	200.000.000	1	202.000.000	1	210.000.000	1	218.483.000	1	228.200.000		
2.11.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				25.000.000		25.250.000		26.300.000		27.310.000		28.600.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	25.000.000	1	25.250.000	1	26.300.000	1	27.310.000	1	28.600.000		
2.11.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10.752.831.000		10.860.000.000		11.294.400.000		11.746.565.000		12.274.700.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	300	10.752.831.000	300	10.860.000.000	300	11.294.400.000	300	11.746.565.000	300	12.274.700.000		
2.11.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				53.000.000		53.550.000		55.700.000		57.898.000		60.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	53.000.000	1	53.550.000	1	55.700.000	1	57.898.000	1	60.500.000		
2.11.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.450.000.000		4.234.500.000		4.373.800.000		4.518.836.000		4.688.700.000		
Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	3.450.000.000	1	4.234.500.000	1	4.373.800.000	1	4.518.836.000	1	4.688.700.000		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1	5		5		5		5		5			
2.11.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	2	750.000.000	2	750.000.000	2	750.000.000	2	750.000.000		
2.11.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				350.000.000		353.500.000		367.600.000		382.346.000		400.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1	5	350.000.000	5	353.500.000	5	367.600.000	5	382.346.000	5	400.000.000		
2.11.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.100.000.000		2.121.000.000		2.205.800.000		2.294.074.000		2.397.200.000		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	2.100.000.000	1	2.121.000.000	1	2.205.800.000	1	2.294.074.000	1	2.397.200.000		
2.11.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.000.000.000		1.010.000.000		1.050.400.000		1.092.416.000		1.141.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	1.000.000.000	1	1.010.000.000	1	1.050.400.000	1	1.092.416.000	1	1.141.500.000		
2.11.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.610.000.000		3.646.100.000		3.791.900.000		3.943.622.000		4.104.637.920		
Meningkatnya ketertiban administrasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	3.610.000.000	1	3.646.100.000	1	3.791.900.000	1	3.943.622.000	1	4.104.637.920		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.11.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000		10.100.000		10.500.000		10.924.000		11.400.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	10.000.000	1	10.100.000	1	10.500.000	1	10.924.000	1	11.400.000		
2.11.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				600.000.000		606.000.000		630.200.000		655.450.000		684.900.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	600.000.000	1	606.000.000	1	630.200.000	1	655.450.000	1	684.900.000		
2.11.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.000.000.000		3.030.000.000		3.151.200.000		3.277.248.000		3.408.337.920		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	3.000.000.000	1	3.030.000.000	1	3.151.200.000	1	3.277.248.000	1	3.408.337.920		
2.11.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.100.000.000		3.131.000.000		3.256.300.000		3.386.490.000		3.539.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya upaya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	20	20	3.100.000.000	20	3.131.000.000	20	3.256.300.000	20	3.386.490.000	20	3.539.000.000		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	0	1		1		1		1		1			
2.11.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				500.000.000		505.000.000		525.200.000		546.208.000		570.800.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	20	20	500.000.000	20	505.000.000	20	525.200.000	20	546.208.000	20	570.800.000		
2.11.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				2.300.000.000		2.323.000.000		2.415.900.000		2.512.557.000		2.625.600.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	0	1	2.300.000.000	1	2.323.000.000	1	2.415.900.000	1	2.512.557.000	1	2.625.600.000		
2.11.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				300.000.000		303.000.000		315.200.000		327.725.000		342.600.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	1	300.000.000	1	303.000.000	1	315.200.000	1	327.725.000	1	342.600.000		
2.11.01.1.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				0		0		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	0	0	0	0	0	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000		
2.11.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				0		0		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	0	0	0	0	0	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000		
2.11.02 - PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP				445.000.000		708.050.000		720.372.000		1.133.200.000		348.100.000		
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	75	76	445.000.000	77	708.050.000	78	720.372.000	79	1.133.200.000	80	348.100.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.02.1.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi				400.000.000		662.600.000		673.104.000		684.000.000		296.800.000		
Terlaksananya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Strategis yang direncanakan	Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan (Dokumen)	0	0	400.000.000	1	662.600.000	1	673.104.000	1	684.000.000	0	296.800.000		
	Dokumen RPPLH Provinsi yang ditetapkan (Dokumen)	1	1		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.11.02.1.01.0002 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi				260.000.000		262.600.000		273.104.000		284.000.000		296.800.000		
Tersedianya Dokumen Telaahan kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi (Dokumen)	1	1	260.000.000	1	262.600.000	1	273.104.000	1	284.000.000	1	296.800.000		
2.11.02.1.01.0003 - Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH				0		400.000.000		400.000.000		400.000.000		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya dokumen rencana tematik yang merupakan bagian arahan RPPLH	Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan (Dokumen)	0	0	0	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	0	0		
2.11.02.1.01.0005 - Penetapan RPPLH Provinsi				140.000.000		0		0		0		0		
RPPLH Provinsi yang ditetapkan	Dokumen RPPLH Provinsi yang ditetapkan (Dokumen)	1	1	140.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.11.02.1.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi				45.000.000		45.450.000		47.268.000		449.200.000		51.300.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Strategis	Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota (Dokumen)	3	7	45.000.000	7	45.450.000	7	47.268.000	7	449.200.000	7	51.300.000		
	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun (Dokumen)	1	0		0		0		1		0			
2.11.02.1.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD				0		0		0		400.000.000		0		
Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun (Dokumen)	1	0	0	0	0	0	0	1	400.000.000	0	0		
2.11.02.1.02.0009 - Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kabupaten/Kota				45.000.000		45.450.000		47.268.000		49.200.000		51.300.000		
Tersedianya dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota	Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota (Dokumen)	3	7	45.000.000	7	45.450.000	7	47.268.000	7	49.200.000	7	51.300.000		
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				7.181.350.058		7.253.250.000		7.543.252.000		7.844.759.000		8.197.900.000		
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	52,13	70,65	7.181.350.058	70,85	7.253.250.000	71,05	7.543.252.000	71,25	7.844.759.000	71,45	8.197.900.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	92,71	78,64		78,84		79,04		79,24		79,44			
2.11.03.1.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup				7.041.350.058		7.112.350.000		7.348.752.000		7.646.442.000		7.995.200.000		
Meningkatnya upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	1	7.041.350.058	1	7.112.350.000	1	7.348.752.000	1	7.646.442.000	1	7.995.200.000		
	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	1	82		82		82		82		82			
	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan (Kegiatan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah dokumen kebijakan terkait Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan (Unit)	3	40		35		30		25		20			
	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	12	39		39		39		39		39			
	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun (laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	1	65		70		75		80		85			
	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan (Unit)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.11.03.1.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				150.000.000		151.500.000		157.560.000		163.800.000		171.250.000		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	1	150.000.000	1	151.500.000	1	157.560.000	1	163.800.000	1	171.250.000		
2.11.03.1.01.0004 - Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan				284.457.058		287.300.000		298.792.000		310.700.000		324.700.000		
Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	1	82	284.457.058	82	287.300.000	82	298.792.000	82	310.700.000	82	324.700.000		
2.11.03.1.01.0005 - Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi				100.000.000		101.000.000		105.000.000		109.200.000		114.100.000		
Terlaksananya upaya mitigasi perubahan iklim di tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim (Laporan)	1	1	100.000.000	1	101.000.000	1	105.000.000	1	109.200.000	1	114.100.000		
2.11.03.1.01.0008 - Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut				1.200.000.000		1.212.500.000		1.213.000.000		1.265.500.000		1.327.000.000		
Laporan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun (laporan)	0	1	1.200.000.000	1	1.212.500.000	1	1.213.000.000	1	1.265.500.000	1	1.327.000.000		
2.11.03.1.01.0009 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				107.743.000		108.800.000		113.200.000		117.700.000		123.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	12	39	107.743.000	39	108.800.000	39	113.200.000	39	117.700.000	39	123.000.000		
2.11.03.1.01.0010 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				30.000.000		30.300.000		31.500.000		32.700.000		34.200.000		
Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan (Kegiatan)	0	1	30.000.000	1	30.300.000	1	31.500.000	1	32.700.000	1	34.200.000		
2.11.03.1.01.0011 - Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK				106.000.000		107.000.000		111.300.000		115.800.000		120.950.000		
Tersedianya dokumen hasil inventarisas GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	1	1	106.000.000	1	107.000.000	1	111.300.000	1	115.800.000	1	120.950.000		
2.11.03.1.01.0012 - Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah				245.000.000		247.450.000		257.300.000		267.642.000		279.600.000		
Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	1	1	245.000.000	1	247.450.000	1	257.300.000	1	267.642.000	1	279.600.000		
2.11.03.1.01.0013 - Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi				2.000.000.000		2.020.000.000		2.100.800.000		2.184.800.000		2.283.200.000		
Tersedianya peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan (Unit)	3	40	2.000.000.000	35	2.020.000.000	30	2.100.800.000	25	2.184.800.000	20	2.283.200.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.11.03.1.01.0014 - Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi				240.150.000		242.500.000		252.200.000		262.300.000		274.000.000		
Beroperasi dan berfungsinya alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan (Unit)	1	1	240.150.000	1	242.500.000	1	252.200.000	1	262.300.000	1	274.000.000		
2.11.03.1.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi				1.123.000.000		1.134.000.000		1.179.300.000		1.226.800.000		1.281.700.000		
Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	1	65	1.123.000.000	70	1.134.000.000	75	1.179.300.000	80	1.226.800.000	85	1.281.700.000		
2.11.03.1.01.0016 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan				500.000.000		505.000.000		525.200.000		546.200.000		570.800.000		
Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan (Laporan)	0	1	500.000.000	1	505.000.000	1	525.200.000	1	546.200.000	1	570.800.000		
2.11.03.1.01.0018 - Penyusunan Kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya				955.000.000		965.000.000		1.003.600.000		1.043.300.000		1.090.700.000		
Tersusunnya dokumen kebijakan terkait Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Jumlah dokumen kebijakan terkait Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya (Dokumen)	0	1	955.000.000	1	965.000.000	1	1.003.600.000	1	1.043.300.000	1	1.090.700.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.11.03.1.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				90.000.000		90.900.000		94.500.000		98.317.000		102.700.000		
Meingkatnya upaya penanggulangan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	1	1	90.000.000	1	90.900.000	1	94.500.000	1	98.317.000	1	102.700.000		
2.11.03.1.02.0001 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat				90.000.000		90.900.000		94.500.000		98.317.000		102.700.000		
Terlaksananya Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	1	1	90.000.000	1	90.900.000	1	94.500.000	1	98.317.000	1	102.700.000		
2.11.03.1.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				50.000.000		50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Meningkatnya upaya Pemulihan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	luas area yang dilakukan rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi (Ha)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.11.03.1.03.0007 - Pelaksanaan rehabilitasi				50.000.000		50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
kegiatan rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi (Ha)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				434.204.000		1.988.500.000		2.068.000.000		2.150.811.000		2.247.350.000		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	0,235	0,255	434.204.000	0,265	1.988.500.000	0,275	2.068.000.000	0,285	2.150.811.000	0,295	2.247.350.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.11.04.1.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi				434.204.000		1.988.500.000		2.068.000.000		2.150.811.000		2.247.350.000		
Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati provinsi	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	200	100	434.204.000	100	1.988.500.000	100	2.068.000.000	110	2.150.811.000	110	2.247.350.000		
	Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi (Unit)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	1	2		2		2		2		2			
	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi (Ha)	1	0		1		1		1		1			
	Unit Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi (Unit)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	0	0		1		1		1		1			
2.11.04.1.01.0001 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				334.204.000		337.500.000		351.000.000		365.090.000		381.450.000		
Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	1	2	334.204.000	2	337.500.000	2	351.000.000	2	365.090.000	2	381.450.000		
2.11.04.1.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				0		250.000.000		260.000.000		270.400.000		282.500.000		
Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi (Ha)	1	0	0	1	250.000.000	1	260.000.000	1	270.400.000	1	282.500.000		
2.11.04.1.01.0006 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				100.000.000		101.000.000		105.000.000		109.241.000		114.100.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya jumlah orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	200	100	100.000.000	100	101.000.000	100	105.000.000	110	109.241.000	110	114.100.000		
2.11.04.1.01.0007 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati				0		300.000.000		312.000.000		324.480.000		339.100.000		
Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	0	0	0	1	300.000.000	1	312.000.000	1	324.480.000	1	339.100.000		
2.11.04.1.01.0008 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan				0		500.000.000		520.000.000		540.800.000		565.100.000		
Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	Unit Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi (Unit)	0	0	0	1	500.000.000	1	520.000.000	1	540.800.000	1	565.100.000		
2.11.04.1.01.0009 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya				0		500.000.000		520.000.000		540.800.000		565.100.000		
Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi (Unit)	0	0	0	1	500.000.000	1	520.000.000	1	540.800.000	1	565.100.000		
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				2.389.000.000		1.706.000.000		1.774.250.000		1.845.091.000		1.928.250.000		
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	99,944	99,948	2.389.000.000	99,95	1.706.000.000	99,952	1.774.250.000	99,954	1.845.091.000	99,956	1.928.250.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.05.1.01 - Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				2.389.000.000		1.706.000.000		1.774.250.000		1.845.091.000		1.928.250.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya (Dokumen)	1	1	2.389.000.000	1	1.706.000.000	1	1.774.250.000	1	1.845.091.000	1	1.928.250.000		
	Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis Pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha (Dokumen)	1	1		0		0		0		0			
	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi yang dilakukan (Usaha)	0	12		12		12		12		12			
2.11.05.1.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan				1.686.000.000		1.702.900.000		1.771.000.000		1.841.814.000		1.924.700.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya (Dokumen)	1	1	1.686.000.000	1	1.702.900.000	1	1.771.000.000	1	1.841.814.000	1	1.924.700.000		
2.11.05.1.01.0003 - Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha				700.000.000		0		0		0		0		
Terfasilitasinya pemenuhan persetujuan teknis pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha	Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis Pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha (Dokumen)	1	1	700.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.11.05.1.01.0004 - Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala provinsi				3.000.000		3.100.000		3.250.000		3.277.000		3.550.000		
Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi yang dilakukan (Usaha)	0	12	3.000.000	12	3.100.000	12	3.250.000	12	3.277.000	12	3.550.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				1.281.572.804		1.294.400.000		1.346.200.000		1.400.012.000		1.462.950.000		
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi (%)	12,68	17	1.281.572.804	19	1.294.400.000	21	1.346.200.000	23	1.400.012.000	25	1.462.950.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.06.1.01 - Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi				1.281.572.804		1.294.400.000		1.346.200.000		1.400.012.000		1.462.950.000		
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Usaha/Kegiatan)	138	80	1.281.572.804	82	1.294.400.000	85	1.346.200.000	87	1.400.012.000	90	1.462.950.000		
	Jumlah Sarana Prasarana yang disediakan untuk Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Dampak Lingkungan dan PPNS untuk menunjang Kinerja Penegakan Hukum (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan (Dokumen)	3	3		2		2		2		2			
	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD (Orang)	1	5		5		5		5		5			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.11.06.1.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				440.572.804		445.000.000		462.800.000		481.289.000		502.950.000		
Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan 0perasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan (Dokumen)	3	3	440.572.804	2	445.000.000	2	462.800.000	2	481.289.000	2	502.950.000		
2.11.06.1.01.0005 - Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup				270.000.000		272.700.000		283.600.000		294.953.000		308.200.000		
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	5	5	270.000.000	5	272.700.000	5	283.600.000	5	294.953.000	5	308.200.000		
2.11.06.1.01.0007 - Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup				21.000.000		21.200.000		22.100.000		22.941.000		24.000.000		
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang dibentuk	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD (Orang)	1	5	21.000.000	5	21.200.000	5	22.100.000	5	22.941.000	5	24.000.000		
2.11.06.1.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				300.000.000		303.000.000		315.100.000		327.725.000		342.400.000		
Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Usaha/Kegiatan)	138	80	300.000.000	82	303.000.000	85	315.100.000	87	327.725.000	90	342.400.000		
2.11.06.1.01.0010 - Layanan Sarana Prasarana Penegakan Hukum bidang Lingkungan Hidup				250.000.000		252.500.000		262.600.000		273.104.000		285.400.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Penyediaan Sarana Prasarana Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Sarana Prasarana yang disediakan untuk Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Dampak Lingkungan dan PPNS untuk menunjang Kinerja Penegakan Hukum (Unit)	0	1	250.000.000	1	252.500.000	1	262.600.000	1	273.104.000	1	285.400.000		
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH				149.749.000		455.500.000		491.200.000		529.979.000		551.700.000		
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	100	100	149.749.000	100	455.500.000	100	491.200.000	100	529.979.000	100	551.700.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.07.1.01 - Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH				104.488.000		105.500.000		109.700.000		114.144.000		119.200.000		
Meningkatnya Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH (Dokumen)	1	1	104.488.000	1	105.500.000	1	109.700.000	1	114.144.000	1	119.200.000		
2.11.07.1.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH				104.488.000		105.500.000		109.700.000		114.144.000		119.200.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH (Dokumen)	1	1	104.488.000	1	105.500.000	1	109.700.000	1	114.144.000	1	119.200.000		
2.11.07.1.02 - Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH				45.261.000		350.000.000		381.500.000		415.835.000		432.500.000		
Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan (Dokumen)	1	1	45.261.000	1	350.000.000	1	381.500.000	1	415.835.000	1	432.500.000		
2.11.07.1.02.0001 - Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH				45.261.000		350.000.000		381.500.000		415.835.000		432.500.000		
Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan (Dokumen)	1	1	45.261.000	1	350.000.000	1	381.500.000	1	415.835.000	1	432.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				5.051.758.000		5.102.000.000		5.306.100.000		5.518.620.000		5.766.600.000		
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	45	55	5.051.758.000	60	5.102.000.000	65	5.306.100.000	70	5.518.620.000	75	5.766.600.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.08.1.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi				5.051.758.000		5.102.000.000		5.306.100.000		5.518.620.000		5.766.600.000		
Meningkatnya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pembinaan dan pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1	5.051.758.000	1	5.102.000.000	1	5.306.100.000	1	5.518.620.000	1	5.766.600.000		
	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat (Orang)	60	100		100		100		100		100			
	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas /kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	1	3		3		3		3		3			
2.11.08.1.01.0003 - Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi				549.758.000		555.255.000		577.465.000		600.563.000		624.585.000		
Meningkatnya jumlah penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat (Orang)	60	100	549.758.000	100	555.255.000	100	577.465.000	100	600.563.000	100	624.585.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.11.08.1.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat				4.152.000.000		4.193.245.000		4.360.935.000		4.535.712.000		4.742.415.000		
Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala provinsi yang terdaftar di Provinsi yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas /kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	1	3	4.152.000.000	3	4.193.245.000	3	4.360.935.000	3	4.535.712.000	3	4.742.415.000		
2.11.08.1.01.0007 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup				350.000.000		353.500.000		367.700.000		382.345.000		399.600.000		
Terlaksananya pengembangan generasi lingkungan melalui pembinaan, pendampingan, pembentukan dan pemberdayaan kader lingkungan, penyuluhan, dan pemberian penghargaan	Jumlah pembinaan dan pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1	350.000.000	1	353.500.000	1	367.700.000	1	382.345.000	1	399.600.000		
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				482.000.000		486.800.000		506.300.000		526.544.000		550.300.000		
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	45	60	482.000.000	65	486.800.000	70	506.300.000	75	526.544.000	80	550.300.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.09.1.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi				482.000.000		486.800.000		506.300.000		526.544.000		550.300.000		
Meningkatnya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Masyarakat	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	3	2	482.000.000	2	486.800.000	2	506.300.000	2	526.544.000	2	550.300.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.11.09.1.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				482.000.000		486.800.000		506.300.000		526.544.000		550.300.000		
Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	3	2	482.000.000	2	486.800.000	2	506.300.000	2	526.544.000	2	550.300.000		
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				1.328.000.000		1.341.300.000		1.394.900.000		1.450.729.000		1.515.900.000		
Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	100	70	1.328.000.000	75	1.341.300.000	80	1.394.900.000	85	1.450.729.000	90	1.515.900.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.10.1.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi				1.328.000.000		1.341.300.000		1.394.900.000		1.450.729.000		1.515.900.000		
Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH Provinsi	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi (Perkara)	1	1	1.328.000.000	1	1.341.300.000	1	1.394.900.000	1	1.450.729.000	1	1.515.900.000		
	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ditangani (Pengaduan)	1	8		8		8		8		8			
	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi (Perkara)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Orang)	0	30		30		30		30		30			
	Jumlah PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi (Sanksi)	1	1		1		1		1		1			
2.11.10.1.01.0005 - Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi				245.000.000		247.450.000		257.400.000		267.642.000		279.700.000		
Diselesaikannya sengketa lingkungan hidup yang ditangani baik Melalui Pengadilan ataupun di Luar Pengadilan yang merupakan kewenangan Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi (Perkara)	1	1	245.000.000	1	247.450.000	1	257.400.000	1	267.642.000	1	279.700.000		
2.11.10.1.01.0006 - Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi				475.000.000		479.750.000		498.900.000		518.898.000		542.200.000		
Diselesaikannya kasus tindak pidana lingkungan hidup yang merupakan kewenangan Provinsi sampai P-21	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi (Perkara)	1	1	475.000.000	1	479.750.000	1	498.900.000	1	518.898.000	1	542.200.000		
2.11.10.1.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi				112.000.000		113.100.000		117.600.000		122.351.000		127.800.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Penanganan Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ditangani (Pengaduan)	1	8	112.000.000	8	113.100.000	8	117.600.000	8	122.351.000	8	127.800.000		
2.11.10.1.01.0010 - Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi				100.000.000		101.000.000		105.000.000		109.242.000		114.100.000		
Diterapkannya sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi (Sanksi)	1	1	100.000.000	1	101.000.000	1	105.000.000	1	109.242.000	1	114.100.000		
2.11.10.1.01.0011 - Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah Bidang Lingkungan Hidup				246.000.000		248.500.000		258.500.000		268.734.000		280.900.000		
PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	12	12	246.000.000	12	248.500.000	12	258.500.000	12	268.734.000	12	280.900.000		
2.11.10.1.01.0012 - Pengembangan Kapasitas SDM bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup				150.000.000		151.500.000		157.500.000		163.862.000		171.200.000		
SDM yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Orang)	0	30	150.000.000	30	151.500.000	30	157.500.000	30	163.862.000	30	171.200.000		
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				49.323.800.000		48.043.200.000		50.078.350.000		52.175.753.000		55.872.550.000		
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	31,06	45	49.323.800.000	47	48.043.200.000	49	50.078.350.000	51	52.175.753.000	53	55.872.550.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.11.1.01 - Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional				49.323.800.000		48.043.200.000		50.078.350.000		52.175.753.000		55.872.550.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Penanganan Sampah di TPA / TPST Regional	Jumlah tonase Sampah Spesifik atau pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani (Ton)	0	50	49.323.800.000	50	48.043.200.000	50	50.078.350.000	50	52.175.753.000	50	55.872.550.000		
	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional (Unit)	1	40		40		45		45		50			
	Jumlah sampah regional yang dikelola (Ton)	849,05	1.050		1.050		1.050		1.050		1.050			
	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.11.11.1.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional				3.000.000		3.100.000		3.250.000		3.278.000		3.550.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	1	3.000.000	1	3.100.000	1	3.250.000	1	3.278.000	1	3.550.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.11.11.1.01.0009 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi				1.000.000.000		1.010.000.000		1.050.400.000		1.092.416.000		1.141.500.000		
Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	1	1	1.000.000.000	1	1.010.000.000	1	1.050.400.000	1	1.092.416.000	1	1.141.500.000		
2.11.11.1.01.0011 - Pengelolaan sampah Regional				6.895.000.000		6.963.900.000		7.242.500.000		7.532.209.000		7.871.100.000		
Terlaksananya pengelolaan sampah regional	Jumlah sampah regional yang dikelola (Ton)	849,05	1.050	6.895.000.000	1.050	6.963.900.000	1.050	7.242.500.000	1.050	7.532.209.000	1.050	7.871.100.000		
2.11.11.1.01.0012 - Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional				40.805.800.000		39.440.000.000		41.131.000.000		42.870.552.000		46.148.700.000		
Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional (Unit)	1	40	40.805.800.000	40	39.440.000.000	45	41.131.000.000	45	42.870.552.000	50	46.148.700.000		
2.11.11.1.01.0014 - Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota				120.000.000		121.200.000		126.000.000		131.090.000		136.900.000		
Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota (Dokumen)	1	1	120.000.000	1	121.200.000	1	126.000.000	1	131.090.000	1	136.900.000		
2.11.11.1.01.0015 - Pelaksanaan Penanganan Sampah Spesifik atau pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi				500.000.000		505.000.000		525.200.000		546.208.000		570.800.000		
Terlaksananya penanganan Sampah Spesifik atau pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah tonase Sampah Spesifik atau pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani (Ton)	0	50	500.000.000	50	505.000.000	50	525.200.000	50	546.208.000	50	570.800.000		

Tabel 4. 3. Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas PD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup				
1.	2.11.02 - PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	2.11.02.1.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	
			2.11.02.1.01.0002 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	
			2.11.02.1.01.0003 - Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH	
			2.11.02.1.01.0005 - Penetapan RPPLH Provinsi	
			2.11.02.1.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	
			2.11.02.1.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	
			2.11.02.1.02.0009 - Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kabupaten/Kota	
2.	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	2.11.03.1.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	
			2.11.03.1.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	HUMA HARMONI (Rp 250 Juta Stimulus Desa)
			2.11.03.1.01.0004 - Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	
			2.11.03.1.01.0005 - Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	
			2.11.03.1.01.0008 - Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	
			2.11.03.1.01.0009 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
			2.11.03.1.01.0010 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
			2.11.03.1.01.0011 - Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	
			2.11.03.1.01.0012 - Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	
			2.11.03.1.01.0013 - Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			2.11.03.1.01.0014 - Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	
			2.11.03.1.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	
			2.11.03.1.01.0016 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	
			2.11.03.1.01.0018 - Penyusunan Kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	
			2.11.03.1.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
			2.11.03.1.02.0001 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	HUMA HARMONI (Layanan Cepat Tanggap Kebakaran Lahan dan Bantuan Warga)
			2.11.03.1.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
			2.11.03.1.03.0007 - Pelaksanaan rehabilitasi	
3.	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	2.11.04.1.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	
			2.11.04.1.01.0001 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
			2.11.04.1.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
			2.11.04.1.01.0006 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
			2.11.04.1.01.0007 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati	
			2.11.04.1.01.0008 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	
			2.11.04.1.01.0009 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	
4.	2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN	Meningkatnya penanganan Bahan	2.11.05.1.01 - Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
	BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	2.11.05.1.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	
			2.11.05.1.01.0003 - Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha	
			2.11.05.1.01.0004 - Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala provinsi	
5.	2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	2.11.06.1.01 - Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	
			2.11.06.1.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	
			2.11.06.1.01.0005 - Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	
			2.11.06.1.01.0007 - Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	
			2.11.06.1.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			2.11.06.1.01.0010 - Layanan Sarana Prasarana Penegakan Hukum bidang Lingkungan Hidup	
6.	2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	2.11.07.1.01 - Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	
			2.11.07.1.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	
			2.11.07.1.02 - Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			2.11.07.1.02.0001 - Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	HUMA HARMONI (Rp 250 Juta Stimulus Desa)
7.	2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	2.11.08.1.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	
			2.11.08.1.01.0003 - Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	
			2.11.08.1.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	
			2.11.08.1.01.0007 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	
8.	2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	2.11.09.1.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	
			2.11.09.1.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
9.	2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	2.11.10.1.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	
			2.11.10.1.01.0005 - Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	
			2.11.10.1.01.0006 - Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	
			2.11.10.1.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	
			2.11.10.1.01.0010 - Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	
			2.11.10.1.01.0011 - Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah Bidang Lingkungan Hidup	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			2.11.10.1.01.0012 - Pengembangan Kapasitas SDM bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	
10.	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya tata kelola persampahan	2.11.11.1.01 - Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	
			2.11.11.1.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	
			2.11.11.1.01.0009 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	
			2.11.11.1.01.0011 - Pengelolaan sampah Regional	
			2.11.11.1.01.0012 - Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Huma harmoni (Bantuan Provinsi untuk Kab/Kota Rp 150 Milyar)
			2.11.11.1.01.0014 - Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	
			2.11.11.1.01.0015 - Pelaksanaan Penanganan Sampah Spesifik atau pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	

4.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran serta merupakan ikhtisar Hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. IKU menjadi dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah, yang disusun setiap tahun sebagaimana penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah. IKU merupakan indikator kinerja tujuan dan sasaran PD, penjelasan mengenai masing-masing indikator tujuan dan sasaran telah dijelakan pada bab sebelumnya. Adapun IKU PD DLH selama lima tahun Renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 4. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	2.11.0.00.0.00.01.0000 - **Dinas Lingkungan Hidup**									
1.	Indeks kualitas lingkungan hidup	Angka	74,8	76,34	76,51	76,68	76,84	77,01	77,18	
2.	Indeks Kualitas Air	Indeks	52,13	70,45	70,65	70,85	71,05	71,25	71,45	
3.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	92,71	78,44	78,64	78,84	79,04	79,24	79,44	
4.	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	75,38	83,96	84,03	84,1	84,17	84,24	84,31	
5.	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Persentase	99,944	99,946	99,948	99,950	99,952	99,954	99,956	
6.	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Ton	29184,81	29300	29420	29540	29660	29780	29900	
7.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi	%	12,68	15	17	19	21	23	25	
8.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Angka	69,95	70,20	70,45	70,70	70,95	71,20	71,45	

4.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah secara menyeluruh, mencerminkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan target pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah, baik RPJPD, RPJMD, maupun RKPD. IKD berfungsi sebagai tolok ukur dalam menilai keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah serta sebagai dasar evaluasi kinerja pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, IKD menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah berjalan sejalan dengan kebijakan nasional, sekaligus memberikan gambaran nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor, termasuk sektor lingkungan hidup yang menjadi bagian dari tanggung jawab DLH. Sementara itu, Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan tertentu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang kemudian digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. IKK menentukan target penyelenggaraan urusan, dimana DLH berdasarkan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab terhadap Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan pada Unsur Lingkungan Hidup.

Tabel 4. 5. Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup										
I	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1	Persentase RTH	Persentase	0,235	0,245	0,255	0,265	0,275	0,285	0,295	
2	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Penyelesaian Sengketa/ Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase	100	65	70	75	80	85	90	
II	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
1	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Ton	29.184,81	29.300	29.420	29.540	29.660	29.780	29.900	
2	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	75,38	83,96	84,03	84,1	84,17	84,24	84,31	
3	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Persentase	99,944	99,946	99,948	99,950	99,952	99,954	99,956	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Indeks Kualitas Air	Indeks	52,13	70,45	70,65	70,85	71,05	71,25	71,45	
5	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	31,06	43	45	47	49	51	53	
6	Indeks Kualitas Udara	Indeks	92,71	78,44	78,64	78,84	79,04	79,24	79,44	
III	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**									
1	Indeks kualitas lingkungan hidup	Angka	74,80	76,34	76,51	76,68	76,84	77,01	77,18	
2	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persentase	75	75	76	77	78	79	80	
3	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	45	50	55	60	65	70	75	
4	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase	45	50	60	65	70	75	80	
5	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi	%	12,68	15	17	19	21	23	25	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun secara sistematis berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis di bidang lingkungan hidup, potensi daerah, serta permasalahan aktual yang mempengaruhi kualitas lingkungan. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman utama dalam penyusunan rencana kerja tahunan perangkat daerah, sekaligus menjadi alat kendali dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan untuk mewujudkan visi-misi pembangunan daerah melalui pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang lestari.

5.1 KESIMPULAN SUBSTANSIAL

Pembangunan di sektor lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Tengah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya bersama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Tujuannya bukan hanya menjaga kelestarian ekosistem, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui lingkungan yang bersih, sehat, dan produktif. Berdasarkan hasil perencanaan dan pelaksanaan program-program lingkungan hidup selama periode berjalan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perencanaan pembangunan lingkungan hidup harus berbasis pada data yang akurat, kajian daya dukung dan daya tampung, serta kebutuhan nyata masyarakat. Perencanaan ini harus melibatkan partisipasi aktif dari berbagai unsur, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, serta diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah dan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan menunjukkan kemajuan dalam hal pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah, rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan keanekaragaman hayati, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH, serta peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi lingkungan.
3. Koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, baik dengan perangkat daerah lain, pemerintah pusat, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, maupun masyarakat luas, menjadi faktor kunci keberhasilan pembangunan lingkungan hidup. Sinergi ini memperkuat efektivitas intervensi kebijakan dan memastikan bahwa seluruh program benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

5.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pembangunan di bidang lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan sejumlah kaidah pelaksanaan yang menjadi pedoman utama agar setiap program dan kegiatan berjalan secara terarah, akuntabel, dan berorientasi hasil. Kaidah-kaidah ini dirancang untuk menjamin bahwa seluruh proses pembangunan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029, serta mampu menjawab tantangan strategis secara berkelanjutan.

1. Transparansi dan Akuntabilitas
   Seluruh proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program lingkungan hidup dilaksanakan secara terbuka, informatif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik melalui sistem pelaporan dan evaluasi yang terukur.
2. Partisipatif
   Penyelenggaraan program lingkungan hidup dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dunia usaha, akademisi, serta mitra strategis lainnya, untuk memastikan kebijakan dan layanan sesuai kebutuhan riil di lapangan.
3. Efisiensi dan Efektivitas
   Penggunaan anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana dioptimalkan agar menghasilkan dampak yang maksimal terhadap peningkatan kualitas lingkungan dan ketahanan ekosistem.
4. Keadilan Sosial dan Lingkungan
   Pembangunan lingkungan hidup dilaksanakan secara inklusif, menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, serta memperhatikan kelompok rentan yang terdampak langsung oleh degradasi lingkungan.
5. Berkelanjutan
   Seluruh program dan kegiatan dirancang dengan pendekatan jangka panjang yang memperhatikan keberlanjutan ekosistem, daya dukung lingkungan, serta ketahanan terhadap perubahan iklim.

5.3 PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Pengendalian dan evaluasi merupakan bagian krusial dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029. Keduanya berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta berkontribusi nyata terhadap kualitas lingkungan hidup.

Beberapa mekanisme pengendalian dan evaluasi yang diterapkan antara lain:

1. Monitoring Berkala
   Dilaksanakan secara rutin oleh jajaran Dinas Lingkungan Hidup bersama tim teknis, untuk menilai kemajuan pelaksanaan program baik dari sisi fisik, keuangan, maupun ketercapaian sasaran di lapangan. Monitoring ini menjadi dasar pengambilan keputusan cepat dan tepat jika ditemukan kendala dalam pelaksanaan.
2. Evaluasi Kinerja Tahunan
   Dilakukan setiap akhir tahun untuk mengukur pencapaian indikator kinerja utama dan kunci, mengevaluasi efektivitas strategi, serta menyusun rekomendasi perbaikan program/kegiatan pada tahun berikutnya agar lebih tepat sasaran dan responsif terhadap dinamika lingkungan.
3. Pelibatan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan
   Melalui forum-forum seperti konsultasi publik, musyawarah lingkungan, pengaduan masyarakat, maupun survei kepuasan layanan, masyarakat dilibatkan untuk memberikan umpan balik atas implementasi kebijakan, sehingga mendorong transparansi dan partisipasi aktif.
4. Audit Internal dan Eksternal
   Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Daerah maupun lembaga pemeriksa lainnya untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas penggunaan anggaran, serta pencegahan penyimpangan yang dapat merugikan mutu layanan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan menjadi dasar penyusunan program kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

Akhir kata, pembangunan lingkungan hidup merupakan proses berkelanjutan yang memerlukan sinergi antara perencanaan yang matang, pelaksanaan yang disiplin, serta sistem pengendalian dan evaluasi yang efektif. Dengan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan, pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, adil, dan berwawasan ekologis di Provinsi Kalimantan Tengah dapat terwujud demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan bagi generasi sekarang maupun mendatang.

L A M P I R A N

POHON KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025 - 2029

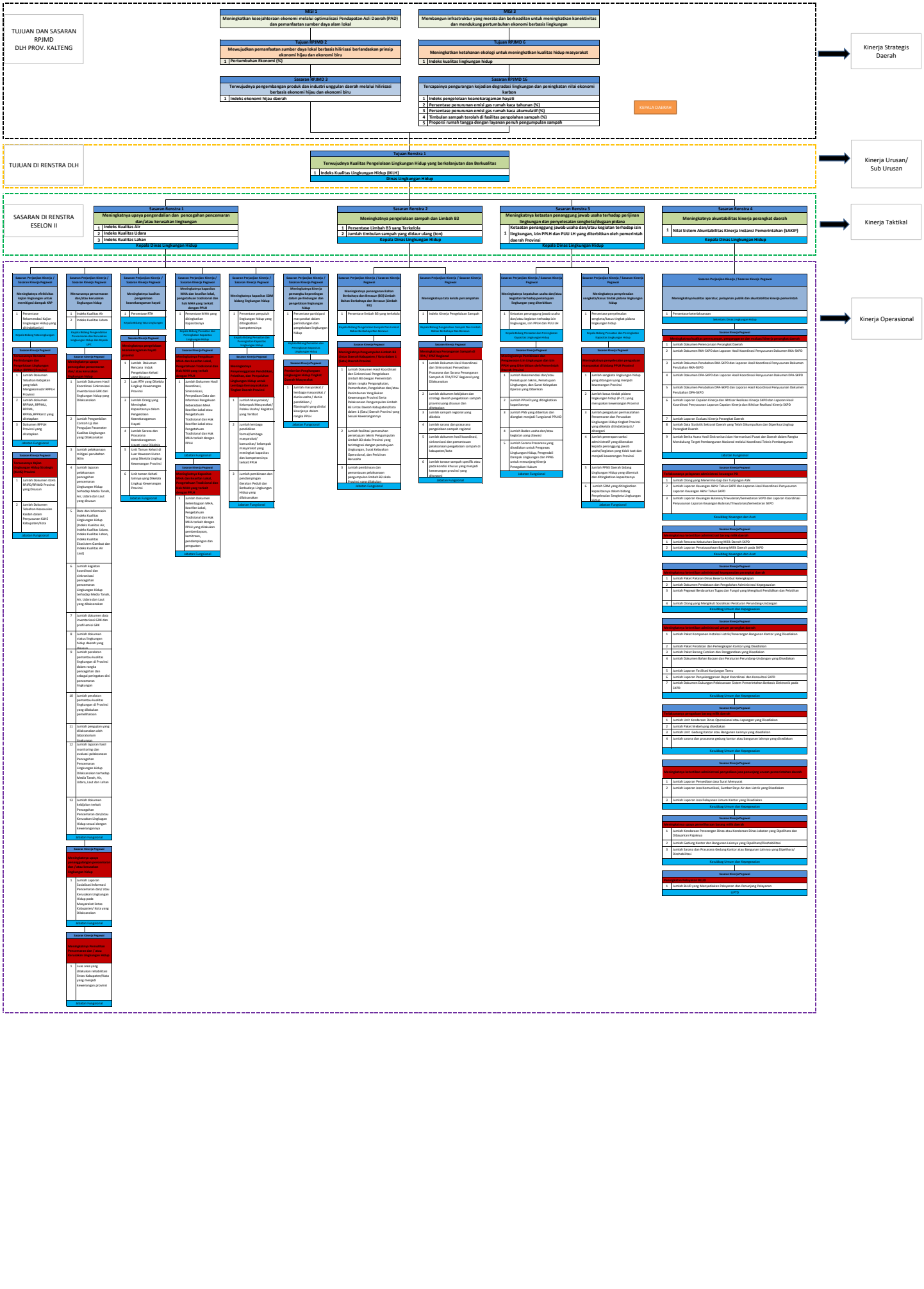

CASCADING DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025 - 2029

Misi 1

Meningkatkan upaya pengendalian dan pengelolaan para lingkungan hidup

Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
1 Indeks Kualitas Air	Indeks	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
2 Indeks Kualitas Udara	Indeks	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00
3 Indeks Kualitas Lahan	Indeks	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00

Misi 2

Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
1 Indeks pengelolaan sumber daya alam	Indeks	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00
2 Persentase pencemaran air yang memenuhi baku mutu air sungai	%	47,00	48,00	49,00	50,00	51,00
3 Persentase pencemaran air laut yang memenuhi baku mutu air laut	%	37,00	38,00	39,67	41,00	42,33
4 Persentase lahan pasca tambang yang direklamasi dan/atau direvegetasi sesuai peruntukannya	%	19,3	19,8	20,8	21,8	22,8
5 Persentase lahan kritis di luar kawasan hutan yang direhabilitasi	%	19,3	19,8	20,8	21,8	22,8
6 Persentase lahan gambut rusak yang direstorasi	%	40	46,5	53	59,5	66
7 Persentase rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak	%	80	80,5	81	81,5	82

Misi 3

Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang berdaya saing

Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	73,52	73,72	73,92	74,12	74,32
2 Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	69,52	69,72	69,92	70,12	70,32
3 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,52	8,62	8,72	8,82	8,92
4 Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	Tahun	13,12	13,22	13,32	13,42	13,52
5 Pengeluaran per kapita disesuaikan	Ribu Rupiah	11.000	11.100	11.200	11.300	11.400

Misi 4

Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan

Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
1 Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan pengelolaan lingkungan hidup	Kabupaten/Kota	1	2	3	4	5
2 Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan pengelolaan sampah	Kabupaten/Kota	1	2	3	4	5
3 Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan pengelolaan limbah B3	Kabupaten/Kota	1	2	3	4	5

Misi 5

Meningkatkan kualitas pemerintahan yang baik, akuntabel, dan melayani

Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
1 Persentase Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Predikat	PREDIKAT	PREDIKAT	PREDIKAT	PREDIKAT	PREDIKAT
2 Capaian Indikator sesuai yang ditetapkan (Level)	Nilai	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Misi 6

Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Rata-rata kualitas lingkungan hidup	Indeks	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Sasaran Misi 1

Sasaran Misi 2

Sasaran Misi 3

Sasaran Misi 4

Sasaran Misi 5

Sasaran Misi 6

PROGRAM

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

Program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Indikator Program	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Pelaksanaan Program Lingkungan Hidup yang Terlaksana	%	100	100	100	100	100
Anggaran Tahun 2025	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2026	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2027	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2028	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2029	Rp 1.000.000.000,00					

Kegiatan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH Provinsi)

Indikator Kinerja	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	1	1	1	1
Anggaran Tahun 2025	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2026	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2027	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2028	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2029	Rp 1.000.000.000,00					

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH Provinsi)

Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	1
Anggaran Tahun 2025	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2026	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2027	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2028	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2029	Rp 1.000.000.000,00					

Kegiatan Pemeliharaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Indikator Kinerja	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Pemenuhan Baku Mutu Air Sungai	%	47,00	48,00	49,00	50,00	51,00
Anggaran Tahun 2025	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2026	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2027	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2028	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2029	Rp 1.000.000.000,00					

Sub Kegiatan Pengawasan Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH

Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Pengawasan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	Dokumen	1	1	1	1	1
Anggaran Tahun 2025	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2026	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2027	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2028	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2029	Rp 1.000.000.000,00					

Sub Kegiatan Pengawasan Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Persyaratan Administratif dan Baku Mutu Air Limbah

Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Pengawasan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Persyaratan Administratif dan Baku Mutu Air Limbah	Dokumen	1	1	1	1	1
Anggaran Tahun 2025	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2026	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2027	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2028	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2029	Rp 1.000.000.000,00					

Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut

Indikator Kinerja	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut	%	100	100	100	100	100
Anggaran Tahun 2025	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2026	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2027	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2028	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2029	Rp 1.000.000.000,00					

Sub Kegiatan Pengendalian dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan laut

Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Pengendalian dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan laut	Dokumen	1	1	1	1	1
Anggaran Tahun 2025	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2026	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2027	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2028	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2029	Rp 1.000.000.000,00					

Kegiatan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Indikator Kinerja	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Pengelolaan Ekosistem Gambut	%	19,3	19,8	20,8	21,8	22,8
Anggaran Tahun 2025	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2026	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2027	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2028	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2029	Rp 1.000.000.000,00					

Sub Kegiatan Pengendalian dan pemulihan Ekosistem Gambut

Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Pengendalian dan pemulihan Ekosistem Gambut	Dokumen	1	1	1	1	1
Anggaran Tahun 2025	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2026	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2027	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2028	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2029	Rp 1.000.000.000,00					

Kegiatan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial

Indikator Kinerja	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial	%	100	100	100	100	100
Anggaran Tahun 2025	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2026	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2027	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2028	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2029	Rp 1.000.000.000,00					

Sub Kegiatan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial

Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial	Dokumen	1	1	1	1	1
Anggaran Tahun 2025	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2026	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2027	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2028	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2029	Rp 1.000.000.000,00					

Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Indikator Kinerja	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	%	100	100	100	100	100
Anggaran Tahun 2025	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2026	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2027	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2028	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2029	Rp 1.000.000.000,00					

Sub Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dokumen	1	1	1	1	1
Anggaran Tahun 2025	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2026	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2027	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2028	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2029	Rp 1.000.000.000,00					

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Indikator Program	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	%	100	100	100	100	100
Anggaran Tahun 2025	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2026	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2027	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2028	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2029	Rp 1.000.000.000,00					

Kegiatan Pengendalian Pencemaran Air dan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Indikator Kinerja	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kabupaten/Kota	1	2	3	4	5
Anggaran Tahun 2025	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2026	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2027	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2028	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2029	Rp 1.000.000.000,00					

Sub Kegiatan Pengawasan Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Peraturan Perundang-undangan Pengendalian Pencemaran Air

Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Pengawasan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Peraturan Perundang-undangan Pengendalian Pencemaran Air	Dokumen	1	1	1	1	1
Anggaran Tahun 2025	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2026	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2027	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2028	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2029	Rp 1.000.000.000,00					

Sub Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik Provinsi

Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Pengelolaan Air Limbah Domestik	Dokumen	1	1	1	1	1
Anggaran Tahun 2025	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2026	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2027	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2028	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2029	Rp 1.000.000.000,00					

Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berasal dari Kegiatan Usaha Pertambangan

Indikator Kinerja	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berasal dari Kegiatan Usaha Pertambangan	%	100	100	100	100	100
Anggaran Tahun 2025	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2026	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2027	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2028	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2029	Rp 1.000.000.000,00					

Sub Kegiatan Pengawasan Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Peraturan Perundang-undangan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berasal dari Kegiatan Usaha Pertambangan

Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Pengawasan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Peraturan Perundang-undangan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berasal dari Kegiatan Usaha Pertambangan	Dokumen	1	1	1	1	1
Anggaran Tahun 2025	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2026	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2027	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2028	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2029	Rp 1.000.000.000,00					

Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Pengelolaan Sampah Perkotaan

Indikator Kinerja	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Pengelolaan Sampah Perkotaan	%	100	100	100	100	100
Anggaran Tahun 2025	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2026	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2027	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2028	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2029	Rp 1.000.000.000,00					

Sub Kegiatan Pengawasan Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Sampah Perkotaan

Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Pengawasan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Sampah Perkotaan	Dokumen	1	1	1	1	1
Anggaran Tahun 2025	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2026	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2027	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2028	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2029	Rp 1.000.000.000,00					

Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Pengelolaan Limbah B3

Indikator Kinerja	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Pengelolaan Limbah B3	%	100	100	100	100	100
Anggaran Tahun 2025	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2026	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2027	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2028	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2029	Rp 1.000.000.000,00					

Sub Kegiatan Pengawasan Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Limbah B3

Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Pengawasan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Limbah B3	Dokumen	1	1	1	1	1
Anggaran Tahun 2025	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2026	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2027	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2028	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2029	Rp 1.000.000.000,00					

Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Pengelolaan Limbah Non B3

Indikator Kinerja	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Pengelolaan Limbah Non B3	%	100	100	100	100	100
Anggaran Tahun 2025	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2026	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2027	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2028	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2029	Rp 1.000.000.000,00					

Sub Kegiatan Pengawasan Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Limbah Non B3

Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Pengawasan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Limbah Non B3	Dokumen	1	1	1	1	1
Anggaran Tahun 2025	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2026	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2027	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2028	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2029	Rp 1.000.000.000,00					

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Indikator Program	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Kehati	%	19,3	19,8	20,8	21,8	22,8
Anggaran Tahun 2025	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2026	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2027	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2028	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2029	Rp 1.000.000.000,00					

Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Indikator Kinerja	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Dokumen Perencanaan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dokumen	1	1	1	1	1
Anggaran Tahun 2025	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2026	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2027	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2028	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2029	Rp 1.000.000.000,00					

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Dokumen Perencanaan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	1
Anggaran Tahun 2025	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2026	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2027	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2028	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2029	Rp 1.000.000.000,00					

Kegiatan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial

Indikator Kinerja	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial	%	100	100	100	100	100
Anggaran Tahun 2025	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2026	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2027	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2028	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2029	Rp 1.000.000.000,00					

Sub Kegiatan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial

Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial	Dokumen	1	1	1	1	1
Anggaran Tahun 2025	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2026	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2027	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2028	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2029	Rp 1.000.000.000,00					

Kegiatan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial

Indikator Kinerja	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial	%	100	100	100	100	100
Anggaran Tahun 2025	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2026	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2027	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2028	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2029	Rp 1.000.000.000,00					

Sub Kegiatan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial

Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial	Dokumen	1	1	1	1	1
Anggaran Tahun 2025	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2026	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2027	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2028	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2029	Rp 1.000.000.000,00					

Program Pengelolaan Sumber Daya Alam

Indikator Program	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Pengelolaan Sumber Daya Alam	%	100	100	100	100	100
Anggaran Tahun 2025	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2026	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2027	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2028	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2029	Rp 1.000.000.000,00					

Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Tertentu

Indikator Kinerja	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Pengelolaan Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Tertentu	%	100	100	100	100	100
Anggaran Tahun 2025	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2026	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2027	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2028	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2029	Rp 1.000.000.000,00					

Sub Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Tertentu

Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Pengelolaan Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Tertentu	Dokumen	1	1	1	1	1
Anggaran Tahun 2025	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2026	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2027	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2028	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2029	Rp 1.000.000.000,00					

Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Tertentu Pengelolaan Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Tertentu

Indikator Kinerja	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Pengelolaan Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Tertentu	%	100	100	100	100	100
Anggaran Tahun 2025	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2026	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2027	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2028	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2029	Rp 1.000.000.000,00					

Sub Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Tertentu Pengelolaan Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Tertentu

Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Pengelolaan Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Tertentu Pengelolaan Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Tertentu	Dokumen	1	1	1	1	1
Anggaran Tahun 2025	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2026	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2027	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2028	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2029	Rp 1.000.000.000,00					

Program Pengelolaan Ekosistem Gambut

Indikator Program	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Pengelolaan Ekosistem Gambut	%	19,3	19,8	20,8	21,8	22,8
Anggaran Tahun 2025	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2026	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2027	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2028	Rp 1.000.000.000,00					
Anggaran Tahun 2029	Rp 1.000.000.000,00					

Kegiatan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Indikator Kinerja	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Pengelolaan Ekosistem Gambut	%	19,3	19,8	20,8	21,8

CROSSCUTTING
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TAHUN 2025-2029

CROSSCUTTING DLH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

ANTAR BIDANG–BIDANG DALAM PENCAPAIAN TUJUAN TAHUN 2025–2029

Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Meningkatnya upaya pengendalian dan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

Meningkatnya pengelolaan sampah dan Limbah B3

Meningkatnya ketaatan penanggung jawab usaha terhadap perijinan lingkungan dan penyelesaian sengketa/dugaan pidana

BIDANG TATA LINGKUNGAN

- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
- Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi

Program Perencanaan Lingkungan Hidup

- Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

- Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

- Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Masyarakat

Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

- Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
- Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Terkait dengan PPLH

Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

- Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi

BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

- Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Program Pengelolaan Sampah

- Penanganan Sampah di TPA / TPST Regional

Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

- Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

- Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi

CROSSCUTTING DINAS LINGKUNGAN HIDUP

LINTAS OPD TAHUN 2025–2029

- **Bapperida**
  - **Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, (integrasi isu lingkungan hidup ke dalam RPJMD, RKPD, serta pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan)**
- **Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas TPHP**
  - **Pengelolaan kawasan hutan, tata kelola lahan, serta pengendalian alih fungsi lahan yang berdampak pada kualitas lingkungan, tutupan hutan, dan ekosistem gambut.**
  - **Pengelolaan bidang tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan**
- **Dinas ESDM**
  - **Pengawasan kegiatan pertambangan, reklamasi pasca tambang, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas eksploitasi sumber daya alam**
- **DPMPTSP**
  - **Pengelolaan perumusan, perizinan dan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu**
- **Dinas PUPR**
  - **Pengelolaan tata ruang, infrastruktur pengendalian banjir, serta penyusunan rencana tata ruang yang berwawasan lingkungan dan berorientasi pada daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup**
- **Dinas Kesehatan**
  - **Pengelolaan limbah medis dan B3, termasuk peningkatan kapasitas fasilitas pemusnahan limbah yang terbatas di Kalimantan Tengah**
- **Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran**
  - **Penanganan bencana lingkungan akibat perubahan hidrometeorologi, seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor**
- **Satpol PP dan Dinas Perhubungan**
  - **Penegakkan hukum daerah terkait ketertiban lingkungan, serta mendukung pengendalian emisi kendaraan bermotor yang memengaruhi kualitas udara**
- **Dinas Pendidikan**
  - **Program pendidikan lingkungan hidup, pengembangan sekolah adiwiyata, serta peningkatan kesadaran pelajar dan masyarakat dalam pelestarian lingkungan**

CROSSCUTTING DINAS LINGKUNGAN HIDUP

LINTAS OPD TAHUN 2025-2029

- **BKAD**
  - **Penyusunan rencana anggaran PD**
  - **Pengelolaan perbendaharaan PD**
  - **Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan PD**
- **Inspektorat**
  - **Perumusan Kebijakan**
  - **Pendampingan dan Asistensi**
  - **Penyelenggaraan Pengawasan**
  - **Evaluasi SAKIP**
- **BKD**
  - **Administrasi kepegawaian**
- **Bappedalitbang**
  - **Penyusunan dokumen perencanaan PD**
- **Sekretariat Daerah**
  - **Kebijakan bidang Hukum**
  - **Kebijakan perekonomian dan pembangunan**
  - **LPPD/LKPJ**
  - **Pengadaan barang dan jasa**
- **Diskominfosantik**
  - **Pengelola informasi dan dokumentasi**

CATATAN HASIL REVIU
RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERIODE 2025-2029

INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Disusun Oleh/Tanggal	NOVELIN ELLY VESSA,SE / 9 September 2025 (Anggota Tim)
	Direviu Oleh/Tanggal	BETSIANY, S. Hut/ 9 September 2025 (Ketua Tim)
	Direviu Oleh/Tanggal	YULIANTI T.T. ASANG, S.T., CGRM/ 10 September 2025 (Pengendali Teknis)

Uraian Catatan Hasil Reviu **)

Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 700/048/SPT/IRBAN-II/INSP tanggal 26 Agustus 2025 untuk melaksanakan reviu atas Rancangan Akhir RENSTRA PD Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2025-2029, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:

DATA UMUM

Tujuan : Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Sasaran :
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
- Meningkatnya ketaatan penanggung jawab usaha terhadap perijinan lingkungan dan penyelesaian sengketa/dugaan pidana
- Meningkatnya pengelolaan sampah dan limbah B3
- Meningkatnya upaya pengendalian dan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

A. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra PD Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **86** catatan yang selaras dan **0** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.

B. Keterhubungan Kinerja, Indikator, dan target kinerja rancangan akhir renstra PD tahun 2025-2029 (IKU Perangkat daerah dan IKK bagi perangkat daerah pemangku urusan)

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **15** catatan yang selaras dan **0** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.

Hasil konfirmasi tertulis tim reviu dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah bahwa indikator sudah sesuai dengan SIPD Pemutahiran, dimana SIPD Pemutahiran merupakan kinerja outcome yang merupakan hasil/bagian pemetaan dan pemutahiran dari Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, sehingga indikator tersebut sudah selaras dengan standarisasi kinerja yang diatur secara ketentuan yang berlaku. Sebagai bagian integrasi dari SIPD maka inputan dari RPJMD/RENSTRA pada SIPD sudah menggunakan indikator kinerja dari SIPD. Link SIPD pemutakiran : https://sipd-ri.kemendagri.go.id/pemutakhiran

C. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, subkegiatan rancangan akhir Renstra PD tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029

1. Konsistensi dan Keterhubungan Program Prioritas pada RPJMD dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **3** catatan yang selaras dan **0** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.

   Pada saat pelaksanaan reviu data tidak disajikan (KKR 3 pereviu "data tidak ditemukan") pada aplikasi e-Reviu sehingga disusun secara manual (file *excel*) oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah. Pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah menjadi salah satu pengampu program prioritas daerah (Program Prioritas Huma Betang) selanjutnya hal tersebut diturunkan pada rancangan akhir renstra sebagai berikut:

No.	RPJMD	Rancangan Akhir Renstra PD
	Program Prioritas Daerah (Huma Betang)	**Program**
A	**BETANG HARMONI**	
1	Bantuan Provinsi untuk Kab/Kota Rp 150 Milyar	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
		2.11.11.1.01 - Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
		2.11.11.1.01.0012 - Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional
2	Rp 250 Juta Stimulus Desa	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.03.1.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup
		2.11.03.1.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
		2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH
		2.11.07.1.02 - Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
		2.11.07.1.02.0001 - Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
3	Layanan Cepat Tanggap Kebakaran Lahan dan Bantuan Warga	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.03.1.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		2.11.03.1.02.0001 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

2. Konsistensi dan Keterhubungan Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **11** catatan yang selaras dan **0** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.

D. Kesesuaian antara target kinerja Ranhir Renstra PD tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja renstra PD periode 2020-2024.

1. Keselarasan Penetapan Target IKU dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya;
   Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **1** catatan yang selaras dan **0** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.

2. Keselarasan Penetapan Target IKD dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya.
   Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **5** catatan yang selaras dan **9** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.

   Hasil konfirmasi tertulis tim reviu dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk indikator yang tidak selaras dengan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya antara lain:
   - Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya
   - Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
   - Persentase RTH
   - Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya
   - Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)
   - Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti
   - Persentase Limbah B3 yang Terkelola

   dikarenakan pada Renstra periode sebelumnya (2021-2026), 7 indikator di atas tidak ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD), sedangkan periode Renstra 2025-2029 indikator mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra 2025-2029 sehingga dalam dokumen Renstra tidak terdapat data target dan baseline periode sebelumnya.

   Disarankan untuk ketidakselarasan penetapan target IKD dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya ditambahkan penjelasan pada dokumen Renstra Tahun 2025-2029.

E. Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **37** catatan yang selaras dan **62** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.

Hal ini disebabkan karena pertanggal reviu berjenjang yang dilakukan oleh tim pada aplikasi e-reviu belum tercantum informasi mengenai satuan target, serta data DSSD tahun 2024, sehingga tim reviu menyatakan ***tidak selaras*.**

Hasil konfirmasi tertulis tim reviu dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah terkait ketiadaan data DSSD dan satuan pada aplikasi e-ReviuSIPD, bahwa telah melakukan penginputan DSSD Tahun 2022-2024 sebagaimana screenshoot terlampir.

Setelah dilakukan pengujian Penetapan Target Subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah pada aplikasi e-Reviu dan DSSD pada web Walidata dinyatakan **37** catatan yang selaras dan **62** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam KKR 7 terlampir.

Dari **62** catatan yang tidak selaras dikarenakan nilai target dan satuan pada Renstra PD T0-T5 dengan data Nilai Target dan Satuan pada aplikasi e-Walidata / DSSD berbeda, sehingga menjadi tidak selaras. (catatan terlampir). Seharusnya dalam menetapkan target sub kegiatan T0-T5 pada periode Renstra 2025-2029 minimal menyesuaikan dengan target Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) tahun sebelumnya (Tahun 2022-2024)

Disarankan agar :

1. Berkoordinasi dengan dinas terkait untuk perbaikan data target Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) agar dapat terintegrasi dengan aplikasi e-Reviu-Perencanaan
2. Dalam menetapkan target sub kegiatan T0-T5 pada periode Renstra 2025-2029 minimal menyesuaikan dengan target Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) tahun sebelumnya (Tahun 2022-2024).

Tanggapan :

Menerima hasil evaluasi Inspektorat untuk memperhatikan penetapan target sub kegiatan T0-T5 pada periode Renstra 2025-2029 dengan menyesuaikan target Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) tahun sebelumnya (Tahun 2022-2024) dan melakukan koordinasi dengan dinas terkait agar DSSD dapat terintegrasi dengan aplikasi e-Reviu-Perencanaan.

Palangka Raya, 12 September 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah,

JONI HARTA, SE., S.Hut., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19760602 200501 1 010

Pengendali Teknis,

YULIANTI T.T. ASANG, S.T., CGRM
Pembina
NIP. 19760415 200604 2 022

KETERHUBUNGAN DAN KESESUAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN DENGAN TUJUAN, DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU PERTUMBUHAN KINERJA URUSAN DAERAH YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB PERANGKAT DALAM RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERIODE 2025 - 2029

PERANGKAT DAERAH:

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMEND
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
1	Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	- Pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
2						2.11.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
3						2.11.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
4						2.11.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomenda -

Dokumen ini dicetak dari SIPD | E-Reviu pada: 04/09/2025

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMEND
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
5						2.11.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
6						2.11.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
7						2.11.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
8						2.11.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
9						2.11.01.1.01.0012 Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Berita Acara	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
10					2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.11.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
11						2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
12						2.11.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Selaras		Catatan -	Rekomenda -

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMEND
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
						Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					
13					2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.11.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
14						2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
15					2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.11.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
16						2.11.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
17						2.11.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
18						2.11.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
19					2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
20						2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Selaras		Catatan -	Rekomenda -

Dokumen ini dicetak dari SIPD | E-Reviu pada: 04/09/2025

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMEND
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
21						2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
22						2.11.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
23						2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
24						2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
25						2.11.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
26					2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.11.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
27						2.11.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
28						2.11.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
29						2.11.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
30					2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang	2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Selaras		Catatan -	Rekomenda -

Dokumen ini dicetak dari SIPD | E-Reviu pada: 04/09/2025

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMEND
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
31					Urusan Pemerintahan Daerah	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
32						2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
33					2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
34						2.11.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
35						2.11.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
36		Meningkatnya upaya pengendalian dan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	- Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	2.11.02.1.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
37						2.11.02.1.01.0003 Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH	Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
38						2.11.02.1.01.0005 Penetapan RPPLH Provinsi	Dokumen RPPLH Provinsi yang ditetapkan	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
39					2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan	2.11.02.1.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomenda -

Dokumen ini dicetak dari SIPD | E-Reviu pada: 04/09/2025

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMEND
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
40					Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	2.11.02.1.02.0009 Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
41			- Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	2.11.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
42						2.11.03.1.01.0004 Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Paket	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
43						2.11.03.1.01.0005 Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	Laporan	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
44						2.11.03.1.01.0008 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	laporan	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
45						2.11.03.1.01.0009 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Lokasi	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
46						2.11.03.1.01.0010 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	Kegiatan	Selaras		Catatan -	Rekomenda -

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMEND
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
47						2.11.03.1.01.0011 Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
48						2.11.03.1.01.0012 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
49						2.11.03.1.01.0013 Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Unit	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
50						2.11.03.1.01.0014 Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan	Unit	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
51						2.11.03.1.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
52						2.11.03.1.01.0016 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	Laporan	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
53						2.11.03.1.01.0018 Penyusunan Kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Jumlah dokumen kebijakan terkait Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
54					2.11.03.1.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau	2.11.03.1.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas	Laporan	Selaras		Catatan -	Rekomenda -

Dokumen ini dicetak dari SIPD | E-Reviu pada: 04/09/2025

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMEND
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
					Kerusakan Lingkungan Hidup	Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan					
55			- Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	2.11.04.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
56						2.11.04.1.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Ha	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
57						2.11.04.1.01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Orang	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
58						2.11.04.1.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
59						2.11.04.1.01.0008 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Unit	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
60						2.11.04.1.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Unit	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
61			- Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang	2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	2.11.07.1.01 Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	2.11.07.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomenda -

Dokumen ini dicetak dari SIPD | E-Reviu pada: 04/09/2025

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMEND
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
62			terkait dengan PPLH		2.11.07.1.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	2.11.07.1.02.0001 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
63			- Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	2.11.08.1.01.0003 Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	Orang	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
64						2.11.08.1.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Lembaga	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
65						2.11.08.1.01.0007 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah pembinaan dan pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomenda -

Dokumen ini dicetak dari SIPD | E-Reviu pada: 04/09/2025

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMEND
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
66			- Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.09.1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	2.11.09.1.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
67		Meningkatnya pengelolaan sampah dan limbah B3	- Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.11.05.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
68						2.11.05.1.01.0003 Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha	Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis Pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
69						2.11.05.1.01.0004 Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala provinsi	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi yang dilakukan	Usaha	Selaras		Catatan -	Rekomenda -

Dokumen ini dicetak dari SIPD | E-Reviu pada: 04/09/2025

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMEND
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
70			- Meningkatnya tata kelola persampahan	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	2.11.11.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
71						2.11.11.1.01.0009 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
72						2.11.11.1.01.0011 Pengelolaan sampah Regional	Jumlah sampah regional yang dikelola	Ton	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
73						2.11.11.1.01.0012 Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Unit	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
74						2.11.11.1.01.0014 Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
75						2.11.11.1.01.0015 Pelaksanaan Penanganan Sampah Spesifik atau pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah tonase Sampah Spesifik atau pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani	Ton	Selaras		Catatan -	Rekomenda -

Dokumen ini dicetak dari SIPD | E-Reviu pada: 04/09/2025

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMEND
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
76		Meningkatnya ketaatan penanggung jawab usaha terhadap perijinan lingkungan dan penyelesaian sengketa/dugaan pidana	- Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	2.11.06.1.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
77						2.11.06.1.01.0005 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
78						2.11.06.1.01.0007 Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	Orang	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
79						2.11.06.1.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Usaha/Kegiatan	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
80						2.11.06.1.01.0010 Layanan Sarana Prasarana Penegakan Hukum bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Sarana Prasarana yang disediakan untuk Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Dampak Lingkungan dan PPNS untuk menunjang Kinerja Penegakan Hukum	Unit	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
81			- Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	2.11.10.1.01.0005 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Perkara	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
82						2.11.10.1.01.0006 Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	Perkara	Selaras		Catatan -	Rekomenda -

Dokumen ini dicetak dari SIPD | E-Reviu pada: 04/09/2025

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMEND
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
83					Hidup (PPLH) Provinsi	2.11.10.1.01.0009 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ditangani	Pengaduan	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
84						2.11.10.1.01.0010 Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	Sanksi	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
85						2.11.10.1.01.0011 Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang	Selaras		Catatan -	Rekomenda -
86						2.11.10.1.01.0012 Pengembangan Kapasitas SDM bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Orang	Selaras		Catatan -	Rekomenda -

KETERHUBUNGAN KINERJA, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA DALAM RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERIODE 2025 - 2029

PERANGKAT DAERAH:

BIDANG URUSAN YANG DIAMPU:

1.

2.

3.

NO	INDIKATOR	SATUAN	IKU/IKD PERANGKAT DAERAH	SUMBER (TUJUAN/SASARAN/PROGRAM)	REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
					SELARAS	TIDAK SELARAS		
1	Indeks Kualitas Air	Indeks	IKD	SASARAN	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
2	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	IKD	PROGRAM	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
3	Indeks kualitas lingkungan hidup	Angka	IKU	TUJUAN	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
4	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase	IKD	PROGRAM	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
5	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	poin	IKD	PROGRAM	Selaras		Catatan	Rekomendasi

Dokumen ini dicetak dari SIPD | E-Reviu pada: 04/09/2025

NO	INDIKATOR	SATUAN	IKU/IKD PERANGKAT DAERAH	SUMBER (TUJUAN/SASARAN/PROGRAM)	REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
					SELARAS	TIDAK SELARAS		
	(IKPS)						-	-
6	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi	%	IKD	SASARAN	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
7	Indeks Kualitas Udara	Indeks	IKD	SASARAN	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
8	Persentase RTH	Persentase	IKD	PROGRAM	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
9	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Persentase	IKD	SASARAN	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
10	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	IKD	SASARAN	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
11	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase	IKD	PROGRAM	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
12	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persentase	IKD	PROGRAM	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
13	Indeks kualitas lingkungan hidup	Angka	IKD	TUJUAN	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
14	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam	Persentase	IKD	PROGRAM	Selaras		Catatan	Rekomendasi

Dokumen ini dicetak dari SIPD | E-Reviu pada: 04/09/2025

NO	INDIKATOR	SATUAN	IKU/IKD PERANGKAT DAERAH	SUMBER (TUJUAN/SASARAN/PROGRAM)	REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
					SELARAS	TIDAK SELARAS		
	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						-	-
15	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Ton	IKD	SASARAN	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -

Dokumen ini dicetak dari SIPD | E-Reviu pada: 04/09/2025

No.	RPJMD	Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025	Rancangan Akhir Renstra PD	Unit	Reviu APIP	Rekomendasi
	Program Prioritas Daerah (Huma Betang)	Program	Program		Aksi	
A	**BETANG HARMONI**					
1	Bantuan Provinsi untuk Kab/Kota Rp 150 Milyar	Program Pengelolaan Persampahan	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 2.11.11.1.01 - Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 2.11.11.1.01.0012 - Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	Selaras	
2	Rp 250 Juta Stimulus Desa	Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.1.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup 2.11.03.1.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	Selaras	
		Porgram Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Terkait Dengan PPLH	2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH 2.11.07.1.02 - Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH 2.11.07.1.02.0001 - Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	Selaras	
3	Layanan Cepat Tanggap Kebakaran Lahan dan Bantuan Warga	Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.1.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2.11.03.1.02.0001 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	Selaras	

KONSISTENSI DAN KETERHUBUNGAN ANTARA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN DENGAN DALAM RANCANGAN AKHIR RENSTRA 2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH PADA RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERIODE 2025 - 2029

PERANGKAT DAERAH:

URUSAN YANG DIAMPU:

1

2

3

NO	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	UNIT	REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
				SELARAS	TIDAK SELARAS		
1	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI(Non Prioritas)	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
2	2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP(Non Prioritas)	2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
3	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP(Non Prioritas)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
4	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)(Non Prioritas)	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -

Dokumen ini dicetak dari SIPD | E-Reviu pada: 04/09/2025

NO	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	UNIT	REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
				SELARAS	TIDAK SELARAS		
5	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)(Non Prioritas)	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
6	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)(Non Prioritas)	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
7	2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH(Non Prioritas)	2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
8	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT(Non Prioritas)	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
9	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT(Non Prioritas)	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
10	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP(Non Prioritas)	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
11	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN(Non Prioritas)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -

Dokumen ini dicetak dari SIPD | E-Reviu pada: 04/09/2025

KESESUAIAN ANTARA TARGET KINERJA RANCANGAN AKHIR RENSTRA DENGAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI HASIL CAPAIAN KINERJA PERIODE SEBELUMNYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERIODE 2025 - 2029

NO	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	IKU YANG TERSEDIA PADA RENSTRA 2025 - 2029	SATUAN	PERIODE TAHUN SEBELUMNYA				RENSTRA T0 - T5							HASIL REVIU			
				BASELINE	TARGET TAHUN TERAKHIR	CAPAIAN TAHUN TERAKHIR	PERSENTASE CAPAIN KINERJA (%)	BASELINE	TARGET						CATATAN		CATATAN	REKOMENDASI
									T0	T1	T2	T3	T4	T5	SELARAS	TIDAK SELARAS		
1	2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Angka	74.8	74.53	74.8	10036.227022675432%	74.80	76.34	76.51	76.68	76.84	77.01	77.18	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -

Dokumen ini dicetak dari SIPD | E-Reviu pada: 09/09/2025

6. Keselarasan Penetapan Target IKD dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya

No	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	IKU YANG TERSEDIA PADA RENSTRA 2025 - 2029	SATUAN	PERIODE TAHUN SEBELUMNYA				RENSTRA T0 - T5							HASIL REVIU	
				BASELINE	TARGET TAHUN TERAKHIR	CAPAIAN TAHUN TERAKHIR	PERSENTASE CAPAIN KINERJA (%)	BASELINE	TARGET						CATATAN	REKOMENDASI
									T0	T1	T2	T3	T4	T5	AKSI	
1	2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Indeks	90,39	87,34	92,71	106,1483856	92,71	78.44	78.64	78.84	79.04	79.24	79.44	selaras	-
2	2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	-	-	45	-	45	50	55	60	65	70	75	tidak selaras	CATATAN : Pada periode sebelumnya, tidak ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD), sedangkan periode Renstra 2025-2029 indikator mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra 2025-2029 sehingga dalam dokumen Renstra tidak terdapat Data target,dan baseline periode sebelumnya . Data capaian diperoleh dari bidang-bidang
																REKOMENDASI :Menambahkan penjelasan pada Renstra Periode 2025-2029 maupun dokumen terkait lainnya bahwa terhadap indikator yang tidak selaras dikarenakan tidak ditetapkan sebagai indikator kinerja pada Renstra periode sebelumnya dan periode Renstra 2025-2029 indikator mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra 2025-2029
3	2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase	-	-	45	-	45	50	60	65	70	75	80	tidak selaras	CATATAN : Pada periode sebelumnya, tidak ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD), sedangkan periode Renstra 2025-2029 indikator mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra 2025-2029 sehingga dalam dokumen Renstra tidak terdapat Data target,dan baseline periode sebelumnya . Data capaian diperoleh dari bidang-bidang
																REKOMENDASI :Menambahkan penjelasan pada Renstra Periode 2025-2029 maupun dokumen terkait lainnya bahwa terhadap indikator yang tidak selaras dikarenakan tidak ditetapkan sebagai indikator kinerja pada Renstra periode sebelumnya dan periode Renstra 2025-2029 indikator mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra 2025-2029

4	2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Ton	17868,47	18090,12	29184,81	161,3301073	29184.81	29300	29420	29540	29660	29780	29900	selaras	
5	2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup	Persentase RTH	Persentase	-	-	0,235	-	92.71	78.44	78.64	78.84	79.04	79.24	79.44	tidak selaras	CATATAN : Pada periode sebelumnya, tidak ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD), sedangkan periode Renstra 2025-2029 indikator mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra 2025-2029 sehingga dalam dokumen Renstra tidak terdapat Data target,dan baseline periode sebelumnya . Data capaian diperoleh dari bidang-bidang
																REKOMENDASI :Menambahkan penjelasan pada Renstra Periode 2025-2029 maupun dokumen terkait lainnya bahwa terhadap indikator yang tidak selaras dikarenakan tidak ditetapkan sebagai indikator kinerja pada Renstra periode sebelumnya dan periode Renstra 2025-2029 indikator mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra 2025-2029
6	2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	tidak selaras	CATATAN : Pada periode sebelumnya, tidak ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD), sedangkan periode Renstra 2025-2029 indikator mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra 2025-2029 sehingga dalam dokumen Renstra tidak terdapat Data target,dan baseline periode sebelumnya . Data capaian diperoleh dari bidang-bidang
																REKOMENDASI :Menambahkan penjelasan pada Renstra Periode 2025-2029 maupun dokumen terkait lainnya bahwa terhadap indikator yang tidak selaras dikarenakan tidak ditetapkan sebagai indikator kinerja pada Renstra periode sebelumnya dan periode Renstra 2025-2029 indikator mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra 2025-2029
7	2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	-	-	31,06	-	31.06	43	45	47	49	51	53	tidak selaras	CATATAN : Pada periode sebelumnya, tidak ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD), sedangkan periode Renstra 2025-2029 indikator mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra 2025-2029 sehingga dalam dokumen Renstra tidak terdapat Data target,dan baseline periode sebelumnya . Data capaian diperoleh dari bidang-bidang

																REKOMENDASI :Menambahkan penjelasan pada Renstra Periode 2025-2029 maupun dokumen terkait lainnya bahwa terhadap indikator yang tidak selaras dikarenakan tidak ditetapkan sebagai indikator kinerja pada Renstra periode sebelumnya dan periode Renstra 2025-2029 indikator mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra 2025-2029
8	2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	75,43	74,99	75,38	100,5200693	75.38	83.96	84.03	84.1	84.17	84.24	84.31	selaras	
9	2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup	Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persentase	-	-	75	-	75	75	76	77	78	79	80	tidak selaras	CATATAN : Pada periode sebelumnya, tidak ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD), sedangkan periode Renstra 2025-2029 indikator mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra 2025-2029 sehingga dalam dokumen Renstra tidak terdapat Data target,dan baseline periode sebelumnya . Data capaian diperoleh dari bidang-bidang
																REKOMENDASI :Menambahkan penjelasan pada Renstra Periode 2025-2029 maupun dokumen terkait lainnya bahwa terhadap indikator yang tidak selaras dikarenakan tidak ditetapkan sebagai indikator kinerja pada Renstra periode sebelumnya dan periode Renstra 2025-2029 indikator mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra 2025-2029
10	2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi	%	68,75	77	12,68	16,46753247	12.68	15	17	19	21	23	25	selaras	-
11	2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Angka	75,11	74,53	74,8	100,3622702	74.80	76,34	76.51	76.68	76.84	77.01	77.18	selaras	-
12	2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase	100	86	100	116,2790698	100	65	70	75	80	85	90	selaras	-
13	2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks	55,34	59,7	52,13	87,319933	52,13	70.45	70.65	70.85	71.05	71.25	71.45	selaras	-
14	2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Persentase	-	-	99,944	-	99.944	99.946	99.948	99.950	99.952	99.954	99.956	tidak selaras	CATATAN : Pada periode sebelumnya, tidak ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD), sedangkan periode Renstra 2025-2029 indikator mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra 2025-2029 sehingga dalam dokumen Renstra tidak terdapat Data target,dan baseline periode sebelumnya . Data capaian diperoleh dari bidang-bidang

																REKOMENDASI :Menambahkan penjelasan pada Renstra Periode 2025-2029 maupun dokumen terkait lainnya bahwa terhadap indikator yang tidak selaras dikarenakan tidak ditetapkan sebagai indikator kinerja pada Renstra periode sebelumnya dan periode Renstra 2025-2029 indikator mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra 2025-2029

7 tidak
7 selaras

KESESUAIAN DAN PEMANFAATAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH
DALAM SUB KEGIATAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PERIODE 2025 - 2029
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025 - 2029

Perangkat Daerah: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Bidang Urusan:
1.
2.
3.

NO	BIDANG URUSAN	RENSTRA PD											DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)					HASIL REVIU			
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024	CATATAN		CATATAN	REKOMENDASI
							T0	T1	T2	T3	T4	T5						SELARAS	TIDAK SELARAS		
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	2	2	2	2	2	2	Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		1	0		Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
2													Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang diNilai kinerjanya dalam rangka PPLH		1	0		Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
3		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah di TPA TPST Regional		0	0		Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
4													Timbulan Sampah Harian		1345.77	0			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target dan Satuan pada Renstra PD T0 1 Dokumen, sedangkan nilai pada Target dan Satuan pada DSSD 1339.22 Ton	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target dan satuan pada SDDS yang telah di input. SDDS 1339.22 Ton
5													Timbulan Sampah Tahunan		491204.69	0			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target dan Satuan pada Renstra PD T0 1 Dokumen, sedangkan nilai.	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target dan

Dokumen ini dicetak dari SIPD | E-Reviu pada: 15/09/2025

NO	BIDANG URUSAN	RENSTRA PD											DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)					HASIL REVIU			
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024	CATATAN		CATATAN	REKOMENDASI
							T0	T1	T2	T3	T4	T5						SELARAS	TIDAK SELARAS		
																				pada Target dan Satuan pada DSSD 488816.61 Ton	satuan pada SDDS yang telah di input. Pada SDDS 488816.61 Ton.
6				Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota yang direview		1	0		Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
7				Pengelolaan sampah Regional	Jumlah sampah regional yang dikelola	Ton	866.03	1050	1050	1050	1050	1050	Volume sampah regional yang dikelola		0	0		Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
8													Timbulan Sampah Harian		1345.77	0			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target pada Renstra PD T0 866.03 Ton , sedangkan nilai Target pada DSSD 1339.22 Ton.	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target pada SDDS yang telah di input. SDDS 1339.22 Ton
9													Timbulan Sampah Tahunan		491204.69	0			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target pada Renstra PD T0 866.03 Ton , sedangkan nilai Target pada DSSD 488816.61 Ton	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target pada SDDS yang telah di input. SDDS 488816.61 Ton.
10				Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Unit	1	40	40	45	45	50	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional yang tersedia		0	0			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target pada Renstra PD T0 1 unit sedangkan nilai Target pada DSSD 0 Unit.	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target pada SDDS yang telah di input. SDDS 0 Unit.
11													Timbulan Sampah Harian		1345.77	0			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target pada Renstra PD T0 1 unit , sedangkan nilai Target pada DSSD 1339.22 Ton	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target pada SDDS yang telah di input. SDDS 1339.22 Ton.
12				Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Jumlah Laporan hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota		1	0			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target pada Renstra PD T0 1 dokumen sedangkan nilai Target pada DSSD 14 Dokumen.	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target pada SDDS yang telah di input. SDDS 14 Dokumen.

NO	BIDANG URUSAN	RENSTRA PD											DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)					HASIL REVIU			
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024	CATATAN		CATATAN	REKOMENDASI
							T0	T1	T2	T3	T4	T5						SELARAS	TIDAK SELARAS		
13				Pelaksanaan Penanganan Sampah Spesifik atau pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah tonase Sampah Spesifik atau pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani	Ton	0	50	50	50	50	50	Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani		0	0		Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
14		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi										Data keanekaragaman hayati di wilayah provinsi		1	0		Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
15				Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen	1	2	2	2	2	2	Dokumen rencana Induk pengelolaan kehati yang disusun		0	0		Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
16				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Ha	1	0	1	1	1	1	RTH yang dikelola lingkup kewenangan provinsi		0	1			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target dan Satuan pada Renstra PD T0 1 Ha, sedangkan nilai pada Target dan Satuan pada DSSD 0 Unit.	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target dan satuan pada SDDS yang telah di input. SDDS 0 Unit.
17													Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan provinsi		0	0,065			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target pada Renstra PD T0 1 Ha, sedangkan nilai pada Target dan Satuan pada DSSD 0 Ha.	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target dan satuan pada SDDS yang telah di input. DSSD target 0 Ha.
18				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Orang	50	100	100	100	110	110	Kelompok masyarakat yang mengikuti Kegiatan pembinaan		1	0			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target dan Satuan pada Renstra PD T0 50 Orang, sedangkan nilai pada Target dan Satuan pada DSSD 0 Unit.	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target dan satuan pada SDDS yang telah di input. DSSD target 1 Kelompok.
19				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit	0	0	1	1	1	1	Sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola		0	0		Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
20				Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Unit	0	0	1	1	1	1	Taman kehati di luar kawasan hutan yang		0	0		Selaras		Catatan -	Rekomendasi -

Dokumen ini dicetak dari SIPD | E-Reviu pada: 15/09/2025

NO	BIDANG URUSAN	RENSTRA PD											DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)					HASIL REVIU			
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024	CATATAN		CATATAN	REKOMENDASI
							T0	T1	T2	T3	T4	T5						SELARAS	TIDAK SELARAS		
													dikelola lingkup kewenangan provinsi								
21													Luasan taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan provinsi		0	0		Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
22				Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Unit	0	0	1	1	1	1	Taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan provinsi		0	0		Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
23													Luasan taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan provinsi		0	0		Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
24		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Data pengelolaan limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan kewenangan pemerintah di wilayah provinsi		3	0		Selaras		Catatan -	Rekomendasi -.
25													Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan		2	0			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target pada Renstra PD T0 1 Dokumen, sedangkan nilai pada Target dan Satuan pada DSSD target 2 dokumen.	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target dan satuan pada SDDS yang telah di input. DSSD target 2 dokumen.
26				Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha	Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis Pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha	Dokumen	1	1	0	0	0	0	Persetujuan Teknis pengumpulan limbah B3 sesuai kewenangannya yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan		1	0			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target pada Renstra PD T0 1 Dokumen, sedangkan nilai pada Target dan Satuan pada DSSD target 0 dokumen..	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target dan satuan pada SDDS yang telah di input. DSSD target 0 dokumen.
27				Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala provinsi	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi yang dilakukan	Usaha	0	12	12	12	12	12	Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan sesuai dengan kewenangannya		1	0			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target pada Renstra PD T0 0 usaha, sedangkan nilai pada Target dan Satuan pada DSSD target 3 Usaha.	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target dan satuan pada SDDS yang telah di input. DSSD target 3 usaha.
28		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	Dokumen	2	3	2	2	2	2	Permohonan kelayakan lingkungan hidup		23	0			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target pada Renstra PD T0 2 dokumen, sedangkan nilai pada Target dan Satuan pada DSSD target 113 dokumen.	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target dan satuan pada SDDS yang telah di input. DSSD target 113 dokumen.

NO	BIDANG URUSAN	RENSTRA PD											DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)					HASIL REVIU			
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024	CATATAN		CATATAN	REKOMENDASI
							T0	T1	T2	T3	T4	T5						SELARAS	TIDAK SELARAS		
		IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pemerintah Daerah Provinsi																		
29													Persetujuan lingkungan hidup		10	0			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target pada Renstra PD T0 2 dokumen, sedangkan nilai pada Target dan Satuan pada DSSD target 109 dokumen.	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target dan satuan pada SDDS yang telah di input. DSSD target 109 dokumen.
30				Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	5	5	5	5	5	5	PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas		1	0		Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
31													PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHD		-	-		Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
32													Jumlah PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHD		5	0		Selaras		Catatan -	Rekomendasi -.
33													Jumlah PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas		5	0		Selaras		Catatan -.	Rekomendasi -
34				Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	Orang	9	5	5	5	5	5	PPLHD Eksisting		5	0			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target pada Renstra PD T0 9 orang, sedangkan nilai pada Target dan Satuan pada DSSD target 5 orang	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target dan satuan pada SDDS yang telah di input. DSSD target 5 orang
35													PPLHD yang dibutuhkan		20	0			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target pada Renstra PD T0 9 orang, sedangkan nilai pada Target dan Satuan pada DSSD target 20 orang	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target dan satuan pada SDDS yang telah di input. DSSD target 20 orang

Dokumen ini dicetak dari SIPD | E-Reviu pada: 15/09/2025

NO	BIDANG URUSAN	RENSTRA PD											DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)					HASIL REVIU			
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024	CATATAN		CATATAN	REKOMENDASI
							T0	T1	T2	T3	T4	T5						SELARAS	TIDAK SELARAS		
36													Jumlah PPLHD Eksisting		5	0			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target pada Renstra PD T0 9 orang, sedangkan nilai pada Target dan Satuan pada DSSD target 5 orang	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target dan satuan pada SDDS yang telah di input. DSSD target 5 orang
37													Jumlah PPLHD yang dibutuhkan		20	0			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target Nilai Target pada Renstra PD T0 9 orang, sedangkan nilai pada Target dan Satuan pada DSSD target 20 orang	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target dan satuan pada SDDS yang telah di input. DSSD target 20 orang
38				Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Usaha/Kegiatan	162	162	170	178	186	194	Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan Pemprov		10	0			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target dan Satuan pada Renstra PD T0 162 usaha/ kegiatan, sedangkan nilai pada Target dan Satuan pada DSSD target 109 Izin.	Rekomendasi Agar pengisian Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target dan satuan pada SDDS yang telah di input. DSSD target 109 Izin.
39				Layanan Sarana Prasarana Penegakan Hukum bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Sarana Prasarana yang disediakan untuk Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Dampak Lingkungan dan PPNS untuk menunjang Kinerja Penegakan Hukum	Unit	0	1	1	1	1	1	Jumlah sarana dan prasarana Existing penegakan hukum bidang lingkungan hidup		0	0			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target pada Renstra PD T0 0 Unit, sedangkan nilai pada Target dan Satuan pada DSSD target 5 Unit	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target dan satuan pada SDDS yang telah di input. DSSD target 5 unit
40													Jumlah PPLHD eksisting yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan peningatan kapasitas sesuai dengan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas Lingkungan yang diusulkan		0	0		Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
41		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Kelompok MHA yang terkait dengan PPLH		0	0		Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
42													Laporan Hasil Koordinasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH		1	0		Selaras		Catatan -	Rekomendasi -

NO	BIDANG URUSAN	RENSTRA PD											DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)					HASIL REVIU			
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024	CATATAN		CATATAN	REKOMENDASI
							T0	T1	T2	T3	T4	T5						SELARAS	TIDAK SELARAS		
43			Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan		0	0			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target pada Renstra PD T0 1 dokumen, sedangkan nilai pada Target dan Satuan pada DSSD target 2 Dokumen.	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target dan satuan pada SDDS yang telah di input. DSSD target 2 Dokumen.
44													Kelompok MHA yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan dalam rangka PPLH		0	0		Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
45		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	Orang	60	230	250	270	290	310	Masyarakat/kelompok Masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang dilakukan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup		60	0		Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
46													Laporan hasil Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi		1	1			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target dan Satuan pada Renstra PD T0 60 orang sedangkan nilai pada Target dan Satuan pada DSSD target 1 dokumen	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target dan satuan pada SDDS yang telah di input. DSSD target 1 dokumen
47				Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Lembaga	2	1	1	1	1	1	Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala provinsi eksisting		0	0			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target pada Renstra PD T0 2 lembaga sedangkan nilai pada Target pada DSSD target 0 lembaga	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target pada SDDS yang telah di input. DSSD target target 0 lembaga
48													Lembaga /kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup		1	0			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target pada Renstra PD T0 2 lembaga sedangkan nilai pada Target pada DSSD target 1 llembaga	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target pada SDDS yang telah di input. DSSD target target 1 lembaga
49													Jumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala provinsi eksisting		0	0			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target pada Renstra PD T0 2 lembaga sedangkan nilai pada Target pada DSSD target 0 llembaga	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target pada SDDS yang telah di input. DSSD target target 0 lembaga

Dokumen ini dicetak dari SIPD | E-Reviu pada: 15/09/2025

NO	BIDANG URUSAN	RENSTRA PD											DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)					HASIL REVIU			
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024	CATATAN		CATATAN	REKOMENDASI
							T0	T1	T2	T3	T4	T5						SELARAS	TIDAK SELARAS		
50													Jumlah lembaga/kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup		0	0			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target pada Renstra PD T0 2 lembaga sedangkan nilai pada Target pada DSSD target 1 llembaga	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target pada SDDS yang telah di input. DSSD target 1 lembaga
51													Jumlah orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup		40	0			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target dan satuan pada Renstra PD T0 2 lembaga sedangkan nilai pada Target dan satuan pada DSSD target 12 orang	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target dan satuan pada SDDS yang telah di input. DSSD target 12 orang
52													Jumlah lembaga pendidikan formal yang telah mengikuti pembinaan teknis terkait Gerakan PBLHS serta memenuhi indikator jenjang penilaian Gerakan PBLHS		28	0			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target pada Renstra PD T0 2 lembaga sedangkan nilai pada Target pada DSSD target target 8 sekolah	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target pada SDDS yang telah di input. DSSD target target target 8 sekolah
53				Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah pembinaan dan pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Lembaga /kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup		1	0		Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
54		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Perkara	1	1	1	1	1	1	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan		3	0			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target dan satuan pada Renstra PD T0 1 perkara sedangkan nilai pada Target dan satuan pada DSSD target 0 dokumen	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target dan satuan pada SDDS yang telah di input. DSSD target 0 dokumen
55													Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi		4	0			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target pada Renstra PD T0 1 perkara sedangkan nilai pada Target dan satuan pada DSSD target 6 perkara	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target pada SDDS yang telah di input. DSSD target 6 perkara
56				Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	Perkara	1	1	1	1	1	1	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi		0	0			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target pada Renstra PD T0 1 perkara sedangkan nilai pada Target dan satuan pada DSSD target 0 perkara	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target pada SDDS yang telah di input. DSSD target 0 perkara

Dokumen ini dicetak dari SIPD | E-Reviu pada: 15/09/2025

NO	BIDANG URUSAN	RENSTRA PD											DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)					HASIL REVIU			
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024	CATATAN		CATATAN	REKOMENDASI
							T0	T1	T2	T3	T4	T5						SELARAS	TIDAK SELARAS		
57				Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ditangani	Pengaduan	8	8	8	8	8	8	Jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani		4	0			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target pada Renstra PD T0 8 pengaduan sedangkan nilai pada Target dan satuan pada DSSD target 6 pengaduan	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target pada SDDS yang telah di input. DSSD target 6 pengaduan
58				Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	Sanksi	1	1	1	1	1	1	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangannya		3	0		Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
59				Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang	12	12	12	12	12	12	Data Jumlah Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup		0	0		Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
60				Pengembangan Kapasitas SDM bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Orang	0	30	30	30	30	30	Jumlah SDM Eksisting yang mempunyai Standar Kompetensi penyelesaian sengketa lingkungan hidup		0	0			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target pada Renstra PD T0 0 orang sedangkan nilai pada Target pada DSSD target 15 orang	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target pada SDDS yang telah di input. DSSD target 15 orang
61		PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Dokumen DIKPLHD		-	-			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target pada Renstra PD T0 1 dokumen sedangkan nilai pada Target pada DSSD target 0 dokumen	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target pada SDDS yang telah di input. DSSD target 0 dokumen
62													Kebijakan/data informasi terkait RPPLH		1	0			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target pada Renstra PD T0 1 dokumen sedangkan nilai pada Target pada DSSD target 14 dokumen	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target pada SDDS yang telah di input. DSSD target 14 dokumen
63													Dokumen Pelaporan Pelaksanaan RPPLH Provinsi		1	1		Selaras		Catatan -	Rekomendasi -

Dokumen ini dicetak dari SIPD | E-Reviu pada: 15/09/2025

NO	BIDANG URUSAN	RENSTRA PD											DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)					HASIL REVIU			
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024	CATATAN		CATATAN	REKOMENDASI
							T0	T1	T2	T3	T4	T5						SELARAS	TIDAK SELARAS		
64				Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH	Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan	Dokumen	1	0	1	1	1	0	Dokumen rencana/kajian RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarst		0	0			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target pada Renstra PD T0 1 dokumen sedangkan nilai pada Target pada DSSD target 0 dokumen	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target pada SDDS yang telah di input. DSSD target 0 dokumen
65				Penetapan RPPLH Provinsi	Dokumen RPPLH Provinsi yang ditetapkan	Dokumen	0	1	0	0	0	0	Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH untuk 30 Tahun		1	0			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target pada Renstra PD T0 0 dokumen sedangkan nilai pada Target pada DSSD target 1 dokumen	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target pada SDDS yang telah di input. DSSD target 1 dokumen
66													Jumlah Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH untuk 30 Tahun		1	0			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target pada Renstra PD T0 0 dokumen sedangkan nilai pada Target pada DSSD target 1 dokumen	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target pada SDDS yang telah di input. DSSD target 1 dokumen
67			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	Dokumen	0	0	0	0	1	0	Data Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan		1	0			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target dan satuan pada Renstra PD T0 0 dokumen sedangkan nilai pada Target dan satuan pada DSSD target 7 laporan	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target dan satuan pada SDDS yang telah di input. DSSD target 7 laporan
68													Data Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan		1	0			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target dan satuan pada Renstra PD T0 0 dokumen sedangkan nilai pada Target dan satuan pada DSSD target 9 laporan	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target dan satuan pada SDDS yang telah di input. DSSD target 9 laporan
69													Data Hasil Penjaminan Kualitas KLHS RPJMD		-	-		Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
70													Data hasil Validasi KLHS RPJMD		7	0			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target dan satuan pada Renstra PD T0 0 dokumen sedangkan nilai pada Target dan satuan pada DSSD target 1 laporan	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target dan satuan pada SDDS yang telah di input. DSSD target 1 laporan

NO	BIDANG URUSAN	RENSTRA PD											DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)					HASIL REVIU			
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024	CATATAN		CATATAN	REKOMENDASI
							T0	T1	T2	T3	T4	T5						SELARAS	TIDAK SELARAS		
71													Data hasil matriks integrasi/penelaahan KLHS ke dalam RPJMD		1	0			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target dan satuan pada Renstra PD T0 0 dokumen sedangkan nilai pada Target dan satuan pada DSSD target 1 laporan	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target dan satuan pada SDDS yang telah di input. DSSD target 1 laporan
72													Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi)		1	0			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target dan satuan pada Renstra PD T0 0 dokumen sedangkan nilai pada Target dan satuan pada DSSD target 20 laporan	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target dan satuan pada SDDS yang telah di input. DSSD target 20 laporan
73				Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota	Dokumen	6	7	7	7	7	7	Data kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan, penilaian, dan evaluasi		-	-		Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
74													Data dokumen KLHS Kabupaten/Kota yang dilakukan pembinaan, penilaian dan evaluasi		7	0			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target dan satuan pada Renstra PD T0 6 dokumen sedangkan nilai pada Target dan satuan pada DSSD target 20 laporan	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target dan satuan pada SDDS yang telah di input. DSSD target 20 laporan
75		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	1	3	3	3	3	3	Informasi Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dipublikasikan kepada Masyarakat		1	0			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target dan satuan pada Renstra PD T0 1 laporan sedangkan nilai pada Target dan satuan pada DSSD target 1 publikasi	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target dan satuan pada SDDS yang telah di input. DSSD target 1 publikasi
76													Laporan pelaksanaan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada masyarakat		1	0			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target dan satuan pada Renstra PD T0 1 laporan sedangkan nilai pada Target dan satuan pada DSSD target 1 dokumen	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target dan satuan pada SDDS yang telah di input. DSSD target 1 dokumen
77			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan		1	0		Selaras		Catatan -	Rekomendasi -

NO	BIDANG URUSAN	RENSTRA PD											DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)					HASIL REVIU			
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024	CATATAN		CATATAN	REKOMENDASI
							T0	T1	T2	T3	T4	T5						SELARAS	TIDAK SELARAS		
													Iklim yang menjadi kewenangan Provinsi								
78													Laporan kegiatan inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan Provinsi di 5 sektor		1	0		Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
79													Lokasi Proklim yang dibina oleh Provinsi		0	0			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target dan satuan pada Renstra PD T0 1 dokumen sedangkan nilai pada Target dan satuan pada DSSD target 47 lokasi	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target dan satuan pada SDDS yang telah di input. DSSD target 47 lokasi
80				Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Paket	1	105	105	105	105	105	Jumlah data contoh uji		0	0			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target dan satuan pada Renstra PD T0 1 paket sedangkan nilai pada Target dan satuan pada DSSD target 34 data	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target dan satuan pada SDDS yang telah di input. DSSD target 34 data
81													Jumlah data pengujian parameter kualitas lingkungan		0	0			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target dan satuan pada Renstra PD T0 1 paket sedangkan nilai pada Target dan satuan pada DSSD target 29 data	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target dan satuan pada SDDS yang telah di input. DSSD target 29 data
82													Jumlah dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup		0	0			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target dan satuan pada Renstra PD T0 1 paket sedangkan nilai pada Target dan satuan pada DSSD target 20 dokumen	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target dan satuan pada SDDS yang telah di input. DSSD target 20 dokumen
83				Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	Laporan	1	1	1	1	1	1	Jumlah Laporan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi		1	0			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target dan satuan pada Renstra PD T0 1 laporan sedangkan nilai pada Target dan satuan pada DSSD target 1 dokumen	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target dan satuan pada SDDS yang telah di input. DSSD target 1 dokumen

Dokumen ini dicetak dari SIPD | E-Reviu pada: 15/09/2025

NO	BIDANG URUSAN	RENSTRA PD											DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)					HASIL REVIU			
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024	CATATAN		CATATAN	REKOMENDASI
							T0	T1	T2	T3	T4	T5						SELARAS	TIDAK SELARAS		
84				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	laporan	2	3	3	3	3	3	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		0	0			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target dan satuan pada Renstra PD T0 2 laporan sedangkan nilai pada Target dan satuan pada DSSD target 1 dokumen	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target dan satuan pada SDDS yang telah di input. DSSD target 1 dokumen
85				Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Lokasi	12	39	39	39	39	39	Titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut)		13	0			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target dan satuan pada Renstra PD T0 12 lokasi sedangkan nilai pada Target dan satuan pada DSSD target 17 titik	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target dan satuan pada SDDS yang telah di input. DSSD target 17 titik
86													Jumlah titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut)		13	0			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target dan satuan pada Renstra PD T0 12 lokasi sedangkan nilai pada Target dan satuan pada DSSD target 29 titik	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target dan satuan pada SDDS yang telah di input. DSSD target 29 titik
87													Nilai IKA, IKU, IKTL, IKAL, IKLH (n-1)		75.11	0			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target dan satuan pada Renstra PD T0 12 lokasi sedangkan nilai pada Target dan satuan pada DSSD target 75,17 poin	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target dan satuan pada SDDS yang telah di input. DSSD target 75,17 poin
88				Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	Kegiatan	0	5	5	5	5	5	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		1	1			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target dan satuan pada Renstra PD T0 0 kegiatan sedangkan nilai pada Target dan satuan pada DSSD target 1 dokumen	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target dan satuan pada SDDS yang telah di input. DSSD target 1 dokumen
89				Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan provinsi		1	0		Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
90				Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Tersusunnya dokumen IKLH		1	0		Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
91																					

NO	BIDANG URUSAN	RENSTRA PD											DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)					HASIL REVIU			
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024	CATATAN		CATATAN	REKOMENDASI
							T0	T1	T2	T3	T4	T5						SELARAS	TIDAK SELARAS		
													Tersusunnya dokumen IKPLHD		1	0		Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
92													Tersusunnya dokumen SLHD		1	0		Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
93				Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Unit	15	44	40	35	30	25	Jumlah sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan di provinsi		0	0			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target pada Renstra PD T0 15 unit sedangkan nilai pada Target dan satuan pada DSSD target 180 unit	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target pada SDDS yang telah di input. DSSD target 180 unit
94				Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	1	1	1	1	1	Jumlah alat pemantau kualitas lingkungan di provinsi yang beroperasi dan terpelihara		1	0		Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
95				Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen	60	65	70	75	80	85	Data contoh uji		-	-			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target dan satuan pada Renstra PD T0 60 dokumen sedangkan nilai pada Target dan satuan pada DSSD target 0 data	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target dan satuan pada SDDS yang telah di input. DSSD target 0 data
96													Data pengujian parameter kualitas lingkungan		0	0			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target dan satuan pada Renstra PD T0 60 dokumen sedangkan nilai pada Target dan satuan pada DSSD target 20 data	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target dan satuan pada SDDS yang telah di input. DSSD target 20 data
97													Dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup		0	0			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target dan satuan pada Renstra PD T0 60 dokumen sedangkan nilai pada Target dan satuan pada DSSD target 20 data	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target dan satuan pada SDDS yang telah di input. DSSD target 20 data
98				Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	Laporan	0	1	1	1	1	1	Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya		0	0			Tidak Selaras	Catatan Nilai Target pada Renstra PD T0 1 laporan sedangkan nilai pada Target dan satuan pada DSSD target 0 laporan	Rekomendasi Agar penyusunan dokumen Renstra menyesuaikan data target dan satuan pada SDDS yang telah di input. DSSD target 0 laporan

NO	BIDANG URUSAN	RENSTRA PD											DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)					HASIL REVIU			
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024	CATATAN		CATATAN	REKOMENDASI
							T0	T1	T2	T3	T4	T5						SELARAS	TIDAK SELARAS		
99				Penyusunan Kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Jumlah dokumen kebijakan terkait Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen	0	1	1	1	1	1	Data dokumen kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya		1	0		Selaras		Catatan -	Rekomendasi -

Dokumen ini dicetak dari SIPD | E-Reviu pada: 15/09/2025

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Williem A.S No. 08, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon / Faksimile (0536) 3223756, Laman http://www.dlh.kalteng.go.id, Pos-el dlh@kalteng.go.id

TANGGAPAN TERHADAP CATATAN HASIL REVIU RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERIODE 2025-2029

1. Keterhubungan dan Kesesuaian Program, Kegiatan dan Subkegiatan dengan Tujuan, dan Sasaran Perangkat Daerah dan/atau Pertumbuhan Kinerja Urusan Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat dalam Rancangan Akhir Renstra PD Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2025 – 2029

   Tanggapan Perangkat Daerah : Sesuai

2. Keterhubungan Kinerja, Indikator dan Target Kinerja dalam Rancangan Akhir Renstra PD Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2025 – 2029

   Tanggapan Perangkat Daerah *:*

   Poin 15 Indikator Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang dengan catatan Indikator Kinerja Perangkat Daerah tidak sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra 2025-2029 Bidang Urusan Lingkungan Hidup.

   Terkait dengan hal tersebut bahwa indikator di atas sudah sesuai dengan SIPD Pemutahiran, dimana SIPD Pemutahiran merupakan kinerja outcome yang merupakan hasil/bagian pemetaan dan pemutahiran dari Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, sehingga indikator tersebut sudah selaras dengan standarisasi kinerja yang diatur secara ketentuan yang berlaku. Sebagai bagian integrasi dari SIPD maka inputan dari RPJMD/RENSTRA pada SIPD sudah menggunakan indikator kinerja dari SIPD. Link SIPD pemutakiran : https://sipd-ri.kemendagri.go.id/pemutakhiran

3. Konsistensi dan Keterhubungan Antara Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan Dalam Rancangan Akhir Renstra 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Dengan Program Prioritas Daerah Pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2025 – 2029

   Tanggapan Perangkat Daerah : Sesuai

4. Kesesuaian Antara Target Kinerja Rancangan Akhir Renstra Dengan Pengendalian Dan Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Periode Sebelumnya Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2025 – 2029

   Tanggapan Perangkat Daerah : Sesuai

5. Keselarasan Penetapan Target IKD dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya

   Tanggapan Perangkat Daerah :

   a. Berdasarkan hasil reviu terdapat 7 indikator yang tidak selaras yaitu :
      - Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya
      - Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
      - Persentase RTH
      - Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya

- Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)
- Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti
- Persentase Limbah B3 yang Terkelola

Hal ini dikarenakan pada Renstra periode sebelumnya (2021-2026), 7 indikator di atas tidak ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD), sedangkan periode Renstra 2025-2029 indikator mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra 2025-2029 sehingga dalam dokumen Renstra tidak terdapat Data target dan baseline periode sebelumnya .

Terkait dengan hal tersebut, akan diberikan catatan pada dokumen Renstra Tahun 2025-2029.

b. Terdapat 2 indikator yang juga tidak selaras yaitu :
   - Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.
   - Indeks Kualitas Lahan

   Terkait dengan 2 indikator di atas dijelaskan sesuai penjelasan pada poin 2 bahwa 2 indikator tersebut merupakan indikator pemutahiran pada SIPD.

6. Kesesuaian dan Pemanfaatan Data Statistik Sektoral Daerah Dalam Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah Periode 2025 – 2029 Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2025 – 2029

   Tanggapan Perangkat Daerah :

   Berdasarkan hasil reviu, terdapat 93 catatan yang tidak selaras dikarenakan satuan dan target 2024 pada DSSD kosong. Terkait dengan hal tersebut, pada aplikasi SIPD, kami telah melakukan penginputan DSSD sebagaimana screenshoot terlampir :

   a. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

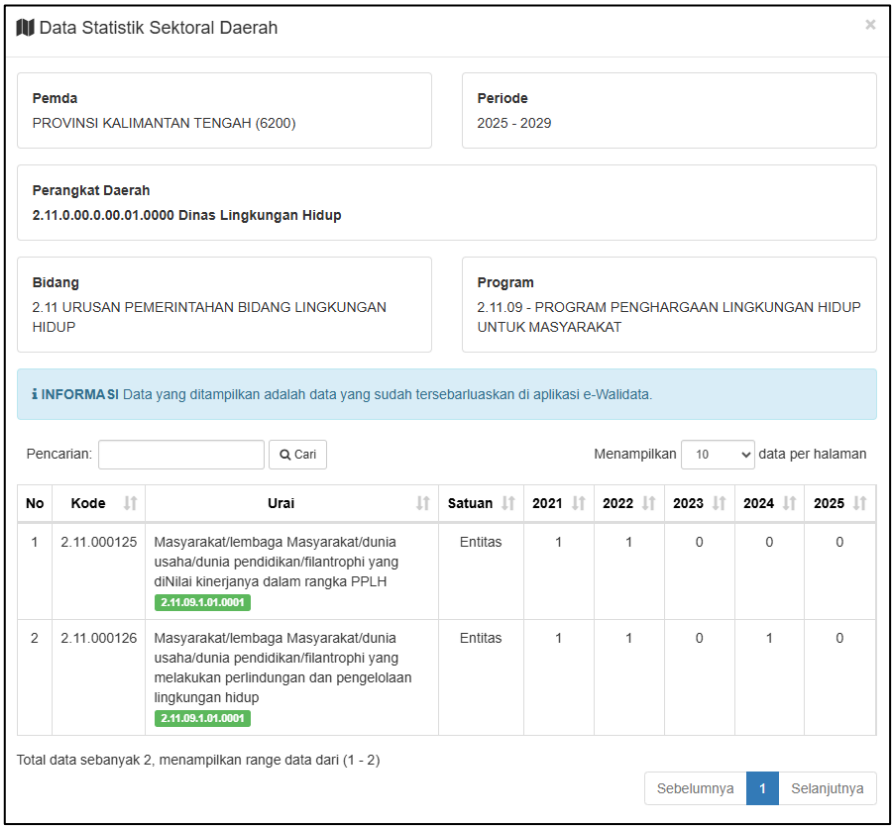

Data Statistik Sektoral Daerah

Pemda
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (6200)

Periode
2025 - 2029

Perangkat Daerah
2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Bidang
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Program
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

INFORMASI Data yang ditampilkan adalah data yang sudah tersebarluaskan di aplikasi e-Walidata.

Pencarian: Cari Menampilkan 10 data per halaman

No	Kode	Urai	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	2.11.000125	Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang diNilai kinerjanya dalam rangka PPLH 2.11.09.1.01.0001	Entitas	1	1	0	0	0
2	2.11.000126	Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 2.11.09.1.01.0001	Entitas	1	1	0	1	0

Total data sebanyak 2, menampilkan range data dari (1 - 2)

Sebelumnya 1 Selanjutnya

b. Program Pengelolaan Persampahan

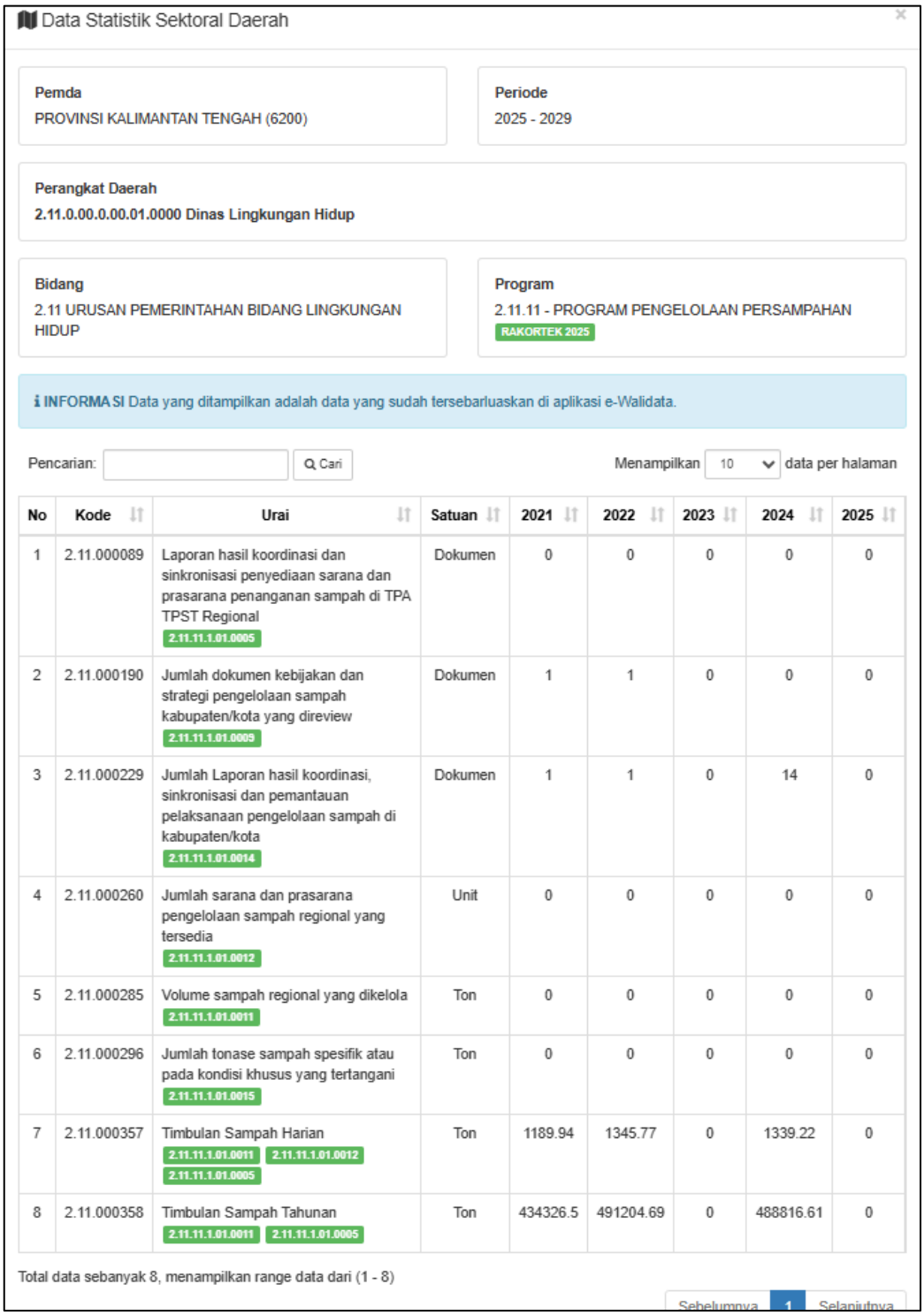

Data Statistik Sektoral Daerah

Pemda
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (6200)

Periode
2025 - 2029

Perangkat Daerah
2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Bidang
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Program
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
RAKORTEK 2025

INFORMASI Data yang ditampilkan adalah data yang sudah tersebarluaskan di aplikasi e-Walidata.

Pencarian: Cari Menampilkan 10 data per halaman

No	Kode	Urai	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	2.11.000089	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah di TPA TPST Regional 2.11.11.1.01.0005	Dokumen	0	0	0	0	0
2	2.11.000190	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota yang direview 2.11.11.1.01.0009	Dokumen	1	1	0	0	0
3	2.11.000229	Jumlah Laporan hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota 2.11.11.1.01.0014	Dokumen	1	1	0	14	0
4	2.11.000260	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional yang tersedia 2.11.11.1.01.0012	Unit	0	0	0	0	0
5	2.11.000285	Volume sampah regional yang dikelola 2.11.11.1.01.0011	Ton	0	0	0	0	0
6	2.11.000296	Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani 2.11.11.1.01.0015	Ton	0	0	0	0	0
7	2.11.000357	Timbulan Sampah Harian 2.11.11.1.01.0011 2.11.11.1.01.0012 2.11.11.1.01.0005	Ton	1189.94	1345.77	0	1339.22	0
8	2.11.000358	Timbulan Sampah Tahunan 2.11.11.1.01.0011 2.11.11.1.01.0005	Ton	434326.5	491204.69	0	488816.61	0

Total data sebanyak 8, menampilkan range data dari (1 - 8)

Sebelumnya 1 Selanjutnya

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Data Statistik Sektoral Daerah

Pemda
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (6200)

Periode
2025 - 2029

Perangkat Daerah
2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Bidang
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Program
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

INFORMASI Data yang ditampilkan adalah data yang sudah tersebarluaskan di aplikasi e-Walidata.

Pencarian: Cari

Menampilkan 10 data per halaman

No	Kode	Urai	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	2.11.000015	Data keanekaragaman hayati di wilayah provinsi 2.11.04.1.01.0001	Dokumen	0	1	0	1	0
2	2.11.000043	Dokumen rencana Induk pengelolaan kehati yang disusun 2.11.04.1.01.0001	Dokumen	0	0	0	1	0
3	2.11.000071	Kelompok masyarakat yang mengikuti Kegiatan pembinaan 2.11.04.1.01.0006	Kelompok	1	1	0	1	0
4	2.11.000119	Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan provinsi 2.11.04.1.01.0004	Ha	0	0	0,065	0	0
5	2.11.000121	Luasan taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan provinsi 2.11.04.1.01.0003	Ha	0	0	0	0	0
6	2.11.000123	Luasan taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan provinsi 2.11.04.1.01.0009	Ha	0	0	0	0	0
7	2.11.000154	RTH yang dikelola lingkup kewenangan provinsi 2.11.04.1.01.0004	Unit	0	0	1	0	0
8	2.11.000155	Sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola 2.11.04.1.01.0007	Unit	0	0	0	0	0
9	2.11.000162	Taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan provinsi 2.11.04.1.01.0003	Unit	0	0	0	0	0
10	2.11.000164	Taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan provinsi 2.11.04.1.01.0009	Unit	0	0	0	0	0

Total data sebanyak 10, menampilkan range data dari (1 - 10)

Sebelumnya 1 Selanjutnya

d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Data Statistik Sektoral Daerah

Pemda
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (6200)

Periode
2025 - 2029

Perangkat Daerah
2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Bidang
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Program
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

INFORMASI Data yang ditampilkan adalah data yang sudah tersebarluaskan di aplikasi e-Walidata.

Pencarian: Cari

Menampilkan 10 data per halaman

No	Kode	Urai	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	2.11.000017	Data pengelolaan limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan kewenangan pemerintah di wilayah provinsi 2.11.05.1.01.0002	Dokumen	3	3	0	1	0
2	2.11.000088	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan 2.11.05.1.01.0002	Dokumen	2	2	0	2	0
3	2.11.000317	Persetujuan Teknis pengumpulan limbah B3 sesuai kewenangannya yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan 2.11.05.1.01.0003	Dokumen	1	1	0	0	0
4	2.11.000342	Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan sesuai dengan kewenangannya 2.11.05.1.01.0004	Usaha	1	1	0	3	0

Total data sebanyak 4, menampilkan range data dari (1 - 4)

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Tutup

e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Data Statistik Sektoral Daerah

Pemda
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (6200)

Periode
2025 - 2029

Perangkat Daerah
2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Bidang
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Program
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

INFORMASI Data yang ditampilkan adalah data yang sudah tersebarluaskan di aplikasi e-Walidata.

Pencarian: Cari Menampilkan 10 data per halaman

No	Kode	Urai	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	2.11.000053	Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan Pemprov 2.11.06.1.01.0009	Izin	8	10	0	109	0
2	2.11.000136	Permohonan kelayakan lingkungan hidup 2.11.06.1.01.0001	Dokumen	8	23	0	113	0
3	2.11.000143	Persetujuan lingkungan hidup 2.11.06.1.01.0001	Dokumen	8	10	0	109	0
4	2.11.000146	PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHD	Orang	0	0	0	0	0
5	2.11.000147	PPLHD Eksisting 2.11.06.1.01.0007	Orang	5	5	0	5	0
6	2.11.000148	PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas 2.11.06.1.01.0005	Orang	1	1	0	5	0
7	2.11.000149	PPLHD yang dibutuhkan 2.11.06.1.01.0007	Orang	20	20	0	20	0
8	2.11.000251	Jumlah PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHD 2.11.06.1.01.0005	Orang	5	5	0	5	0
9	2.11.000252	Jumlah PPLHD Eksisting 2.11.06.1.01.0007	Orang	5	5	0	5	0
10	2.11.000253	Jumlah PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas 2.11.06.1.01.0005	Orang	5	5	0	5	0

Total data sebanyak 13, menampilkan range data dari (1 - 10)

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

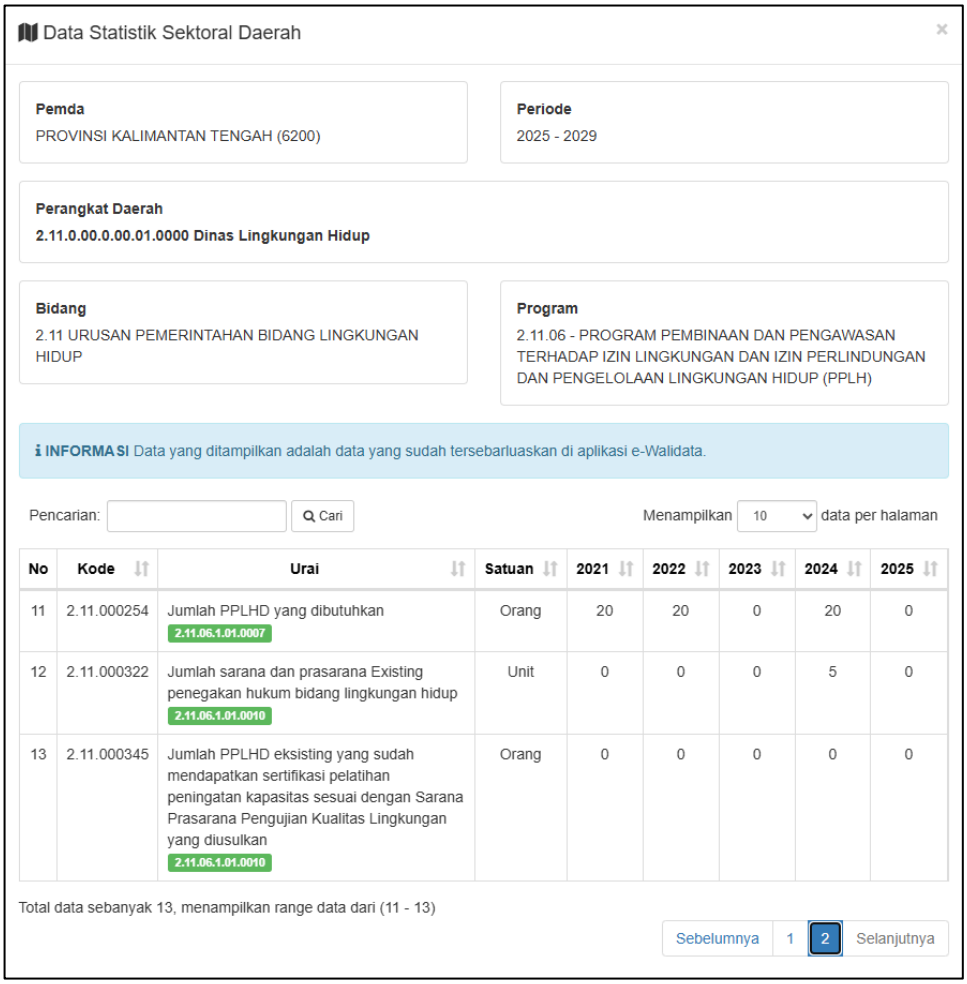

Data Statistik Sektoral Daerah

Pemda
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (6200)

Periode
2025 - 2029

Perangkat Daerah
2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Bidang
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Program
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

INFORMASI Data yang ditampilkan adalah data yang sudah tersebarluaskan di aplikasi e-Walidata.

Pencarian: Cari

Menampilkan 10 data per halaman

No	Kode	Urai	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
11	2.11.000254	Jumlah PPLHD yang dibutuhkan 2.11.06.1.01.0007	Orang	20	20	0	20	0
12	2.11.000322	Jumlah sarana dan prasarana Existing penegakan hukum bidang lingkungan hidup 2.11.06.1.01.0010	Unit	0	0	0	5	0
13	2.11.000345	Jumlah PPLHD eksisting yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan peningatan kapasitas sesuai dengan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas Lingkungan yang diusulkan 2.11.06.1.01.0010	Orang	0	0	0	0	0

Total data sebanyak 13, menampilkan range data dari (11 - 13)

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

f. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Terkait Dengan PPLH

Data Statistik Sektoral Daerah

Pemda
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (6200)

Periode
2025 - 2029

Perangkat Daerah
2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Bidang
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Program
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH

INFORMASI Data yang ditampilkan adalah data yang sudah tersebarluaskan di aplikasi e-Walidata.

Pencarian: Cari

Menampilkan 10 data per halaman

No	Kode	Urai	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	2.11.000036	Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan 2.11.07.1.02.0001	Dokumen	0	0	0	2	0
2	2.11.000072	Kelompok MHA yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan dalam rangka PPLH 2.11.07.1.02.0001	Kelompok	0	0	0	1	0
3	2.11.000074	Kelompok MHA yang terkait dengan PPLH 2.11.07.1.01.0001	Kelompok	0	0	0	1	0
4	2.11.000093	Laporan Hasil Koordinasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH 2.11.07.1.01.0001	Dokumen	1	1	0	1	0

Total data sebanyak 4, menampilkan range data dari (1 - 4)

Sebelumnya 1 Selanjutnya

g. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Data Statistik Sektoral Daerah

Pemda
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (6200)

Periode
2025 - 2029

Perangkat Daerah
2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Bidang
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Program
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

INFORMASI Data yang ditampilkan adalah data yang sudah tersebarluaskan di aplikasi e-Walidata.

Pencarian: Cari Menampilkan 10 data per halaman

No	Kode	Urai	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	2.11.000101	Laporan hasil Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi 2.11.08.1.01.0003	Dokumen	1	1	1	1	0
2	2.11.000107	Lembaga /kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup 2.11.08.1.01.0006 2.11.08.1.01.0007	Lembaga	1	1	0	1	0
3	2.11.000109	Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala provinsi eksisting 2.11.08.1.01.0005	Lembaga	0	0	0	0	0
4	2.11.000124	Masyarakat/kelompok Masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang dilakukan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup 2.11.08.1.01.0003	Orang	60	60	0	60	0
5	2.11.000239	Jumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala provinsi eksisting 2.11.08.1.01.0005	Lembaga	0	0	0	0	0
6	2.11.000240	Jumlah lembaga/kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup 2.11.08.1.01.0005	Lembaga	0	0	0	0	0
7	2.11.000246	Jumlah orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup 2.11.08.1.01.0005	Orang	40	40	0	12	0
8	2.11.000346	Jumlah lembaga pendidikan formal yang telah mengikuti pembinaan teknis terkait Gerakan PBLHS serta memenuhi indikator jenjang penilaian Gerakan PBLHS 2.11.08.1.01.0005	Sekolah	0	28	0	8	0

Total data sebanyak 8, menampilkan range data dari (1 - 8)

h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Data Statistik Sektoral Daerah

Pemda
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (6200)

Periode
2025 - 2029

Perangkat Daerah
2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Bidang
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Program
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

INFORMASI Data yang ditampilkan adalah data yang sudah tersebarluaskan di aplikasi e-Walidata.

Pencarian: Cari Menampilkan 10 data per halaman

No	Kode	Urai	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	2.11.000086	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan 2.11.10.1.01.0005	Dokumen	9	3	0	0	0
2	2.11.000194	Jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani 2.11.10.1.01.0009	Aduan	4	4	0	6	0
3	2.11.000206	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi 2.11.10.1.01.0006	Perkara	0	0	0	0	0
4	2.11.000267	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi 2.11.10.1.01.0005	Perkara	4	4	0	6	0
5	2.11.000325	Data Jumlah Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup 2.11.10.1.01.0011	Orang	0	0	0	12	0
6	2.11.000347	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangannya 2.11.10.1.01.0010	Sanksi	9	3	0	1	0
7	2.11.000348	Jumlah SDM Eksisting yang mempunyai Standar Kompetensi penyelesaian sengketa lingkungan hidup 2.11.10.1.01.0012		0	0	0	15	0

i. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Data Statistik Sektoral Daerah

Pemda
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (6200)

Periode
2025 - 2029

Perangkat Daerah
2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Bidang
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Program
2.11.02 - PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP

INFORMASI Data yang ditampilkan adalah data yang sudah tersebarluaskan di aplikasi e-Walidata.

Pencarian: Cari Menampilkan 10 data per halaman

No	Kode	Urai	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	2.11.000006	Data hasil matriks integrasi/penelaahan KLHS ke dalam RPJMD 2.11.02.1.02.0002	Laporan	1	1	0	1	0
2	2.11.000009	Data Hasil Penjaminan Kualitas KLHS RPJMD	Laporan	0	0	0	0	0
3	2.11.000013	Data hasil Validasi KLHS RPJMD 2.11.02.1.02.0002	Laporan	8	7	0	1	0
4	2.11.000019	Data Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan 2.11.02.1.02.0002	Laporan	1	1	0	7	0
5	2.11.000022	Data Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan 2.11.02.1.02.0002	Laporan	1	1	0	9	0
6	2.11.000028	Dokumen DIKPLHD	Dokumen	0	0	0	0	0
7	2.11.000040	Dokumen Pelaporan Pelaksanaan RPPLH Provinsi 2.11.02.1.01.0002	Dokumen	1	1	1	1	0
8	2.11.000042	Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH untuk 30 Tahun 2.11.02.1.01.0005	Dokumen	0	1	0	1	0
9	2.11.000062	Kebijakan/data informasi terkait RPPLH 2.11.02.1.01.0002	Dokumen	0	1	0	14	0
10	2.11.000179	Dokumen rencana/kajian RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarst 2.11.02.1.01.0003	Dokumen	0	0	0	0	0

Total data sebanyak 14, menampilkan range data dari (1 - 10)

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

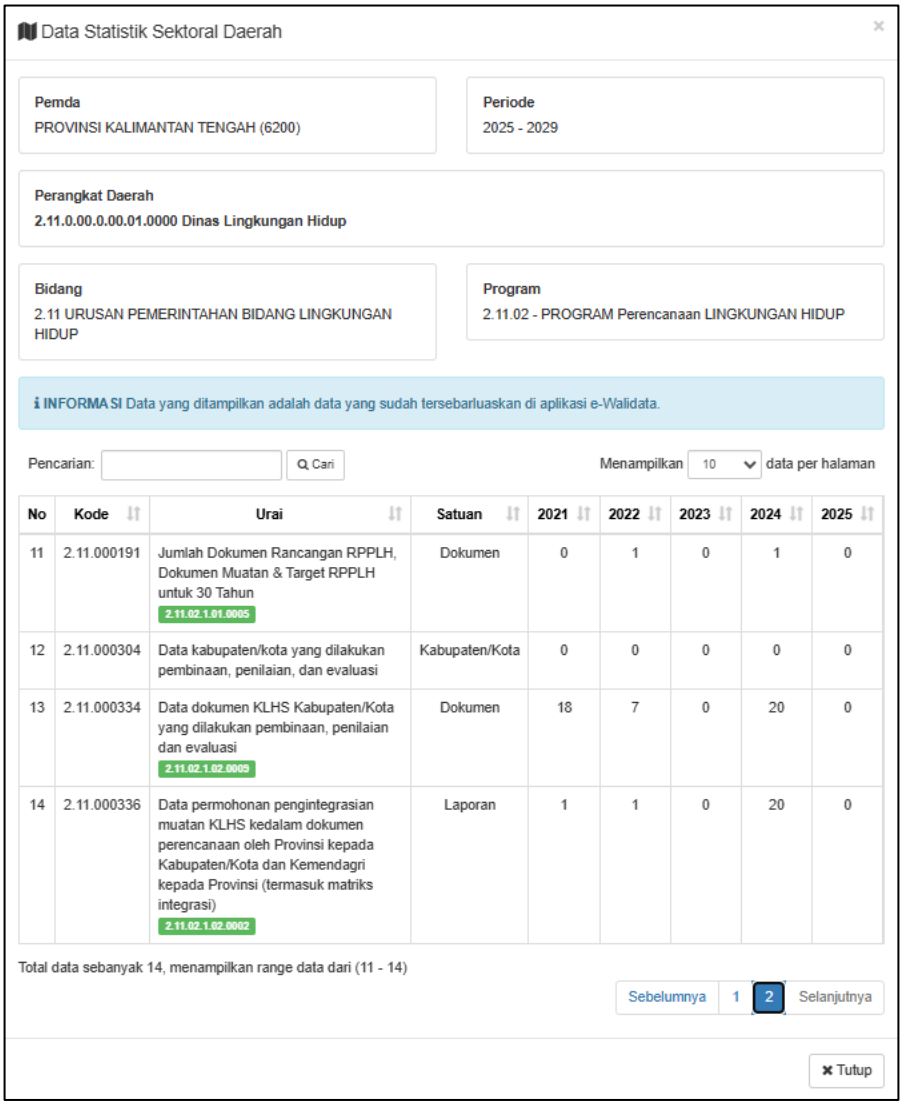

Data Statistik Sektoral Daerah

Pemda
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (6200)

Periode
2025 - 2029

Perangkat Daerah
2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Bidang
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Program
2.11.02 - PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP

INFORMASI Data yang ditampilkan adalah data yang sudah tersebarluaskan di aplikasi e-Walidata.

Pencarian: Cari

Menampilkan 10 data per halaman

No	Kode	Urai	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
11	2.11.000191	Jumlah Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH untuk 30 Tahun 2.11.02.1.01.0005	Dokumen	0	1	0	1	0
12	2.11.000304	Data kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan, penilaian, dan evaluasi	Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0
13	2.11.000334	Data dokumen KLHS Kabupaten/Kota yang dilakukan pembinaan, penilaian dan evaluasi 2.11.02.1.02.0009	Dokumen	18	7	0	20	0
14	2.11.000336	Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi) 2.11.02.1.02.0002	Laporan	1	1	0	20	0

Total data sebanyak 14, menampilkan range data dari (11 - 14)

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Tutup

j. Program Pengendalian Pencemaran Dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

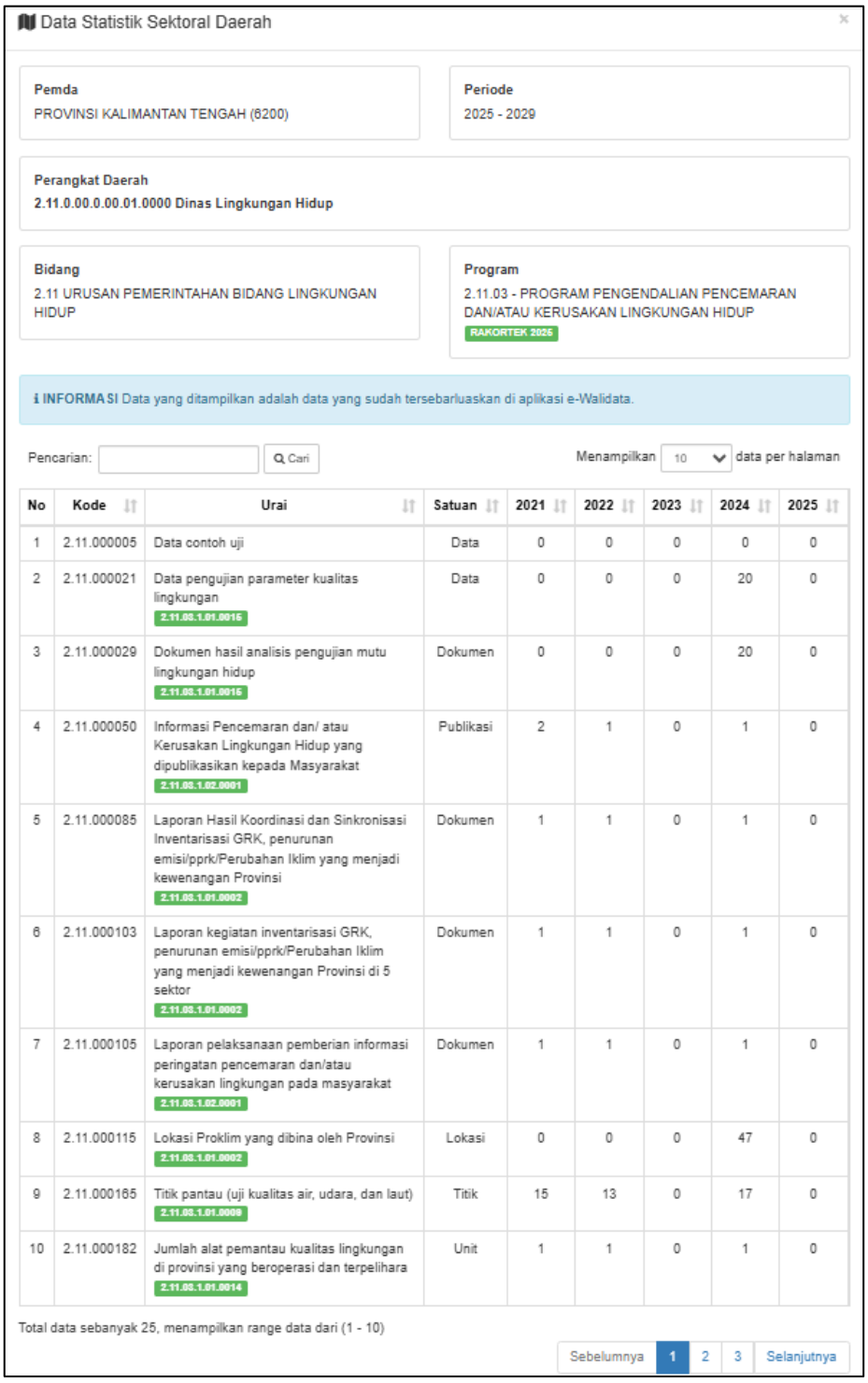

Data Statistik Sektoral Daerah

Pemda
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (6200)

Periode
2025 - 2029

Perangkat Daerah
2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Bidang
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Program
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
RAKORTEK 2026

INFORMASI Data yang ditampilkan adalah data yang sudah tersebarluaskan di aplikasi e-Walidata.

Pencarian: Cari

Menampilkan 10 data per halaman

No	Kode	Urai	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	2.11.000005	Data contoh uji	Data	0	0	0	0	0
2	2.11.000021	Data pengujian parameter kualitas lingkungan 2.11.03.1.01.0015	Data	0	0	0	20	0
3	2.11.000029	Dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup 2.11.03.1.01.0015	Dokumen	0	0	0	20	0
4	2.11.000050	Informasi Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dipublikasikan kepada Masyarakat 2.11.03.1.02.0001	Publikasi	2	1	0	1	0
5	2.11.000085	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan Provinsi 2.11.03.1.01.0002	Dokumen	1	1	0	1	0
6	2.11.000103	Laporan kegiatan inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan Provinsi di 5 sektor 2.11.03.1.01.0002	Dokumen	1	1	0	1	0
7	2.11.000105	Laporan pelaksanaan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada masyarakat 2.11.03.1.02.0001	Dokumen	1	1	0	1	0
8	2.11.000115	Lokasi Proklim yang dibina oleh Provinsi 2.11.03.1.01.0002	Lokasi	0	0	0	47	0
9	2.11.000165	Titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut) 2.11.03.1.01.0009	Titik	15	13	0	17	0
10	2.11.000182	Jumlah alat pemantau kualitas lingkungan di provinsi yang beroperasi dan terpelihara 2.11.03.1.01.0014	Unit	1	1	0	1	0

Total data sebanyak 25, menampilkan range data dari (1 - 10)

Sebelumnya 1 2 3 Selanjutnya

Pemda
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (6200)

Periode
2025 - 2029

Perangkat Daerah
2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Bidang
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Program
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
RAKORTEK 2025

ℹ **INFORMASI** Data yang ditampilkan adalah data yang sudah tersebarluaskan di aplikasi e-Walidata.

Pencarian: Cari

Menampilkan 10 data per halaman

No	Kode	Urai	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
11	2.11.000183	Jumlah data contoh uji 2.11.03.1.01.0004	Data	0	0	0	34	0
12	2.11.000184	Jumlah data pengujian parameter kualitas lingkungan 2.11.03.1.01.0004	Data	0	0	0	29	0
13	2.11.000186	Jumlah dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup 2.11.03.1.01.0004	Dokumen	0	0	0	20	0
14	2.11.000222	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan provinsi 2.11.03.1.01.0011	Dokumen	1	1	0	1	0
15	2.11.000224	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 2.11.03.1.01.0010	Dokumen	1	1	1	1	0
16	2.11.000231	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 2.11.03.1.01.0008	Dokumen	0	0	0	1	0
17	2.11.000237	Jumlah Laporan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi 2.11.03.1.01.0006	Dokumen	1	1	0	1	0
18	2.11.000258	Jumlah sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan di provinsi 2.11.03.1.01.0013	Unit	0	0	0	180	0
19	2.11.000268	Jumlah titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut) 2.11.03.1.01.0009	Titik	15	13	0	29	0
20	2.11.000279	Nilai IKA, IKU, IKTL, IKAL, IKLH (n-1) 2.11.03.1.01.0009	Poin	72.74	75.11	0	75.17	0

Total data sebanyak 25, menampilkan range data dari (11 - 20)

Sebelumnya 1 2 3 Selanjutnya

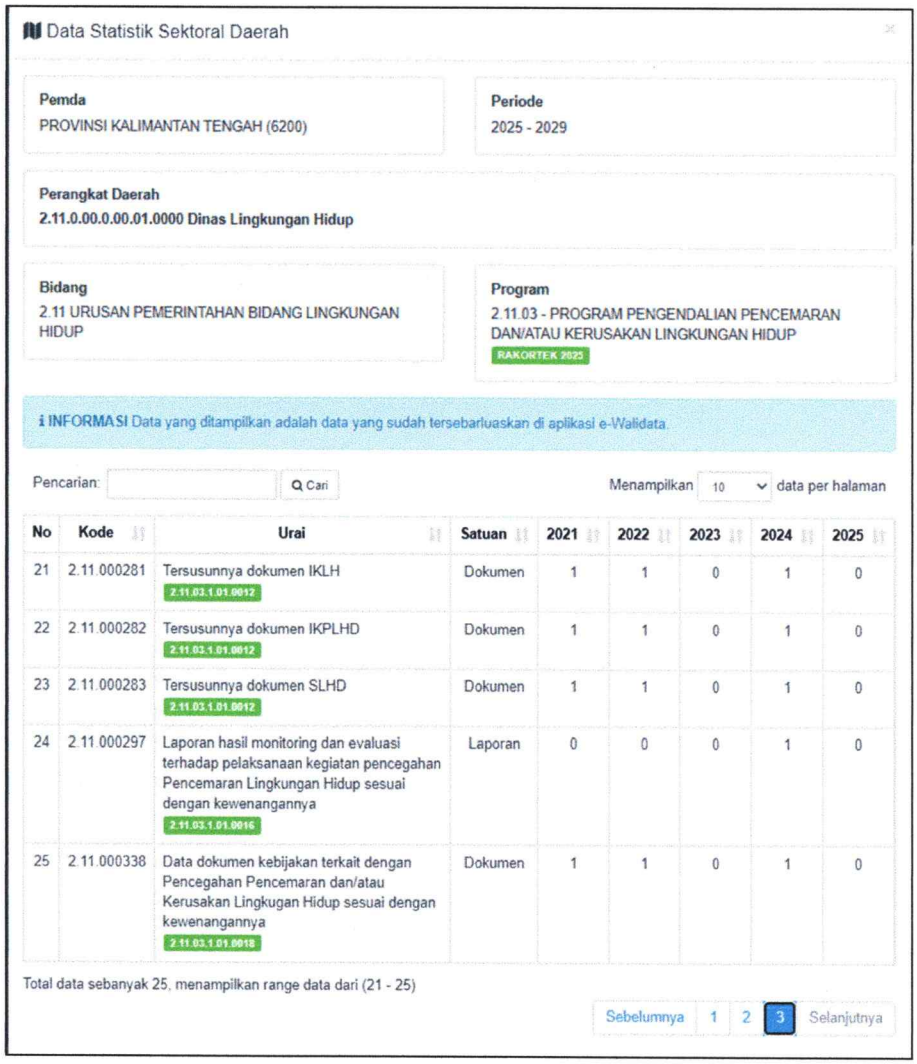

Data Statistik Sektoral Daerah

Pemda
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (6200)

Periode
2025 - 2029

Perangkat Daerah
2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Bidang
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Program
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
RAKORTEK 2025

i INFORMASI Data yang ditampilkan adalah data yang sudah tersebarluaskan di aplikasi e-Walidata.

Pencarian: Cari Menampilkan 10 data per halaman

No	Kode	Urai	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
21	2.11.000281	Tersusunnya dokumen IKLH 2.11.03.1.01.0012	Dokumen	1	1	0	1	0
22	2.11.000282	Tersusunnya dokumen IKPLHD 2.11.03.1.01.0012	Dokumen	1	1	0	1	0
23	2.11.000283	Tersusunnya dokumen SLHD 2.11.03.1.01.0012	Dokumen	1	1	0	1	0
24	2.11.000297	Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya 2.11.03.1.01.0016	Laporan	0	0	0	1	0
25	2.11.000338	Data dokumen kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya 2.11.03.1.01.0018	Dokumen	1	1	0	1	0

Total data sebanyak 25, menampilkan range data dari (21 - 25)

Sebelumnya 1 2 3 Selanjutnya

An. KEPALA DINAS
Sekretaris,

Dr. H. NOOR HALIM, S.Pd., M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196907021995121003

KERTAS KERJA VERIFIKASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO.	URAIAN	DEFINISI OPERASIONAL	CHECK LIST		REKOMENDASI
			SELARAS	TIDAK SELARAS	
1	MATRIK TINDAK LANJUT CHR APIP	memastikan CHR APIP tentang Reviu Renstra ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah dengan membuat Matrik tindak lanjut berdasarkan CHR.	Selaras		Sudah Melampirkan dan PD telah membuat Matrik Tindaklanjut Catatan Hasil Reviu berdasarkan CHR
2	POHON KINERJA	memastikan keterkaitan Kinerja Sasaran RPJMD terhadap Kinerja dari Tujuan, Kinerja Sasaran, Kinerja Program, Kinerja Kegiatan dan Kinerja Sub Kegiatan Perangkat Daerah sesuai Urusan yang diampu.	Selaras		Telah Selaras, terdapat keterkaitan Kinerja Sasaran RPJMD terhadap Kinerja dari Tujuan, Kinerja Sasaran, Kinerja Program, Kinerja Kegiatan dan Kinerja Sub Kegiatan Perangkat Daerah sesuai Urusan yang diampu didalam Renstra PD
3	*CASCADING* KINERJA	memastikan keterkaitan penjenjangan Kinerja Sasaran RPJMD terhadap Kinerja dari Tujuan, Kinerja Sasaran, Kinerja Program, Kinerja Kegiatan dan Kinerja Sub Kegiatan Perangkat Daerah sesuai Urusan yang diampu. Penjenjangan Kinerja yang dimaksud memperhatikan komponen struktur perencanaan, struktur organisasi dan struktur anggaran.	Selaras		Telah Selaras, terdapat keterkaitan penjenjangan Kinerja Sasaran RPJMD terhadap Kinerja dari Tujuan, Kinerja Sasaran, Kinerja Program, Kinerja Kegiatan dan Kinerja Sub Kegiatan Perangkat Daerah sesuai Urusan yang diampu berdasarkan komponen struktur perencanaan, struktur organisasi dan struktur anggaran di dalam Renstra PD

4	PROGRAM RENSTRA TERHADAP RPJMD	memastikan keselarasan dari Program dan Kinerja Program pada RPJMD terhadap Program pada RENSTRA PD.	Selaras		Telah selaras, terdapat keselarasan dan konsistensi Program dan Kinerja Program pada RPJMD dengan Program pada RENSTRA PD
5	PROGRAM PRIORITAS	memastikan Program Prioritas **KARTU HUMA BETANG SEJAHTERA** sudah masuk pada RENSTRA PD.	Selaras		Telah Selaras, Program Prioritas KARTU HUMABETANG SEJAHTERA sudah termuat pada RENSTRA PD yaitu : 1. Mendukung keterbukaan akses lapangan kerja dalam bentuk pelaksanaan Penyuluhan/Sosialisasi dan Pelatihan Pengolahan Sampah Bagi Masyarakat.
6	HAL-HAL LAIN	memastikan kesesuaian Sistematika, Target dan Prioritas Provinsi dan Nasional (Kementerian/Lembaga)	Selaras		

Verifikator :

Nama : TRI MINARNI, ST.,M.Si
NIP : 198810092010012001
Jabatan : PERENCANA AHLI MUDA
TTD :

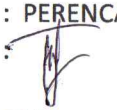

Mengetahui Kepala Bidang :

Nama : Drs. YOYO.,M.Si
NIP : 196905301990031006
Jabatan : Kepala Bidang Ekonomi, SDA dan Kerjasama
TTD :